

**SKRIPSI**  
**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT**  
**TERHADAP TIONGKOK DI ERA PEMERINTAHAN**  
**DONALD TRUMP (STUDI KASUS: KENAIKAN TARIF**  
**PAJAK PRODUK ASAL TIONGKOK)**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana**  
**Pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram**

**ALFIAN ADI SAPUTRA**

L1A017016

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**TAHUN 2023**



**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT  
TERHADAP TIONGKOK DI ERA PEMERINTAHAN  
DONALD TRUMP (STUDI KASUS: KENAIKAN TARIF  
PAJAK PRODUK ASAL TIONGKOK)**

Oleh :

**ALFIAN ADI SAPUTRA**

**L1A017016**

Setelah membaca naskah Skripsi ini dengan seksama, maka menurut pertimbangan kami telah memenuhi syarat untuk diujikan

PEMBIMBING I

L. Putrawandi Karjaya, S.IP., MA.  
NIDN. 0026078104

PEMBIMBING II

Khairur Rizki, MA.  
NIDN. 002029302

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP  
TIONGKOK DI ERA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP (STUDI KASUS:  
KENAIKAN TARIF PAJAK PRODUK ASAL TIONGKOK)

Disusun oleh :  
**ALFIAN ADI SAPUTRA**  
L1A017016

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu  
Hubungan Internasional Universitas Mataram pada :

Hari/tanggal : Selasa, 10 Januari 2023

Tempat : Laboratorium Diplomas

Pukul : 11.00 - 12.30 (WITA)

Tim Penguji  
Ketua,

**L. Puttrawandi Karjaya, S.IP., MA.**  
NIDN. 0026078104

Penguji I

**Khairur Rizki, MA.**  
NIDN. 002029302

Penguji II

**Y.A. Wahyuddin, S.IP., MA.**  
NIDN. 0027128205

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hubungan Internasional  
Universitas Mataram



**Prof. Dr. Muhammad Sood, SH., MH.**  
NIP. 195910071986031004



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfian Adi Saputra

NIM : L1A017016

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP  
TIONGKOK DI ERA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP (STUDI KASUS:  
KENAIKAN TARIF PAJAK PRODUK ASAL TIONGKOK)**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat keseluruhan ataupun sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik Skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Mataram, 10 Januari 2023



**Alfian Adi Saputra**

**L1A017016**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul “**Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Tiongkok di Era Pemerintahan Donald Trump (Studi Kasus: Kenaikan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok)**”. Adapun Skripsi ini diajukan guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak sekali menghadapi rintangan, tantangan, dan hambatan. Namun, berkat bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima kasih yang tulus dan mendalam penulis persembahkan untuk Nenek tercinta **Hatipah** yang telah mendidik dan merawat penulis dari usia 10 tahun hingga sampai saat ini serta kedua orang tua **Ayahanda Sukardi** dan **Ibunda Patmawati** atas segala do’a, dukungan, dan motivasi yang diberikan selama ini kepada penulis. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada adik-adikku tercinta **Ripaldi Gunawan** dan **Nanda Cahya Wahyuni**. Terima kasih telah sabar dalam menghadapi penulis, kalian semua adalah motivasi terbesar dalam hidup penulis hingga sampai di titik ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut terlibat dan berkontribusi dalam membantu dan mendukung penulis, baik secara moril

maupun materil dalam proses penyusunan Skripsi ini. Dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suri tauladan dan junjungan alam bagi seluruh umat manusia serta rahmat bagi semesta alam.
3. Bapak Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D., selaku Rektor Universitas Mataram.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Sood, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram.
5. Bapak Lalu Putrawandi Karjaya, S.IP., MA., selaku Dosen Pembimbing I, Pembimbing Magang, dan juga Pembimbing Akademik yang senantiasa setia menjadi pembimbing penulis selama masa perkuliahan serta selalu memberikan motivasi, masukan, dan arahan selama proses penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Khairur Rizki, MA., selaku Dosen Pembimbing II yang juga senantiasa membimbing penulis dalam membantu untuk memeriksa sistematika dan struktur kepenulisan dengan sangat teliti dan detail.
7. Bapak Y.A. Wahyuddin, S.IP., MA., selaku Dosen Penguji Netral yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji penulis pada saat Sidang Skripsi dan memberikan masukan untuk perbaikan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima

kasih atas dedikasinya yang telah mengajar dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.

9. Rekan-rekan seperjuangan dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Angkatan 2017 secara khusus Kelas 'A' dan yang mengambil Konsentrasi Ekonomi Politik Internasional terima kasih atas jalinan persahabatan selama masa perkuliahan.

10. Sahabat karibku 'Pejuang Skripsi' Ahmad Natsir Ariffikri, Ahmad Khaeril Wardi, & Aena Hidayatun Nufus yang sangat berjasa dalam mengingatkan dan memberikan motivasi serta semangat untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi).

Penulis berharap semoga Skripsi ini bisa menjadi sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama masa perkuliahan. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sekalian sehingga dapat menambah kesempurnaan pada Skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi seluruh pembaca.

Mataram, 10 Januari 2023



Alfian Adi Saputra

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok di era pemerintahan Donald Trump dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok. Untuk membantu menganalisis permasalahan dalam penelitian, penulis menggunakan Teori Neo-Merkantilisme dan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok merupakan bentuk kebijakan proteksionisme ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat di era Donald Trump sebagai upaya untuk melindungi industri produk dalam negerinya. Ada beberapa faktor yang mendorong Donald Trump untuk mengeluarkan kebijakan ini diantaranya faktor internal mengacu pada kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang mengalami penurunan, defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok, dan pengalaman Donald Trump sebagai seorang pengusaha. Selain itu, terdapat juga struktur dan perilaku sosial yang mempengaruhinya yakni Donald Trump yang berasal dari Partai Republik dan keinginan Amerika Serikat untuk merubah kebijakan ekonomi Tiongkok. Kemudian faktor eksternal, mengacu pada tingginya nilai ekspor Tiongkok di Amerika Serikat, meningkatnya pengaruh dan dominasi Tiongkok di tingkat global, dan pencurian hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Amerika Serikat oleh perusahaan Tiongkok.

**Kata Kunci:** Kebijakan Luar Negeri, Amerika Serikat, Tiongkok, Donald Trump, Kenaikan Tarif



## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the foreign policy of the United States towards China in the era of Donald Trump in the case of increasing tax rates on products from China. To help analyze problems in research, the authors use Neo-Mercantilism Theory and Foreign Policy Theory (Internal-External Setting). The research method used in this study is a qualitative research method with explanatory research. The findings in this study indicate that the increase in tax rates for products from China is a form of economic protectionism policy implemented by the United States government in the era of Donald Trump as an effort to protect its domestic product industry. There were several factors that prompted Donald Trump to issue this policy, including internal factors referring to the declining economic growth conditions in the United States, the United States' trade deficit against China, and Donald Trump's experience as a businessman. In addition, there are also social structures and behaviors that influence him, namely Donald Trump who comes from the Republican Party and the United States' desire to change China's economic policy. Then external factors, referring to the high value of Chinese exports to the United States, China's increasing influence and dominance at the global level, and the theft of American intellectual property rights (IPR) by Chinese companies.*

**Keywords:** *Foreign Policy, United States of America, China, Donald Trump, Tariff Increase*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.3.1 Tujuan Umum .....	16
1.3.2 Tujuan Khusus .....	17
1.4 Manfaat Penelitian .....	17
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	18
1.4.2 Manfaat Praktis .....	18
a) Mahasiswa .....	18
b) Peneliti/Akademisi .....	18
c) Pemangku Kebijakan .....	19

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Penelitian Terdahulu .....	20
2.1.1 Literatur Pertama .....	21
2.1.2 Literatur Kedua .....	25
2.1.3 Literatur Ketiga .....	28
2.1.4 Literatur Keempat .....	30
2.2 Kerangka Teori .....	33
2.2.1 Teori Neo-Merkantilisme .....	34
2.2.2 Teori Politik Luar Negeri ( <i>Internal-External Setting</i> ) .....	38
2.3 Alur Pemikiran Penelitian .....	49

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Penelitian .....	50
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.3 Analisis Data .....	54

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hubungan Perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok .....	59
4.2 Kenaikan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok Sebagai Kebijakan Proteksionisme Ekonomi Amerika Serikat di Era Donald Trump .....	67
4.2.1 Proteksionisme Ekonomi .....	68
4.2.2 Kenaikan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok .....	76
4.3 Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menaikkan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok .....	87
4.3.1 <i>Internal Setting of Decision Making</i> .....	87
a) Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat yang Mengalami Penurunan ( <i>Non-Human Environment</i> ) .....	88
b) Defisit Perdagangan Amerika Serikat Terhadap Tiongkok ( <i>Non-Human Environment</i> ) .....	90
c) Pengalaman Donald Trump Sebagai Seorang Pengusaha ( <i>Human Environment</i> ) .....	94

4.3.2 <i>Social Structure and Behavior</i> .....	97
a) Donald Trump yang Berasal dari Partai Republik ( <i>Major Institutional Patterns</i> ) .....	97
b) Keinginan Amerika Serikat Merubah Kebijakan Ekonomi Tiongkok ( <i>Political</i> ) .....	101
4.3.3 <i>External Setting of Decision Making</i> .....	103
a) Tingginya Nilai Ekspor Tiongkok di Amerika Serikat ( <i>Non-Human Environment</i> ) .....	103
b) Meningkatnya Pengaruh dan Dominasi Tiongkok di Tingkat Global ( <i>Non-Human Environment</i> ) .....	106
c) Pencurian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Amerika Serikat oleh Perusahaan Tiongkok ( <i>Societies Organized and Functioning as States and Government Action</i> ) .....	111
4.4 Dampak Kenaikan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok oleh Amerika Serikat di Era Donald Trump .....	114
4.4.1 Kenaikan Tarif Balasan Produk Asal Amerika Serikat oleh Pemerintah Tiongkok .....	114
4.4.2 Negosiasi Perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok .....	118

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	123
5.2 Saran .....	125

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Tabel Snyder <i>Setting</i> .....	43
<b>Tabel 2.2</b> Alur Pemikiran Penelitian .....	49

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Komponen Dalam Analisis Data .....	55
<b>Gambar 4.1</b> Donald Trump Menandatangani Aturan Kenaikan Tarif Impor	82

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1.1</b> Total Nilai Ekspor Tahun 2017 .....	9
<b>Grafik 1.2</b> Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok .....	10
<b>Grafik 1.3</b> Pertumbuhan Ekonomi AS Tahun 2017 .....	10
<b>Grafik 1.4</b> Defisit Perdagangan AS Terhadap Tiongkok .....	11
<b>Grafik 4.1</b> <i>United States GDP Growth Rate</i> .....	89
<b>Grafik 4.2</b> Total Nilai Impor & Ekspor AS ke Tiongkok .....	92

## DAFTAR SINGKATAN

<b>AIIB</b>	: <i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
<b>BRI</b>	: <i>Belt and Road Initiative</i>
<b>DPR</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat
<b>FDI</b>	: <i>Foreign Direct Investment</i>
<b>FTA</b>	: <i>Free Trade Area</i>
<b>G20</b>	: <i>Group of Twenty</i>
<b>GDP</b>	: <i>Gross Domestic Product</i>
<b>IMF</b>	: <i>International Monetary Fund</i>
<b>NTB</b>	: <i>Non-Tarif Barrier</i>
<b>PDB</b>	: Produk Domestik Bruto
<b>TB</b>	: <i>Tariff Barrier</i>
<b>TPP</b>	: <i>Trans Pacific Partnership</i>
<b>USITC</b>	: <i>United States International Trade Commission</i>
<b>USTR</b>	: <i>United States Trade Representative</i>
<b>WTC</b>	: <i>World Trade Center</i>
<b>WTO</b>	: <i>World Trade Organization</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsep liberalisasi ekonomi yang dibawa oleh Amerika Serikat atas kemenangannya dalam perang dingin menghasilkan sebuah tatanan dunia baru dan diprediksi bahwa ekonomi akan menggantikan geopolitik sebagai kekuatan pendorong dalam politik internasional.<sup>1</sup> Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena politik dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, begitu pun juga sebaliknya kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan politik. Dalam ekonomi politik internasional, negara tidak hanya memperhatikan keuntungan bagi negaranya, namun juga memperhatikan relasi maupun kerjasama dengan negara lain.<sup>2</sup>

Dapat dikatakan bahwa abad ke-21 kini diwarnai dengan konsep kerjasama antar negara sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Bukan hanya negara-negara berkembang saja, melainkan negara-negara maju pun juga membutuhkan pola hubungan kerjasama guna memperoleh keuntungan dari integrasi ekonomi abad ke-21. Oleh karena itu, aksi-reaksi keputusan kebijakan luar negeri suatu negara, baik yang berorientasi keluar maupun kedalam bertujuan untuk semakin meningkatkan pendapatan

---

<sup>1</sup> Scott Burchill & Andrew Linklater, *Theories of International Relations*, edisi Bahasa Indonesia *Teori-Teori Hubungan Internasional*, diterjemahkan oleh M. Sobirin, Nusa Media, Bandung, 2009, p. 37.

<sup>2</sup> Vina Benita Laksono, Triesanto Romulo Simanjutak, & Christian H.J. de Fretes, 'Dampak Perang Dagang Amerika Serikat-Cina Terhadap Pertumbuhan Investasi Asing di Vietnam Tahun 2018-2019,' *Jurnal Cakrawala*, vol. 9, no. 2, Desember 2020, p. 118.

negaranya serta berusaha untuk mendapatkan *Maximum Advantage* guna memperkuat ekonomi mereka, sehingga dengan kondisi ekonomi yang baik dan kuat pengaruhnya, maka tingkat *Power* dan dominasi negara tersebut juga akan semakin menguat.<sup>3</sup>

Dengan adanya keterikatan ekonomi antar negara di dunia, menyebabkan tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara dapat mempengaruhi negara lainnya juga. Sebuah negara dapat menggunakan pengaruhnya dalam jalannya perekonomian untuk mempengaruhi pasar dari negara rival ataupun negara sahabat. Ketegangan ekonomi yang terjadi di sebuah negara, terutama negara besar dengan perekonomian yang kuat akan membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian dunia.<sup>4</sup> Saat ini, sebagian besar negara-negara di dunia menerapkan sistem ekonomi terbuka atau perdagangan bebas, dimana sistem ini memberikan pengaruh terhadap kerjasama ekonomi dan menjadi sumber konflik antar negara.

Pendekatan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dengan pendekatan politik, hal ini terlihat dari adanya interaksi antara negara dan pasar. Dalam tatanan sistem internasional, negara maupun pasar merupakan aspek penting dalam interaksi ekonomi politik internasional. Tercatat sebagai salah satu negara yang menjalin kerjasama dalam skala global, Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya yang paling berpengaruh

---

<sup>3</sup> Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Economic Development*, edisi Bahasa Indonesia *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*, diterjemahkan oleh Andri Yelvi, Erlangga, Jakarta, 2006, p. 183.

<sup>4</sup> Vina Benita Laksono, Triesanto Romulo Simanjutak, & Christian H.J. de Fretes, p. 118.



terhadap kondisi ekonomi dunia dan mengutamakan perekonomian sebagai salah satu instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>5</sup> Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting bagi Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat akan memberikan prioritasnya dalam hal perdagangan. Sehingga, hal-hal yang dianggap mengganggu perkembangan di sektor perdagangannya, tentu menjadi fokus serius dalam pembuatan kebijakan. Amerika Serikat akan mendukung hal-hal yang mampu untuk meningkatkan perdagangannya. Namun juga sebaliknya, akan menghalangi hal-hal yang menjadi faktor penghambat perkembangan di sektor perdagangannya.

Salah satu negara yang menjalin kerjasama dalam sektor perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat ialah Tiongkok. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Tiongkok memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Bahkan, Tiongkok mampu berkembang menjadi sebuah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat di posisi pertama. Amerika Serikat berusaha menjalin kerjasama dengan Tiongkok dengan tujuan untuk menyeimbangkan keadaan ekonomi global dan menghilangkan hambatan dagang serta meningkatkan nilai investasi bilateral diantara kedua negara. Amerika Serikat berusaha mendorong Tiongkok agar supaya dapat membuka pasar dan peluang investasi yang baru bagi bisnis internasional. Akhirnya, Tiongkok pun bersedia untuk bergabung dengan WTO (*World Trade Organization*) pada

---

<sup>5</sup> Sonia Agusti Parbo, 'Negosiasi Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok,' *Media Ekonomi*, vol. 28, no. 2, Oktober 2020, pp. 99-100.

Desember 2001. Dengan bergabungnya Tiongkok dengan WTO, hal ini merupakan strategi untuk meningkatkan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.<sup>6</sup>

Sejak Tiongkok resmi bergabung menjadi salah satu anggota WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 2001 dengan dukungan Amerika Serikat, Negeri Tirai Bambu ini mampu membuat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan semakin berkembang. Masuknya Tiongkok ke dalam organisasi perdagangan dunia memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Tiongkok. Keuntungan perdagangan yang semakin besar berpotensi untuk memperkuat perekonomiannya, sehingga dengan masuknya Tiongkok dalam organisasi ini membuat pintu perdagangan mereka pun semakin terbuka luas.<sup>7</sup>

Pasca terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008, Amerika Serikat mengalami perlambatan ekonomi dan menjadikan Tiongkok sebagai salah satu raksasa ekonomi baru di dunia. Hal ini menjadi momentum bagi Tiongkok untuk memainkan peran penting dalam stabilitas perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi tantangan tersendiri bagi Amerika Serikat, dimana terjadinya peningkatan impor produk-produk asal Tiongkok di Amerika Serikat maupun di negara lainnya.<sup>8</sup> Integrasi

---

<sup>6</sup> Walter S. Jones, *The Logic of International Relations*, edisi Bahasa Indonesia *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, diterjemahkan oleh Budiono Kusumohamidjojo, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, p. 228.

<sup>7</sup> Elsa Seirafina Ardhani, 'Perang Dagang Amerika Serikat dengan China: Trump VS Xi Jinping,' *Jurnal Skripsi Digital Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (daring), 2019, <<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/26044/K.Jurnal.pdf?sequence=12&isAllowed=y>>, diakses pada 16 Agustus 2021.

<sup>8</sup> Sonia Agusti Parbo, p. 100.

Tiongkok yang tumbuh cepat ke dalam ekonomi global sejak resmi bergabung menjadi salah satu anggota WTO telah menimbulkan masalah khusus bagi negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Amerika Serikat. Nilai ekspor Tiongkok yang terus menerus meningkat justru berdampak negatif bagi Amerika Serikat.<sup>9</sup>

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Samuel P. Huntington bahwa: “Konfigurasi struktur *Power Global* pasca Perang Dingin (*Cold War*) ditandai dengan situasi *The Lonely Superpower Via a Vis Multiple Powers*, dimana Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara *Superpower* pasca sepeninggal Uni Soviet harus berhadapan dengan *New Emerging Multiple Power* seperti; Uni Eropa, Rusia, Tiongkok, dan Jepang.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dengan bangkitnya Tiongkok yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat eksistensi Amerika Serikat sebagai negara *Superpower* pun dapat terancam.

Di era kepemimpinan Barack Obama, Amerika Serikat berada pada kondisi pasca krisis ekonomi global tahun 2008 yang mengguncang ekonomi dunia. Oleh karenanya, Obama dihadapkan pada ketidakstabilan ekonomi sehingga orientasi luar negeri Amerika Serikat cenderung untuk memperbaiki dan memitigasi akses global dari krisis tersebut. Selain itu, Obama juga dihadapkan pada kemunculan kekuatan revisionis baru dalam

---

<sup>9</sup> Istanul Badiri, ‘Analisis Ekonomi Politik Internasional dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok Periode 2018-2019,’ *Padjadjaran Journal of International Relations*, vol. 2, no. 2, September 2020, p. 148.

<sup>10</sup> Yulius Purwadi Hermawan, ‘Kevin Rudd dan Inovasi Baru Menghadapi Kekuatan Global dan Multilateralisme,’ *Jurnal Luar Negeri: Menjalin Keakraban Baru Indonesia-Australia*, vol. 25 (1-4), 1-17, 2008, p.12.

bentuk meningkatnya pengaruh Tiongkok di Asia. Kedua kondisi ini lantas membuat menurunnya hegemoni Amerika Serikat semakin terlihat jelas.

Konteks ini berbeda dengan di era kepemimpinan George Bush, ketika kemampuan Amerika Serikat masih unggul. Pada era Barack Obama keunggulan ini mulai dikejar oleh Tiongkok, sehingga mulai muncul tensi antar kedua kekuatan utama dalam sistem internasional. Obama kemudian merespon dengan mengeluarkan kebijakan *Pivot to Asia* yang mendorong semakin tingginya keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik.<sup>11</sup> Hal ini jelas dilakukan sebagai upaya untuk meredam pengaruh Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik.

Pasca kepemimpinan Barack Obama, Amerika Serikat dihadapkan pada dunia yang semakin dinamis. Kemunculan Tiongkok dan krisis ekonomi global yang berkepanjangan menjadi bagian dari deretan panjang permasalahan yang harus direspon oleh Amerika Serikat dalam konteksnya untuk tetap relevan sebagai hegemoni. Namun, yang terjadi pasca kepemimpinan Barack Obama justru semakin memperparah dan membuat sulit status hegemoni Amerika Serikat.

Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat menganggap bahwa sudah saatnya Amerika Serikat berfokus untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan domestiknya. Ia mengeluarkan slogan "*America First*" dan "*Make America Great Again*". Dalam retorikanya, slogan tersebut justru kontradiktif dengan status Amerika

---

<sup>11</sup> Agastya Wardhana, 'Grand Strategy Obama: Pivot to Asia,' *Global Strategis*, vol. 12, no. 1, 2018, p. 74.

Serikat yang sebenarnya masih sebagai hegemoni. Dalam praktiknya juga, Donald Trump justru semakin liar dalam bertindak. Ia mengatakan bahwasanya akan memberlakukan hambatan tarif bagi barang-barang impor yang masuk ke Amerika Serikat.<sup>12</sup>

Sejak masa kampanye kepresidenannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memang telah mengindikasikan akan mengarahkan perekonomian Amerika Serikat kearah proteksionisme.<sup>13</sup> Langkah ini tidak terlepas dari latar belakang sosok Donald Trump yang berasal dari keluarga pengusaha atau pebisnis. Sebagai Presiden Amerika Serikat dengan latar belakang pebisnis, Trump melihat bahwa pasar bebas lebih banyak merugikan kepentingan Amerika Serikat. Oleh karena itu, bagi Trump rakyat Amerika Serikat membutuhkan kehadiran negara untuk melindungi (proteksi) produk yang dihasilkan dalam menghadapi serbuan produk-produk impor.<sup>14</sup> Langkah ini menjadi relevan karena sebagai seorang pebisnis, Trump memiliki insting bisnis yang kuat. Salah satu prinsip dasar dalam bisnis ialah memaksimalkan keuntungan.<sup>15</sup>

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada tahun 2016 memang mengejutkan dunia, khususnya warga Amerika Serikat. Trump berhasil menaklukkan pesaingnya dari Partai Demokrat,

---

<sup>12</sup> Agastya Wardhana & Vinsensio Marselino Arifin Dugis, 'Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump,' *Global Strategis*, vol. 13, no. 2, 2019, p. 143.

<sup>13</sup> Adirini Pujayanti, 'Perang Dagang Amerika Serikat – China dan Implikasinya Bagi Indonesia,' *Jurnal Info Singkat*, vol. 10, no. 7, April 2018, p. 7.

<sup>14</sup> Ahmad Sahide, 'Proteksionisme Trump dan Supremasi Politik Global Amerika', *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, vol. 17, no. 1, 2021, p. 1.

<sup>15</sup> Agastya Wardhana & Vinsensio Marselino Arifin Dugis, 'Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump,' p. 149.

Hillary Clinton dengan masing-masing perolehan suara 279:228 melalui *Electoral Vote* pada 8 November 2016.<sup>16</sup> Pasca naiknya Trump, Amerika Serikat melihat adanya globalisasi atau perdagangan bebas sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan berisiko terhadap perekonomian negara, karena dapat menyebabkan krisis bagi negaranya. Hal tersebut mengakibatkan perubahan cara pandang Amerika Serikat dari yang awalnya dulu optimis terhadap hadirnya globalisasi, kemudian menjadi pesimis. Pasar bebas juga menyebabkan produk-produk Amerika Serikat kalah bersaing dengan produk asal Tiongkok, hal ini dikarenakan harga dari produk Tiongkok relatif lebih murah jika dibandingkan dengan produk Amerika Serikat.<sup>17</sup>

Pergerakan yang relatif bebas dari manusia dalam hal produksi barang dan jasa ternyata bukan hanya telah menimbulkan keterkaitan dan ketergantungan. Akan tetapi juga telah menimbulkan persaingan global yang semakin ketat, karena setiap negara berlomba-lomba untuk berinovasi dengan produk-produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Perdagangan internasional juga dapat dijadikan sebagai mesin bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

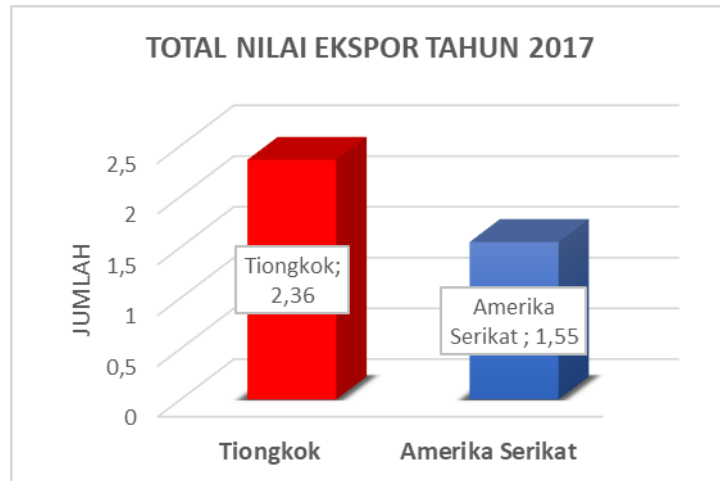
Tercatat nilai ekspor Tiongkok pada tahun 2017 merupakan yang paling tinggi mencapai US\$ 2,36 triliun mengalahkan Amerika Serikat yang hanya mencapai US\$ 1,55 triliun yang berada pada posisi kedua, negara

---

<sup>16</sup> Aldila Arin Aini, Islamiah Bastiar, & Sumarlan, 'Kemenangan Donald Trump Sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 Melalui Analisis Konstruksi Klausa Relatif Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Secara Semantis,' *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 18, no. 1, Februari 2017, p. 11.

<sup>17</sup> Sonia Agustri Parbo, p. 104.

dengan tingkat ekspor terbesar di dunia. Berikut ini grafik total nilai ekspor kedua negara pada tahun 2017.

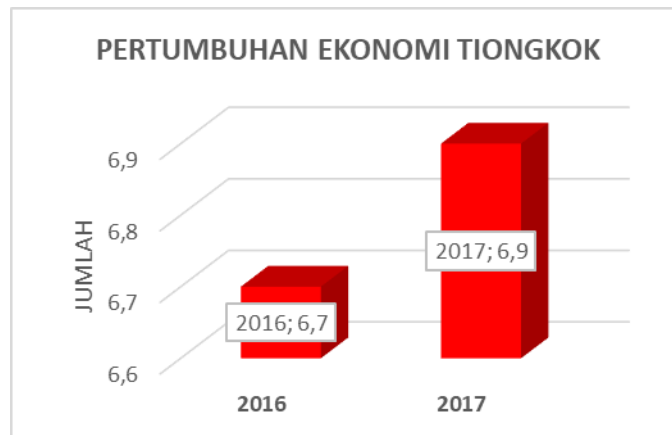


**Grafik 1.1 Total Nilai Ekspor Tahun 2017**

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Revo Kristiadi Aer, 2021, p. 2.

Hampir di setiap negara dan juga sektor pasar internasional barang-barang produksi yang berasal dari Tiongkok yang paling banyak mendominasi serta perkembangan ekonomi Tiongkok merupakan yang tercepat dalam kurun waktu selama 30 tahun terakhir. Dikarenakan tingkat nilai ekspor Tiongkok yang begitu besar, sehingga mampu menaikkan nilai Produk Domestik Brutonya (PDB) hingga mencapai US\$ 12,4 triliun pada tahun 2017.

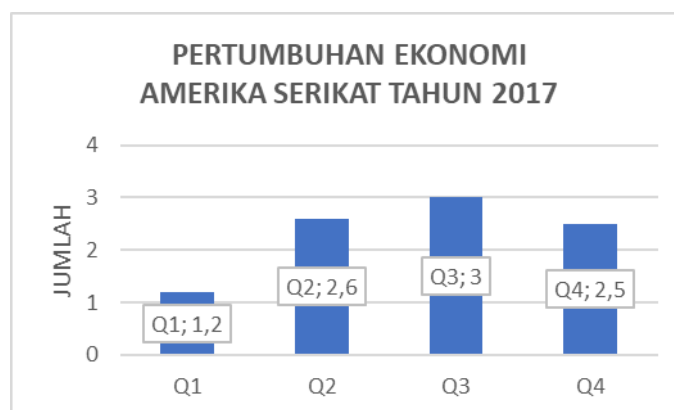
Di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya sebesar 6,7%. Namun, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Tiongkok sedikit menggeliat menjadi 6,9% saat menembus PDB senilai 82,7 triliun Yuan atau setara dengan US\$ 12,4 triliun. Berikut ini grafik pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2016 dan 2017.



**Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok**

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Revo Kristiadi Aer, 2021, p. 2.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sendiri juga menggeliat di awal pemerintahan Presiden Donald Trump pada tahun 2017. Pada kuartal pertama pemerintahan Presiden Donald Trump, ekonomi Amerika Serikat tumbuh sekitar 1,2%. Tiga bulan kemudian pada kuartal kedua, Presiden Donald Trump mampu menaikkannya dua kali lipat menjadi 2,6%. Pada kuartal ketiga naik lagi menjadi 3%. Namun, pada kuartal keempat tertahan dan turun menjadi 2,5%.<sup>18</sup> Berikut ini grafik pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump pada tahun 2017.



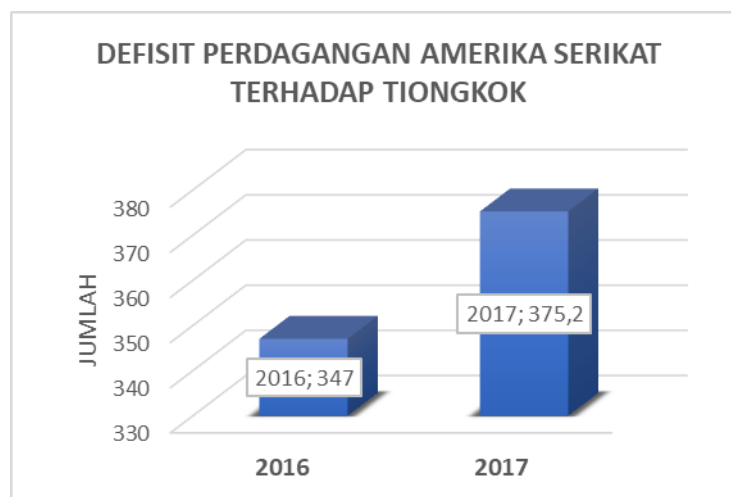
**Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi AS Tahun 2017**

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Revo Kristiadi Aer, 2021, p. 2.

<sup>18</sup> Revo Kristiadi Aer, 'Pengaruh Perang Dagang China – Amerika Serikat Terhadap Hubungan Dagang Indonesia dengan Amerika Serikat,' *Jurnal Politico*, vol. 10, no. 4, 2021, p. 2.



Selain kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun, jumlah nilai ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat yang terus menerus meningkat dan tidak diimbangi dengan jumlah ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok justru berdampak negatif bagi Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan. Amerika Serikat sendiri terus berupaya mengurangi defisit perdagangannya dengan Tiongkok yang naik menjadi US\$ 375,2 miliar pada tahun 2017 dari yang sebelumnya hanya US\$ 347 miliar pada tahun 2016.<sup>19</sup> Berikut ini grafik defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada tahun 2016 dan 2017.



**Grafik 1.4 Defisit Perdagangan AS Terhadap Tiongkok**  
Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Adhi Prasetyo, 2018, p. 5.

Dalam hal ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump melihat agresi ekonomi Tiongkok merupakan ancaman global karena pertumbuhannya yang sangat pesat dan menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia. Oleh karena itu, ia mengambil suatu kebijakan yang dapat memicu konflik dalam dunia perdagangan internasional antara Amerika Serikat dan Tiongkok

---

<sup>19</sup> Adhi Prasetyo, 'Antisipasi Indonesia Terhadap Kebijakan GSP Amerika Serikat dan Perang Dagang Amerika Serikat vs China,' *Jurnal Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, vol. 3, no. 13, Juli 2018, p. 5.

dengan kebijakannya menaikkan tarif pajak impor terhadap produk-produk yang berasal dari Tiongkok, seperti misalnya saja pada baja sebesar 25% dan aluminium sebesar 10% pada tanggal 8 Maret 2018 yang lalu. Kemudian, pada tanggal 22 Maret 2018 Trump juga menanggihkan tarif untuk beberapa negara tetapi tidak untuk Tiongkok.

Kebijakan Trump yang lain terhadap Tiongkok ialah menaikkan bea impor barang-barang Tiongkok sebesar 25% terhadap beberapa produk seperti; mobil, hardisk, dan suku cadang pesawat pada tanggal 6 Juli 2018. Kemudian, pada tanggal 23 Agustus 2018 Trump kembali menaikkan bea masuk terhadap produk Tiongkok senilai US\$ 16 miliar. Kebijakan Trump menaikkan bea masuk produk-produk asal Tiongkok masih terus berlanjut. Pada tanggal 10 Mei 2019 Washington kembali menaikkan tarif impor produk asal Tiongkok senilai US\$ 200 miliar dan tidak hanya itu Trump dalam serial *Tweet*-nya pada Jum'at, 1 Oktober 2019 kembali mengatakan akan menaikkan tarif produk-produk asal Tiongkok senilai US\$ 250 miliar menjadi 30% dari yang sebelumnya hanya 25%. Selain itu, untuk produk bernilai US\$ 300 miliar Trump juga akan menaikkan tarif hingga 15% dari yang sebelumnya hanya 10%.<sup>20</sup> Selain menaikkan tarif pajak impor, Amerika Serikat juga berencana untuk membatasi investasi dan mengambil tindakan terhadap Tiongkok melalui organisasi perdagangan dunia yaitu WTO (*World Trade Organization*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Revo Kristiadi Aer, pp. 2-3.

<sup>21</sup> Adirini Pujayanti, p. 7.

Perekonomian Tiongkok yang berkembang pesat menjadi salah satu ancaman terhadap stabilitas perekonomian Amerika Serikat dalam skala global. Secara historis, hadirnya rivalitas negara adidaya ini cenderung menyebabkan destabilisasi geopolitik yang berkembang dalam berbagai aspek termasuk ekonomi. Peningkatan ekonomi Tiongkok mengakibatkan terjadinya gejolak geoekonomi terutama di bidang perdagangan dalam kerangka kerjasama antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dimasa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat mengalami berbagai gejolak dan tantangan terhadap politik domestik maupun hubungan luar negerinya. Fenomena yang menjadi isu sentral pada era Trump ialah ekonomi dan perdagangan internasional dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang proteksionisme. Salah satu upaya yang dilakukan Trump ialah dengan menaikkan tarif pajak terhadap produk atau barang yang masuk ke negaranya terutama sekali produk yang berasal dari Tiongkok. Kenaikan tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat ini, tentu saja mendapat kecaman dari pihak Tiongkok.

Di era kepemimpinan Trump Amerika Serikat juga cenderung menerapkan *Economic Statecraft* yang merupakan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional, sehingga memperoleh hasil geopolitik dan geoekonomi yang menguntungkan negaranya. Selain itu, Trump juga menyatakan bahwa *Free Trade Area* (FTA) tidak mampu memberikan perubahan terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga Trump merubah

arah kebijakan luar negerinya menjadi unilateralisme yang mengedepankan pada pemberlakuan tarif sebagai upaya untuk mengembalikan posisi hegemoni Amerika Serikat.<sup>22</sup>

Melihat akan hal ini, Nativisme merupakan istilah yang dapat menggambarkan model kepemimpinan Trump yang memposisikan keberpihakan kepentingan bangsa Amerika Serikat. Model ini mewarnai diskursus *America First*, sekaligus terlihat sebagai politik transaksi sempit dan penuh risiko. Wacana *America First* merupakan deklarasi sekaligus pesan kepada masyarakat dunia bahwa globalisasi harus berjibaku dengan model proteksi ekonomi yang didesain oleh kebijakan Trump. Satu persatu kebijakan Obama yang dirasa merugikan pasca terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 mulai direvisi oleh Trump.<sup>23</sup> Karena ia menganggap bahwa hal ini sudah tidak relevan dengan kondisi Amerika Serikat saat ini.

Sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akhirnya mengeluarkan sebuah kebijakan yang memicu terjadinya ketegangan diantara dua negara raksasa yang memiliki peranan besar dalam menentukan arah perekonomian global. Kebijakan Donald Trump secara ekonomi dan politik telah mengundang banyak kontroversi, baik yang berorientasi keluar maupun kedalam. Trump, melalui komitmennya untuk mengembalikan kejayaan Amerika Serikat mencoba untuk mengarahkan kebijakan ekonomi yang mirip dengan kebijakan Merkantilis, terutama sekali dalam

---

<sup>22</sup> Sonia Agusti Parbo, pp. 100-101.

<sup>23</sup> Helsa Eka Putri & Aspin Nur Arifin Rivai, 'Donald Trump, *America First*, dan Deglobalisasi: Bagaimana Kelanjutannya,' *Insignia Journal of International Relations*, vol. 6, no.1, April 2019, p. 31.

menghadapi Tiongkok. Seperti diketahui, Trump telah resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak impor atas produk yang berasal dari Tiongkok.<sup>24</sup>

Kenyataan yang terjadi pada era Trump ini menarik untuk dianalisis, karena dalam sejarah panjang politik luar negeri Amerika Serikat terdapat beberapa norma dan nilai yang dianut oleh para pemimpin-pemimpin sebelumnya mulai dari realisme, idealisme, konservatif, hingga liberal internasional. Namun, di era Trump justru tidak menganut nilai ini dan sebaliknya bertindak diluar dari norma dan nilai tersebut.<sup>25</sup> Oleh karena itu, sebagai Presiden Amerika Serikat menarik untuk dianalisis dan teliti kaitannya dengan kebijakan luar negeri yang diambil.<sup>26</sup> Tulisan ini akan mencoba untuk menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok di era pemerintahan Donald Trump. Dimana, Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak atas produk yang berasal dari Tiongkok.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan dan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan permasalahan yaitu:

*“Mengapa Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump Mengeluarkan Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Atas Produk yang Berasal dari Tiongkok?”*

---

<sup>24</sup> Alfian Adi Saputra, *Selamat Datang Perang Dagang Amerika Serikat vs Tiongkok* [video], <<https://www.youtube.com/watch?v=8J9CzRRnz3w>>, diakses pada 15 September 2021.

<sup>25</sup> Agastya Wardhana & Vinsensio Marselino Arifin Dugis, ‘Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump,’ pp. 143-144.

<sup>26</sup> Ilhma Fadil, Analisis Karakteristik Personal Donald Trump Dalam Kebijakan Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States,’ *Journal of International Relations*, vol. 6, no. 2, 2020, p. 258.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap kita melakukan kegiatan, apalagi kegiatan penelitian tentu harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian dalam tulisan ini pada hakikatnya untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak atas produk yang berasal dari Tiongkok. Mengingat hampir di setiap negara dan juga sektor pasar internasional tidak terkecuali di Amerika Serikat, barang-barang produksi yang berasal dari Tiongkok yang banyak mendominasi. Tidak hanya itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana dampak dari diterapkannya kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus untuk memahami kerangka dasar penelitian ini sebagai bentuk arahan yang komprehensif dan mendetail terkait dengan sebuah tujuan penelitian, antara lain sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a) Untuk memberikan cara pandang umum terkait dengan kajian analisis politik atau kebijakan luar negeri di Amerika Serikat.
- b) Untuk menganalisis Teori Neo-Merkantilisme dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat di era Donald Trump.
- c) Untuk menganalisis Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*) yang dikemukakan oleh Richard Snyder, dkk dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan luar negeri di Amerika Serikat.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a) Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak atas produk yang berasal dari Tiongkok.
- b) Untuk melihat bagaimana dampak dari diterapkannya kebijakan kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat di era Donald Trump.
- c) Untuk memahami relevansi Teori Neo-Merkantilisme dan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*) dalam menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok khususnya dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait faktor-faktor penyebab Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak atas produk yang berasal dari Tiongkok. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan nantinya dapat mengembangkan pengetahuan mengenai kajian Teori Neo-Merkantilisme dan Teori Politik Luar Negeri. Selain itu juga untuk memahami hasil *Output* dari adanya kegiatan penelitian, terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis dari kegiatan penelitian, antara lain sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dari sisi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan baru dalam menjelaskan “Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Tiongkok di Era Pemerintahan Donald Trump (Studi Kasus: Kenaikan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok)”. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan nantinya mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pengaplikasian Teori Neo-Merkantilisme dan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*) dalam membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a) Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sarana dan prasarana baru dalam pencarian referensi atau sumber rujukan bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan khusus terhadap kajian analisis politik atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat khususnya terhadap Tiongkok. Selain itu juga, dengan dilakukannya kegiatan penelitian ini dapat membantu untuk melatih kemampuan penulis dalam membuat sebuah Karya Tulis Ilmiah.

##### **b) Peneliti/Akademisi**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah jawaban bagi kekosongan dan kekurangan penelitian sebelumnya dan bermanfaat bagi pengembangan penelitian di bidang Hubungan Internasional selanjutnya, khususnya dalam kajian analisis politik atau kebijakan



luar negeri Amerika Serikat sebagai sebuah kajian yang kaya akan referensi dan sumber pengetahuan baru.

c) **Pemangku Kebijakan**

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kebijakan, baik untuk pemerintah Tiongkok maupun pemerintah Indonesia sebagai bahan evaluasi dalam membuat kebijakan terkait strategi perdagangan selanjutnya ketika negara lain menerapkan kebijakan kenaikan tarif. Selain itu, penelitian ini juga akan bermanfaat bagi para pelaku bisnis di Tiongkok yang ingin mengembangkan dan menjalankan bisnisnya di Amerika Serikat agar supaya mengetahui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan lebih siap untuk menyusun strategi perdagangan selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat beberapa literatur yang relevan dengan masalah penelitian ini yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan *Literature Review* atau tinjauan pustaka. Dari sejumlah tulisan yang ada, peneliti belum menjumpai karya tulis yang secara khusus mengkaji terkait “Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Tiongkok di Era Pemerintahan Donald Trump (Studi Kasus: Kenaikan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok)”. Topik ini menjadi menarik karena pada dasarnya ini merupakan kasus yang masih tergolong baru atau *Up to Date*, meskipun sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi, penelitian sebelumnya lebih banyak terfokus pada bagaimana interaksi dan dampak perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok tanpa mengkaji lebih dalam awal mula penyebab terjadinya perang dagang tersebut.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok khususnya dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok yang merupakan bagian dari awal mula penyebab terjadinya perang dagang tersebut. Dalam hal ini, penulis kemudian menemukan beberapa literatur atau referensi yang relevan untuk menunjang kegiatan penelitian ini. Literatur tersebut nantinya akan menjadi bahan acuan untuk mengkaji,

menelusuri, dan mengungkapkan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>27</sup> Dengan demikian, penelitian akan menjadi lebih valid dan komprehensif. Berikut ini merupakan beberapa literatur yang penulis gunakan, antara lain sebagai berikut:

### **2.1.1 Literatur Pertama**

Sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Agastya Wardhana dan Vinsensio Marselino Arifin Dugis yang berjudul “***Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump (Selective Isolationism Grand Strategy: United States Foreign Policy During Trump Administration)***”. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal *Global Strategis*, vol. 13, no. 2, tahun 2019. Secara umum, tulisan ini membahas mengenai pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump melalui analisis *Grand Strategy* di tengah kondisi turunnya hegemoni Amerika Serikat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan hegemoni Amerika Serikat sesungguhnya telah dialami semenjak periode kepemimpinan Presiden Barack Obama. Berbeda dengan pendahulunya, tulisan ini mengatakan bahwa Presiden Trump merespon situasi penurunan hegemoni Amerika Serikat dengan *Grand Strategy* kebijakan luar negeri yang berpola isolasionisme selektif yang memiliki dua indikasi utama yaitu adanya reorientasi kepentingan nasional di tingkat domestik (dari luas ke sempit) serta adanya pengurangan komitmen internasional yang ditunjukkan

---

<sup>27</sup> Asrudin, Mirza Jaka Suryana, & Musa Maliki (eds.), *Metode Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*, Intrans Publishing, Malang, 2014, pp. 6-8.

melalui perubahan hubungan dengan aliansinya dan adanya reorientasi militer Amerika Serikat di dunia.<sup>28</sup>

Di era kepemimpinan Presiden Donald Trump, kepentingan nasional Amerika Serikat didefinisikan secara sempit. Definisi secara sempit secara prinsip berbeda dengan praktek yang umumnya dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Secara garis besar definisi luas dan sempit merujuk pada tujuan dari kepentingan nasional tersebut. Definisi secara luas bermakna bahwa kepentingan nasional Amerika Serikat di dalamnya juga memuat instrumen kebaikan bersama bagi masyarakat dan perdamaian dunia. Nilai ini merupakan nilai yang sering kali menjadi rujukan definisi kepentingan nasional Amerika Serikat yang berakar pada nilai Eksepsionalisme dan Mesianisme. Tidak hanya itu, definisi luas kepentingan nasional Amerika Serikat juga berkaitan dengan upaya preservasi dan tata kelola hegemoni Amerika Serikat melalui kerangka Liberal Internasionalisme.

Berbeda dengan pendahulunya, Presiden Donald Trump dalam mendefinisikan kepentingan nasional dan mengusahakan kebijakan luar negerinya memilih untuk menggunakan definisi secara sempit. Langkah ini dilakukan karena memang sebagian negara memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga terdapat pula keterbatasan kepentingan nasional yang harus diusahakan. Akan tetapi, yang membuat Donald Trump berbeda ialah faktanya bahwa sebagai negara yang memiliki posisi unggul, sumber daya

---

<sup>28</sup> Agastya Wardhana & Vinsensio Marselino Arifin Dugis, 'Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump,' *Global Strategis*, vol. 13, no. 2, 2019, p. 141.

yang memadai serta adanya citra hegemoni, kepentingan nasional yang didefinisikan secara sempit tentunya akan dapat mengurangi keunggulan Amerika Serikat itu sendiri. Sempitnya definisi kepentingan nasional Amerika Serikat pada era Trump terlihat setidaknya dalam dua hal yaitu dari retorikanya (baik saat kampanye maupun pidato) serta dalam *National Security Strategy* Amerika Serikat tahun 2017.

Trump menyadari bahwa Amerika Serikat selama ini telah mengalami kejayaan. Namun, ketika ia terpilih Amerika Serikat sedang berada pada kondisi yang tidak optimal. Hal inilah yang kemudian digarisbawahi sebagai realisasi bahwa hegemoni Amerika Serikat sedang mengalami penurunan. Trump kemudian menterjemahkan kondisi tersebut dalam definisi kepentingan nasional yang sempit. Langkah ini menjadi relevan karena sebagai seorang pebisnis, Donald Trump memiliki insting bisnis yang kuat. Salah satu prinsip dasar dalam bisnis ialah memaksimalkan keuntungan. Menurut Trump, keuntungan paling besar yang bisa didapatkan dalam kondisi penurunan hegemoni salah satunya dengan mendefinisikan kepentingan nasional secara sempit yang tercermin dalam retorika *America First* serta dalam *National Security Strategy* Amerika Serikat tahun 2017. Selanjutnya, retorika *America First* ini juga kemudian diwujudkan dalam realisasi yang setidaknya dapat dilihat melalui adanya pengurangan komitmen internasional Amerika Serikat.

Konsekuensi dari kebijakan luar negeri *America First* ini ialah adanya pengurangan komitmen internasional Amerika Serikat yang terlihat dari dua

indikasi utama yaitu adanya perubahan dalam hubungan dengan aliansinya serta reorientasi militer Amerika Serikat di dunia. Untuk menunjukkan hal tersebut tulisan ini menggunakan beberapa contoh kasus seperti keputusan Trump untuk meninggalkan dan mengabaikan capaian kebijakan luar negeri pendahulunya seperti *Paris Climate Change (Paris Agreement)* dan *Trans Pacific Partnership (TPP)* hingga merubah peta aliansi Amerika Serikat dengan penekanan penting pada hubungan dengan Rusia dan Tiongkok. Tidak hanya itu, Trump juga mengindikasikan untuk mengubah pola aliansi militer yang diikuti oleh Amerika Serikat seperti yang ditunjukkan pada hubungannya dengan NATO serta dengan mitra keamanan kunci Amerika Serikat seperti Korea Selatan dan Jepang.<sup>29</sup>

Jika melihat literatur yang ditulis oleh Agastya dan Vinsensio, terdapat persamaan dan perbedaan substansi tulisan dan fokus kajian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada era kepemimpinan dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yakni di era Presiden Donald Trump. Dimana dalam tulisan ini, menjelaskan pola kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump melalui analisis *Grand Strategy* di tengah kondisi turunnya hegemoni Amerika Serikat.

Selain itu, terdapat beberapa perbedaan antara literatur ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pertama, literatur ini menggunakan konsep *Grand Strategy* dalam analisisnya, berbeda halnya dengan penelitian

---

<sup>29</sup> Agastya Wardhana & Vinsensio Marselino Arifin Dugis, 'Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump,' pp. 146-150.

yang dilakukan oleh penulis. Dimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Neo-Merkantilisme dan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*) dalam menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok di era pemerintahan Donald Trump khususnya dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok. Kedua, literatur ini juga menjelaskan tentang bagaimana pola kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump secara umum. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang lebih terfokus pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok khususnya dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok.

### **2.1.2 Literatur Kedua**

Sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Helsa Eka Putri dan Aspin Nur Arifin Rivai yang berjudul “**Donald Trump, America First, dan Deglobalisasi: Bagaimana Kelanjutannya?**”. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal *Insignia Journal of International Relations*, vol. 6, no. 1, tahun 2019. Secara umum, tulisan ini membahas mengenai terpilihnya Donald Trump yang di satu sisi menjadi primadona bagi basis politik ultra kanan, namun di sisi lain sebagai ancaman bagi pendukung globalisasi khususnya mereka (baik negara, kelompok pebisnis, dan masyarakat transnasional) yang khawatir atas menguatnya fenomena deglobalisasi. Fenomena Trump dan deglobalisasi menjadi perhatian dalam tulisan ini.

Literatur ini pada dasarnya menguji kembali relasi antar negara dan globalisasi dengan temuan bahwa terpilihnya Trump merupakan perluasan tren deglobalisasi yang sebelumnya berlangsung pasca krisis finansial global tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Trump yang cenderung tertutup dalam kerjasama ekonomi-politik merupakan strategi *Rebalancing* terhadap lawan utamanya yaitu Tiongkok. Tulisan ini kemudian memprediksi bahwa kebijakan ekonomi Trump dapat berkontribusi pada Amerika Serikat sebagai negara superior yang semakin defisit. Tiongkok lantas kemudian menjadi penyeimbang poros globalisasi (*Multilateral Approach*) disaat Amerika Serikat memilih proteksionis.<sup>30</sup>

Dengan setumpuk agenda proteksionisme baru, kelompok bisnis di Amerika Serikat ataupun mitra utama Amerika Serikat akan merasa kehilangan pelindung kekuatan di masa yang akan datang, sebab mereka selama ini mendapat jaminan dari bentuk kerja sama ekonomi sebelum kepemimpinan Trump. Bahkan, panggung ekonomi dunia lambat laun dibentuk oleh Tiongkok, meskipun tetap mempertahankan *Legacy System* yang ditanamkan oleh Amerika Serikat yaitu *Liberalism Rule Base*.

Kekuatan alternatif mulai terasa dengan terobosan ekonomi regional dan global yang dilakukan oleh Tiongkok. Uniknya, pertarungan Donald Trump dan Xi Jinping dapat dilihat melalui wacana *America First* berjibaku dengan *China Dream*. Misalnya, Tiongkok akan mendapatkan keuntungan di saat Amerika Serikat menempuh pendekatan bilateral. Hal ini didorong

---

<sup>30</sup> Helsa Eka Putri & Aspin Nur Arifin Rivai, 'Donald Trump, *America First*, dan Deglobalisasi: Bagaimana Kelanjutannya,' *Insignia Journal of International Relations*, vol. 6, no.1, April 2019, p. 30.



dengan upaya pembangunan jalur perdagangan (*Silk Road*) dengan visi *One Belt One Road* dan berdirinya *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang juga sebagai lawan tanding kekuatan Amerika Serikat dalam unit perbankan pembangunannya yaitu *International Monetary Fund* (IMF).<sup>31</sup>

Jika melihat literatur yang ditulis oleh Helsa dan Aspin, terdapat persamaan dan perbedaan substansi tulisan dan fokus kajian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada kebijakan Donald Trump yang cenderung tertutup dalam kerjasama ekonomi-politik yang merupakan strategi *Rebalancing* terhadap lawan utamanya yaitu Tiongkok. Hal ini berkaitan dengan penelitian penulis yang berfokus pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok. Kebijakan kenaikan tarif pajak ini merupakan bagian dari bentuk kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat di era Donald Trump.

Selain itu, terdapat perbedaan antara literatur ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni literatur ini lebih menekankan konsep Globalisasi dalam analisisnya, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Neo-Merkantilisme dan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*) dalam menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok di era pemerintahan Donald Trump khususnya dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok.

---

<sup>31</sup> Helsa Eka Putri & Aspin Nur Arifin Rivai, pp. 46-47.

### 2.1.3 Literatur Ketiga

Sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sahide berjudul **“Proteksionisme Trump dan Supremasi Politik Global Amerika”**. Penelitian ini diterbitkan dalam *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, vol. 17, no. 1, tahun 2021. Secara umum, tulisan ini membahas mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sudah menunjukkan arah kebijakan luar negeri *Inward-Looking* sejak awal masa kampanyenya menuju *White House*. Sebagai Presiden Amerika Serikat dengan latar belakang pengusaha, Trump melihat bahwa pasar bebas lebih banyak merugikan Amerika Serikat. Oleh karena itu, bagi Trump rakyat Amerika membutuhkan kehadiran negara untuk melindungi (proteksi) produk yang dihasilkan dalam menghadapi serbuan produk-produk impor. Pandangan *America First* dari Trump telah memunculkan gejolak politik global. Tidak lama setelah menjadi Presiden Amerika Serikat, Trump akhirnya menepati janjinya dengan mengeluarkan peraturan tarif bagi produk impor terutama yang datang dari Tiongkok dan Meksiko.

Hasil temuan dari penelitian Ahmad Sahide menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme yang diambil oleh Trump memicu terjadinya perang dagang, karena Tiongkok pun membalas kebijakan Trump dengan memasang tarif balasan untuk produk impor dari Amerika Serikat. Perang dagang pun menjadi tidak terhindarkan dan hal ini mempengaruhi gejolak ekonomi global. Dampak dari perang dagang yang dipicu oleh kebijakan *Inward-Looking* Trump ini ialah sekutu Amerika Serikat di Eropa yang

menganut sistem ekonomi liberal pun mulai tidak sejalan dengan langkah politik Trump, sehingga hal ini akan mengancam supremasi politik Amerika Serikat dalam kancah politik global.

Di satu sisi, Tiongkok kini sedang bangkit dan diprediksi bahwa Negeri Tirai Bambu ini akan menggantikan supremasi politik global Amerika Serikat. Keberanian Tiongkok dalam melayani Amerika Serikat di bawah pimpinan Trump dalam perang dagang mengindikasikan bahwa Amerika Serikat bukan lagi satu-satunya negara yang memegang kendali dunia sepenuhnya. Oleh karena itu, supremasi politik global Amerika Serikat dalam ancaman dan Tiongkok adalah negara yang menjadi ancaman nyata di depan mata.<sup>32</sup>

Jika melihat literatur yang ditulis oleh Ahmad Sahide, terdapat persamaan dan perbedaan substansi tulisan dan fokus kajian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada kebijakan proteksionisme yang diambil oleh Trump yang memicu terjadinya perang dagang, karena Tiongkok pun membalas kebijakan Trump dengan memasang tarif balasan untuk produk impor dari Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dimana hal ini merupakan bagian dari upaya penerapan kebijakan proteksionisme Amerika Serikat di era Donald Trump.

---

<sup>32</sup> Ahmad Sahide, 'Proteksionisme Trump dan Supremasi Politik Global Amerika', *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, vol. 17, no. 1, 2021, p. 1.

Selain itu, terdapat beberapa perbedaan antara literatur ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pertama, literatur ini menggunakan Teori Ekonomi Liberal dalam analisisnya, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Neo-Merkantilisme dan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*) dalam menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok di era pemerintahan Donald Trump khususnya dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok.

Kedua, literatur ini menjelaskan kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh Trump bukan hanya terfokus terhadap Tiongkok saja, melainkan juga terhadap negara lain seperti Meksiko. Selain itu, dalam literatur ini sedikit di singgung pula dampak dari kebijakan proteksionisme Trump yang juga berpengaruh terhadap beberapa negara seperti; Uni Eropa, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, dan Korea Selatan. Hal ini tentu berbeda dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam penelitian ini penulis lebih terfokus pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok khususnya dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok.

#### **2.1.4 Literatur Keempat**

Sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Sonia Agusti Parbo berjudul **“Negosiasi Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok”**. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal *Media Ekonomi*, vol. 28, no. 2, tahun 2020. Secara umum, tulisan ini membahas mengenai proses negosiasi perang

dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dibawah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki dampak yang besar pada ekonomi global. Selain itu, proses negosiasi perang dagang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari sengketa perang dagang tersebut. Negosiasi antara dua negara telah mencapai kesepakatan fase pertama yang menetapkan 'jeda' perang dagang.<sup>33</sup>

Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang merugikan kedua belah pihak. Kebijakan perang dagang yang digagas oleh Amerika Serikat sebagai langkah proteksi dan didasarkan pada faktor kepentingan Trump yang ingin menerapkan proteksionisme pada masa pemerintahannya serta menstabilkan neraca perdagangan bilateral dengan Tiongkok yang telah mengalami defisit. Fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi memberi imbasan terhadap pencapaian kesepakatan tahap pertama dalam mengatasi konflik perang dagang tersebut. Ditandatanganinya kesepakatan tersebut menjadi titik awal bagi kedua negara untuk menjalin kerjasama ekonomi yang lebih baik lagi kedepannya, meskipun memang kesepakatan tersebut tidak menjamin terhentinya perang tarif dari kedua negara.<sup>34</sup>

Jika melihat literatur yang ditulis oleh Sonia Agusti Parbo, terdapat persamaan dan perbedaan substansi tulisan dan fokus kajian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada dua

---

<sup>33</sup> Sonia Agusti Parbo, 'Negosiasi Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok,' *Media Ekonomi*, vol. 28, no. 2, Oktober 2020, p. 99

<sup>34</sup> Sonia Agusti Parbo, pp. 110-111.

negara yang menjadi fokus dalam penelitian yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Dimana, dalam literatur ini menjelaskan negosiasi berupa kesepakatan fase pertama antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam mengatasi konflik atau sengketa perdagangan yang nantinya diharapkan dapat menjadi awal kerjasama ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, terdapat beberapa perbedaan antara literatur ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pertama, literatur ini sesuai dengan judul penelitian lebih berfokus pada negosiasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang lebih berfokus pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok khususnya dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok.

Kedua, dalam analisis yang digunakan literatur ini menggunakan konsep Negosiasi, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Neo-Merkantilisme dan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*) dalam menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok di era pemerintahan Donald Trump dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok. Semua literatur ini telah membantu dalam memperkaya informasi dan pengetahuan serta berkontribusi besar dalam proses penelitian. Keempat literatur ini memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam upaya untuk membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## 2.2 Kerangka Teori

Dalam rangka untuk membantu menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian, maka dibutuhkan alat analisis untuk menjelaskan, memahami, dan mengungkapkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, untuk membantu memahami serta melihat alasan mengapa Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak atas produk yang berasal dari Tiongkok, penulis menggunakan sebuah kerangka teori untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Teori merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi sebuah bentuk pernyataan umum tertentu, sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.<sup>35</sup> Teori sebagai perangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar, sehingga dapat diamati dan dapat berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.<sup>36</sup>

Untuk membantu menjelaskan fenomena yang terjadi, penulis akan menggunakan dua kerangka teori yaitu dengan menggunakan Teori Neo-Merkantilisme dan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*). Melalui dua kerangka teori yang digunakan ini, fleksibilitas permasalahan dan pokok sumber acuan dapat di jabarkan melalui unit analisis terkait.

---

<sup>35</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, p. 186.

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, p. 61.

Penggunaan teori yang relevan dengan kajian yang dibahas tentu merupakan sebuah kewajiban sebagai upaya untuk menjaga kerangka ilmiah dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, menarik untuk dianalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok di era pemerintahan Donald Trump dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok melalui dua kerangka teori tersebut. Dibawah ini akan dijelaskan kedua kerangka teori tersebut sebagai perspektif dalam melihat fenomena yang terjadi.

### **2.2.1 Teori Neo-Merkantilisme**

Teori neo-merkantilisme merupakan turunan dari teori merkantilisme. Istilah “merkantilisme” berasal dari kata *Merchant* yang berarti “pedagang”. Menurut paham ini, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Dimana, negara harus lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Jadi, teori ini menekankan bahwa negara memiliki peran utama dalam sistem perdagangan internasional. Teori neo-merkantilisme sendiri merupakan suatu perkembangan dari teori merkantilisme yang saat ini banyak digunakan pada era perdagangan internasional yang bersifat liberal.

Menurut teori neo-merkantilisme persaingan ekonomi yang terjadi antar negara di dunia merupakan “*Zero Sum Game*” yaitu situasi dimana keuntungan yang didapatkan oleh salah satu pihak atas kekalahan dari pihak lain. Perekonomian internasional dalam pandangan neo-merkantilis dilihat sebagai area persaingan antar negara dari pada area kerjasama. Oleh karenanya, teori neo-merkantilisme ini pada dasarnya merupakan suatu



perkembangan dari teori merkantilisme, dimana teori neo-merkantilisme berupa suatu kebijakan yang menerapkan proteksi dengan tujuan untuk melindungi dan mendorong perekonomian nasionalnya.<sup>37</sup>

Kebijakan merkantilisme pada saat ini masih dijalankan oleh banyak negara, akan tetapi dalam bentuk “neo-merkantilisme” yaitu suatu kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan menggunakan kebijakan *Tariff Barrier* (TB) dan *Non-Tariff Barrier* (NTB). Biasanya kebijakan *Tariff Barrier* dilakukan dengan menggunakan *Countervailing Duty*, bea anti dumping, dan biaya tambahan (*Surcharge*). Sedangkan, *Non-Tariff Barrier* biasanya dalam bentuk seperti larangan, sistem kouta, peraturan kesehatan atau karantina, dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Kemunculan doktrin neo-merkantilisme mulai terlihat saat bangkitnya kekuatan ekonomi baru Amerika Serikat dan Jerman pada abad ke-19. Dorongan utamanya ialah untuk menjelaskan peran sentral pembangunan dan intervensi negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bagi industri yang tertinggal. Dikarenakan kebangkitan nasionalisme dalam pemikiran dan praktek politik, era neo-merkantilisme ini sering pula disebut sebagai era nasionalisme ekonomi.<sup>39</sup>

Menurut Mansbach, gagasan utama dari teori neo-merkantilisme sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan teori merkantilisme. Neo-merkantilisme memiliki asumsi dasar yang sama dengan merkantilisme,

---

<sup>37</sup> Inayatul Bariah, dkk, ‘Strategi Kebijakan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perang Dagang AS-China,’ *Jurnal Humaniora*, vol. 4, no. 2, Oktober 2020, p. 157.

<sup>38</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Internasional*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, p. 27.

<sup>39</sup> R. Falkner, *International Political Economy*, The London School of Economics and Political Science, London, 2011, p. 22.

namun agar lebih relevan dengan keadaan zaman dimana sudah ada istilah negara bangsa yang berdaulat, maka neo-merkantilisme memiliki perbedaan dalam hal praktikal. Neo-merkantilisme atau sering pula disebut dengan istilah nasionalisme ekonomi sering menerapkan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan, seperti misalnya kampanye yang mendorong untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, bukan hanya masyarakat yang ditekankan untuk melakukan hal tersebut, tetapi pemerintah juga dituntut untuk membuat aturan-aturan sebagai faktor pendorong bagi masyarakat untuk membeli produk hasil industri dalam negeri serta pemerintah juga dituntut untuk membuat aturan standarisasi, subsidi, bebas pajak, dan kuota untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan industri negara lain.<sup>40</sup>

Menurut Friedrich List, ada beberapa spesifikasi kebijakan yang dilakukan oleh teori neo-merkantilisme diantaranya sebagai berikut:<sup>41</sup>

a) **Proteksionisme**, yaitu keadaan pasar bebas yang tidak dapat dikendalikan memberikan keuntungan bagi kepentingan negara maju, sedangkan negara yang kurang maju kalah dalam persaingan terbuka terhadap industri unggulan. Oleh karena itu, negara harus campur tangan dalam perdagangan dengan mendirikan halangan dan hambatan untuk melindungi industri dalam negeri.

b) **Promosi Industri Berkembang**, tujuan utama proteksionisme ialah untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Pada tahap

---

<sup>40</sup> Richard W. Mansbach & Kristen L. Taylor, *Introduction to Global Politics*, London and New York: Routledge, 2008, p. 610.

<sup>41</sup> R. Falkner, pp. 22-23.

awal perkembangan industri yang masih tumbuh ini memungkinkan mereka untuk membangun diri mereka sendiri, sehingga mampu memiliki daya saing internasional. Negara harus melindungi industri dalam negeri dari pesaing asing sampai mereka memiliki cukup modal dan teknologi untuk bertahan di kompetisi global.

c) **Pendidikan**, Friedrich List secara khusus menekankan pentingnya sebuah strategi pendidikan nasional untuk mengembangkan kapasitas individu masyarakat. Peran negara adalah menyediakan infrastruktur dasar dan pembelajaran demi kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

d) **Infrastruktur**, yaitu keadaan dimana negara juga harus memberikan dasar infrastruktur untuk industri dan perdagangan sehingga dapat membantu mengatasi kegagalan pasar.

Seperti halnya merkantilisme klasik, terdapat banyak variasi doktrin dan kebijakan yang diusulkan oleh pendekatan neo-merkantilisme, namun apa yang menyatukan mereka ialah keyakinan bahwa negara memainkan peran sentral dalam mengarahkan kegiatan ekonomi demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Friedrich List menekankan pula bahwa negara harus mampu untuk memupuk kekuatan produktif suatu bangsa dengan menjalankan usulan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu; proteksionisme, promosi industri berkembang, pengembangan pendidikan, dan juga infrastuktur.

Namun, dalam konteks penelitian ini penulis akan lebih terfokus pada salah satu kebijakan yang dilakukan oleh teori neo-merkantilisme yaitu proteksionisme khususnya dalam kebijakan *Tariff Barrier* (TB). Berkaitan dengan penelitian ini, asumsi dasar dari teori neo-merkantilisme sangat relevan untuk dapat menggambarkan peristiwa atau fenomena kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat di era Donald Trump. Selain itu, pendekatan ini juga bisa menjelaskan kepentingan yang berusaha ingin dicapai oleh Amerika Serikat melalui kebijakannya yang menaikkan tarif pajak impor.

### **2.2.2 Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*)**

Salah satu kajian dalam hubungan internasional ialah terkait masalah politik internasional. Dalam politik internasional, kajian difokuskan pada hubungan yang melibatkan *State Actor* dan *Non-State Actor* melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor tersebut sebagai representasi kepentingan masing-masing dalam interaksi satu sama lain. Hubungan interaksi antar aktor tersebut (khususnya oleh negara), inilah yang kemudian disebut sebagai politik luar negeri.<sup>42</sup>

Politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.<sup>43</sup> Politik luar negeri sebagai sebuah teori dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu

---

<sup>42</sup> James N. Rosenau, *The Scientific Study of Foreign Policy*, Nichols Publishing Company, New York, 1980, p. 15.

<sup>43</sup> Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, p. 47.

negara tentu akan berfokus pada seorang aktor atau pembuat keputusan. Sederhananya, politik luar negeri ini akan mempelajari proses, dampak, sebab, atau hasil pembuatan keputusan kebijakan luar negeri lewat perbandingan dan contoh studi kasus.<sup>44</sup>

Politik luar negeri sendiri bersifat *Intangible* (tidak terlihat), karena dianggap sebagai sebuah pedoman, nilai, keyakinan yang dibentuk oleh budaya dan cara pandang hidup suatu negara bangsa. Implementasi dari politik luar negeri sering pula disebut sebagai kebijakan luar negeri. Sehingga, dapat dikatakan juga bahwa politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional suatu negara.<sup>45</sup>

Politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang dipimpinnya, meskipun memang kepentingan nasional suatu negara pada saat itu sangat ditentukan oleh siapa yang memimpin (berkuasa) pada waktu itu. Oleh karenanya, berkaitan dengan penelitian ini sebagai perspektif dalam melihat fenomena yang terjadi, penulis akan menggunakan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*) dari Richard Snyder, dkk.

---

<sup>44</sup> Yanyan Ahmad Yani & Mair, 'Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praktis,' *Pustaka UNPAD* (daring), Juni 2010, <[http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/06/perspektif\\_perspektif\\_politik\\_luar\\_negeri.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf)>, diakses pada 1 September 2021.

<sup>45</sup> Jack C. Plano & Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, edisi Bahasa Indonesia *Kamus Hubungan Internasional*, diterjemahkan oleh Wawan Juanda, Abardin, Bandung, 1999, p. 5.

Salah satu pengkaji paling awal teori politik luar negeri ialah Richard Snyder, H.W. Bruck, dan Burton Sapin yang diterbitkan pada tahun 1962. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah salah satu perintis atau bagian dari generasi pertama analisis politik luar negeri yang mencoba untuk membuka kotak hitam *State* yang dalam perspektif realisme merupakan aktor utama yang memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara. Kajian mereka ini sejalan dengan kajian Sprout dalam pengertiannya mereka juga menekankan pengaruh faktor lingkungan yang mereka sebut sebagai *Setting* dalam pembuatan keputusan politik luar negeri. *Setting* ini mempengaruhi persepsi, *Judgment* (pertimbangan), sikap, dan tujuan para pembuat keputusan dalam merumuskan keputusan politik luar negeri.<sup>46</sup>

Teori politik luar negeri yang dirumuskan dalam model pembuatan keputusan (*The Decision-Making Model*) ini menegaskan bahwa perilaku politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor dari internal dan eksternal. Asumsi dasar dari teori atau perspektif ini ialah bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang di buat oleh unit-unit politik domestik yang mana para pemimpin negara, baik individu maupun kelompok bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, faktor-faktor penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri tersebut ialah:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Abubakar Eby Hara, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2011, p. 84.

<sup>47</sup> Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, p. 65.

1. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma yang dianut), yaitu merupakan suatu dorongan untuk menggunakan kesempatan yang dimiliki dan menekankan mengapa suatu keputusan tersebut diambil.
2. Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi), yaitu sumber-sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan politik dan kebijakan luar negeri.
3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri, yaitu menekankan tentang persepsi mengenai lingkungan internasional yang mempengaruhi kebijakan tersebut.
4. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*Occasion for Decision*) yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam keadaan krisis atau tidak.

Oleh karena itu, dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri ini sangatlah kompleks, dimana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan harus dipertimbangkan. Akan tetapi, dalam hal ini sangatlah besar pengaruh yang berasal dari faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal terkait kondisi yang terjadi di dalam negara itu sendiri dan faktor eksternal berasal dari luar teritorial wilayah suatu negara merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan, termasuk persepsi dari para aktor terkait unit internasional lainnya. Kedua faktor ini akan saling mempengaruhi satu sama lain dan akhirnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh unit politik domestik suatu negara.

Sebuah kebijakan luar negeri dapat dianalisa melalui tindakan, pernyataan, sikap, dan persepsi aktor (*Decision Makers*). Apabila dikaitkan dengan studi kasus dalam penelitian ini, berdasarkan pemahaman tentang tindakan, pernyataan, dan sikap aktor yakni Donald Trump yang berperan sebagai pemimpin Amerika Serikat sekaligus sebagai komponen aktor dalam *Decision Making Process* memiliki posisi sentral dalam setiap analisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat, termasuk dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok. Seorang *Decision Makers* tentunya memiliki berbagai faktor pertimbangan yang kompleks dan memiliki relevansi dengan situasi internasional yang sedang terjadi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor-faktor pertimbangan inilah yang kemudian disebut sebagai *Setting* oleh Snyder.<sup>48</sup>

*Setting* merupakan seperangkat pengelompokan faktor-faktor yang secara potensial relevan dan berpengaruh terhadap kondisi-kondisi yang sangat memungkinkan mempengaruhi tindakan sebuah negara.<sup>49</sup> *Setting* ini meliputi dua bagian, yakni *Internal Setting* dan *External Setting*. Selain itu, Richard Snyder juga menggunakan *Social Structure and Behaviour* untuk melengkapi analisis dalam teorinya. Variabel *Setting* ini dapat digambarkan pada Tabel Snyder *Setting* di bawah ini:

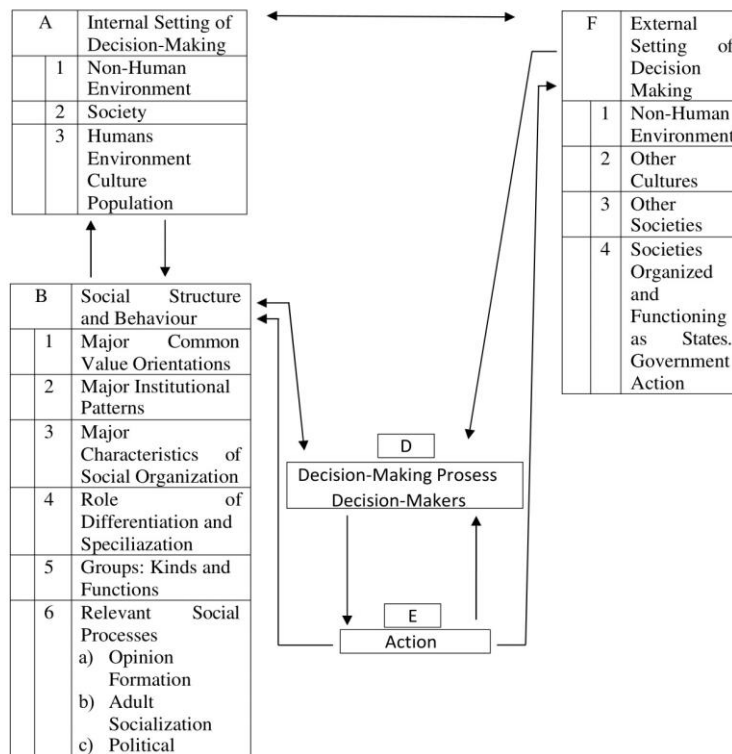
---

<sup>48</sup> Snyder, R.C. Bruck, & H.W. Sapin, *The Decision Making Approach to the Study of International Politics*, The Free Press, New York, 1969, p. 202.

<sup>49</sup> Abubakar Eby Hara, p. 88.



**Tabel 2.1 Tabel Snyder Setting**



Sumber: Abubakar Eby Hara, 2011, p. 87.

Dari tabel ini, Richard Snyder ingin menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal (perilaku negara), dalam hal ini persoalan internal yang terjadi di dalam suatu negara atau keadaan domestiknya serta faktor eksternal yang terjadi di luar teritorial wilayah suatu negara, yaitu menyangkut lingkungan internasionalnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan lebih lengkap dari Tabel Snyder *Setting*:

### **1. Internal Setting of Decision Making**

Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara tentu tidak terlepas dari variabel utamanya yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang datang dari dalam atau domestik negara itu

sendiri seperti keadaan dan situasi lingkungan domestik negara, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. *Setting* ini memiliki 3 unsur atau variabel yaitu: *Non-Human Environment, Society,* dan *Human Environment, Culture, and Population*. Berikut ini penjelasan variabel-variabel dalam *Internal Setting of Decision Making*.<sup>50</sup>

- a. ***Non-Human Environment***, merupakan faktor lingkungan yang tidak berkaitan dengan manusia, seperti; budaya, letak geografis, sumber daya atau kondisi perekonomian suatu negara.
- b. ***Society***, merupakan kondisi karakter masyarakat dari suatu negara tentang seberapa kritis atau partisipatif terhadap kebijakan pemerintah, sehingga dapat berpengaruh terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah.
- c. ***Human Environment, Culture, and Population***, yaitu terkait dengan lingkungan manusia, kebudayaan, dan populasi suatu negara dimana *Decision Makers* memiliki nilai-nilai budaya yang tumbuh sejak ia tinggal di negara tersebut.

### ***Social Structure and Behavior***

*Social Structure and Behavior* dapat diartikan pada bagaimana struktur dan perilaku sosial dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan oleh suatu negara. Dalam hal ini struktur dan perilaku sosial tersebut dapat secara langsung mempengaruhi proses pembuatan kebijakan,

---

<sup>50</sup> Mirna Ardiyanti Pratama, 'Keputusan Amerika Serikat Mencabut Pembatasan Ekspor Minyak Mentah Tahun 2015,' Jurnal Skripsi Digital Repository Universitas Jember (daring), 2017, <<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/82740/Mirna%20Ardiyanti%20Pratama.pdf?sequence=1>>, diakses pada 1 September 2021.

para pembuat kebijakan, ataupun bisa mempengaruhi suatu kebijakan secara tidak langsung melalui *Internal Setting* terlebih dahulu. Dalam menggunakan *Social Structure and Behavior* untuk melakukan analisisnya Richard Snyder, dkk setidaknya menggunakan beberapa faktor yang lebih lanjut agar analisis yang dihasilkan bisa menjadi lebih spesifik diantaranya: *Major Common Orientation Value*, *Major Institutional Pattern*, *Major Characteristics of Social Organization*, *Role Differentiation and Specialization*, *Groups: Kinds and Function*, dan *Relevant Social Process: Opinion Formation, Adult Socialization, and Political*. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan berikut ini:<sup>51</sup>

- a. ***Major Common Value Orientation***, merupakan nilai-nilai utama yang menjadi orientasi dalam masyarakat suatu negara dan dapat berpengaruh dalam keputusan pemerintah.
- b. ***Major Institutional Patterns***, merupakan nilai-nilai yang dianut dalam sistem pemerintahan di suatu negara atau pola-pola lembaga utama seperti partai politik yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah.
- c. ***Major Characteristic of Social Organization***, merupakan karakter nilai yang melekat pada banyak organisasi di suatu negara dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

---

<sup>51</sup> Mirna Ardiyanti Pratama, 'Keputusan Amerika Serikat Mencabut Pembatasan Ekspor Minyak Mentah Tahun 2015,' Jurnal Skripsi Digital Repository Universitas Jember (daring), 2017, <<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/82740/Mirna%20Ardiyanti%20Pratama.pdf?sequence=1>>, diakses pada 1 September 2021.

- d. ***Role of Differentiation and Specialization***, merupakan nilai yang berkembang di tengah masyarakat dan menyebabkan adanya spesialisasi peran.
- e. ***Group: Kinds and Function***, merupakan kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki peran dan pengaruh dalam sebuah kebijakan luar negeri.
- f. ***Relevant Social Process: Opinion Formation, Adult Socialization, and Political***, merupakan bagaimana proses sosial yang relevan (seperti; pembentukan opini, sosialisasi, dan politik) dapat berpengaruh kepada kebijakan yang akan dihasilkan oleh suatu negara. Lebih jelasnya akan dijelaskan dibawah ini:
- ***Opinion Formation***, merupakan opini yang terbentuk di tengah masyarakat dan menjadi isu yang kemudian menjadi perhatian bagi pemerintah.
  - ***Adult Socialization***, merupakan kondisi dimana dalam membuat keputusan terdapat aspek sosialisasi kepada masyarakat atau orang dewasa atau orang yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik suatu negara.
  - ***Political***, merupakan keputusan yang akan diambil berdasarkan kepentingan nasional melalui proses politik yang dilakukan oleh *Decision Makers* dan faktor ini erat kaitannya dengan kepentingan nasional (*National Interest*) dikarenakan kepentingan nasional merupakan hasil dari proses politik.

## 2. *External Setting of Decision Making*

Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan atau kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor yang datang dari luar wilayah suatu negara atau kondisi di luar teritorial wilayah suatu negara seperti situasi politik internasional, aliansi internasional, dan konflik internasional.<sup>52</sup> *External Setting* ini memiliki 4 unsur atau variabel yaitu: *Non-Human Environment*, *Other Cultures*, *Other Societies*, dan *Societies Organized and Functioning as States and Government Action*.<sup>53</sup>

- a. *Non-Human Environment*, merupakan faktor lingkungan non-manusia yang dapat mempengaruhi pembuat kebijakan yang berasal dari luar batas wilayah suatu negara berupa letak geografis atau kondisi ekonomi suatu negara.
- b. *Other Cultures*, merupakan kebudayaan negara lain yang turut serta dalam mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Dikarenakan nilai-nilai budaya yang ada didunia ini saling mempengaruhi satu sama lain.
- c. *Other Societies*, merupakan faktor berupa opini kelompok masyarakat yang berada di luar negeri dan dapat menjadi pertimbangan *Decision Makers* dalam merumuskan kebijakan. Pendapat masyarakat internasional berpengaruh terhadap pembentukan citra suatu negara.

---

<sup>52</sup> Snyder, R.C. Bruck, & H.W. Sapin, p. 202.

<sup>53</sup> Mirna Ardiyanti Pratama, 'Keputusan Amerika Serikat Mencabut Pembatasan Ekspor Minyak Mentah Tahun 2015,' Jurnal Skripsi Digital Repository Universitas Jember (daring), 2017, <<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/82740/Mirna%20Ardiyanti%20Pratama.pdf?sequence=1>>, diakses pada 1 September 2021.

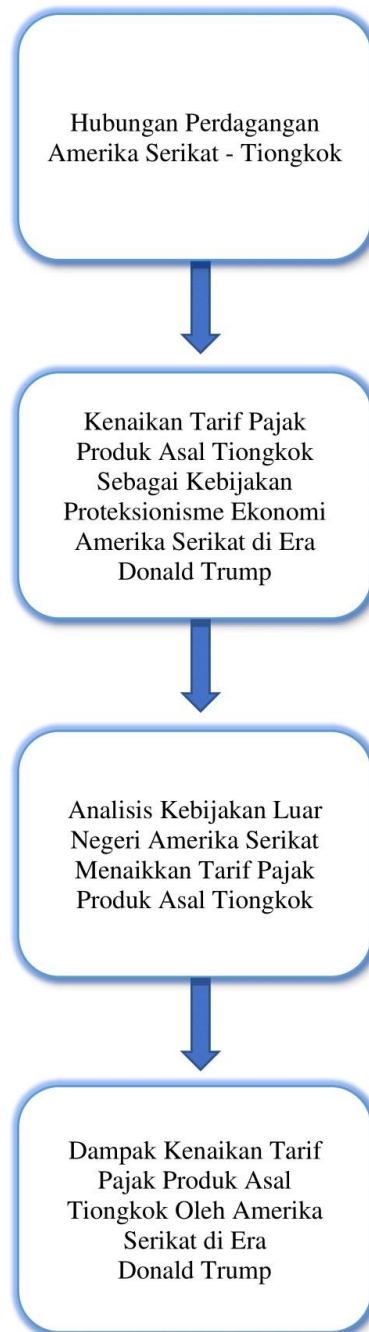
**d. *Societies Organized and Functioning as States and Government***

*Action*, merupakan tindakan suatu negara terhadap negara lain dimana tindakan tersebut menjadi bahan pertimbangan negara lain.

Dengan demikian, teori pembuatan keputusan kebijakan luar negeri ini sangatlah kompleks. Akan tetapi, dapat ditarik dan diwakili dengan dua variabel yang berpengaruh sangat kuat sekali yaitu faktor internal yang terjadi di dalam negeri suatu negara dan faktor eksternal yang terjadi di luar teritorial wilayah suatu negara merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pembuatan keputusan.

### 2.3 Alur Pemikiran Penelitian

Tabel 2.2 Alur Pemikiran Penelitian



Sumber: Diolah oleh Peneliti

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode menempati posisi yang sangat penting dan sentral dalam sebuah proses penelitian. Berhasil atau tidaknya tujuan penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan. Melalui metode penelitian, kita ingin menunjukkan bahwa penelitian kita dilakukan dengan langkah-langkah yang benar dan dapat dipercaya. Jika metode penelitiannya tidak terumuskan dengan jelas dan detail maka validitas dan realibilitas hasil penelitian kita wajar apabila di ragukan oleh orang lain.<sup>54</sup> Metode penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah mutlak diperlukan agar alur penulisan karya benar-benar sistematis, tidak simpang siur, sehingga alur permasalahan dan penyelesaian masalahnya dapat ditulis dengan baik dan benar. Dalam bab metodologi penelitian akan dijelaskan terkait dengan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan atau disebut juga dengan paradigma penelitian merupakan cara pandang terhadap sebuah objek atau permasalahan. Pendekatan juga dimaknai sebagai cara untuk mengamati atau memahami dunia sosial. Pendekatan penelitian dapat juga diartikan sebagai percobaan untuk mengidentifikasi dan menguji data empiris, dimana pendekatan penelitian ini berkaitan erat dengan pandangan fundamental tentang apa yang menjadi

---

<sup>54</sup> Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, p. 25.



pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan.<sup>55</sup> Pendekatan penelitian bertujuan untuk membantu merumuskan apa yang harus dipelajari, pertanyaan-pertanyaan apa yang semestinya dijawab, bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Jadi, pendekatan atau paradigma dalam penelitian ini adalah satu kesatuan konsensus yang terluas dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan membantu membedakan antara instrumen-instrumen ilmuwan satu dengan ilmuwan yang lain, paradigma menggolongkan, mendefinisikan, dan menghubungkan antara teori-teori, metode-metode, serta instrumen-instrumen yang terdapat di dalamnya.

Kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan persepsi orang secara individual maupun kelompok. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan di generalisasi.<sup>56</sup> Selain itu, menurut James Mahoney dan Gary Goertz ia menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengobservasi kasus dan memperhatikan proses sebab-akibatnya. Proses sebab-akibat didapatkan

---

<sup>55</sup> A. D. Moroe, *Essentials of Political Research*, Westview Press, United States of America, 2000, p.2.

<sup>56</sup> Sandu Siyoto & Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, p. 27.

melalui *Within-Case Analysis*.<sup>57</sup> Berbeda dengan penelitian kuantitatif, instrumen dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti harus mampu berpikir dan memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan topik yang diteliti.<sup>58</sup>

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian jenis ini jauh lebih dalam, tajam, dan detail jika dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain. Penelitian eksplanatif menjelaskan hal-hal di balik fenomena atau sesuatu yang terjadi, sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupa deskripsi suatu kejadian saja, melainkan juga merupakan upaya untuk melakukan uji terhadap suatu teori.<sup>59</sup> Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dimana dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk mengetahui alasan-alasan atau faktor-faktor penyebab mengapa Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak atas produk yang berasal dari Tiongkok. Dalam analisisnya, penulis akan menggunakan dua kerangka teori yaitu Teori Neo-Merkantilisme dan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*) dalam membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>57</sup> Sonia Agusti Parbo, p. 104.

<sup>58</sup> Lalu Putrawandi Karjaya, Rezki Satris, & Suspiati, 'Greenpeace, Corporations and Deforestation Crimes: A Case Study of Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) in Indonesia,' *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 8, no. 2, Oktober – Maret 2020, p. 206.

<sup>59</sup> Alfian Adi Saputra, *Tujuan Penelitian: Eksploratif, Deskriptif, Eksplanatif, dan Evaluatif* [video], <<https://www.youtube.com/watch?v=TYXnkyjfsJo>>, diakses pada 28 September 2021.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam proses mendapatkan dan mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data sendiri merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.<sup>60</sup> Bila dilihat dari sumbernya data sendiri terbagi menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diartikan sebagai pengumpulan data secara langsung dari pihak atau lingkungan pertama dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan, data sekunder merupakan proses pengumpulan data dari data yang sudah ada atau dari dokumen tertentu sehingga pengumpulan data sekunder disebut juga sebagai dokumentasi.<sup>61</sup> Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari dokumen-dokumen tertentu baik dari buku, jurnal, surat kabar, koran, artikel online, dan sebagainya.<sup>62</sup> Pengumpulan data sekunder berkaitan erat dengan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2018, p. 224.

<sup>61</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, pp. 123-124.

<sup>62</sup> Lalu Putrawandi Karjaya, 'Upaya Uni Eropa (UE) Dalam Menangani Krisis Pengungsi di Kawasan Uni Eropa,' *Journal of Innovation Research and Knowledge*, vol. 2, no. 5, Oktober 2022, p. 2290.

<sup>63</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, p. 28.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis sendiri menggunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka (*Library Research*) dalam memperoleh data-data empiris selama proses penelitian. Studi Pustaka merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan dan sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya.<sup>64</sup> Disamping itu juga, penulis menggunakan Metode Berbasis Internet sebagai alternatif tambahan bagi informasi yang tidak ditemukan dalam literatur. Oleh karena itu, melalui Studi Pustaka dan Metode Berbasis Internet peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan masalah penelitian.

### **3.3 Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>65</sup>

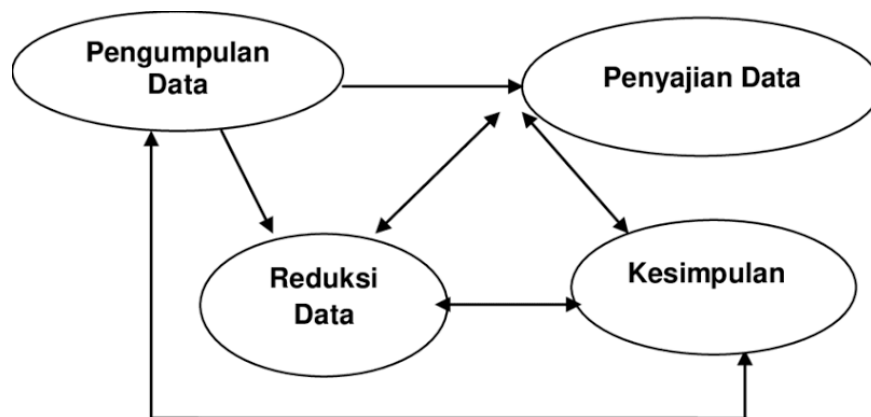
Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis data dari Miles

---

<sup>64</sup> Samhis Setiawan, 'Studi Kepustakaan: Tujuan, Sumber, Metode, Jenis,' *Gurupendidikan.com* (daring), 22 September 2011, <<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>>, diakses pada 29 September 2021.

<sup>65</sup> Sugiyono, p. 244.

dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data terdiri dari: *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*.<sup>66</sup> Berikut ini merupakan gambar model interaktif dalam analisis data beserta penjelasannya.<sup>67</sup>



**Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data**

Sumber: [https://www.researchgate.net/figure/Gambar-31-Langkah-Langkah-Analisis-Miles-dan-Huberman\\_fig1\\_332091884](https://www.researchgate.net/figure/Gambar-31-Langkah-Langkah-Analisis-Miles-dan-Huberman_fig1_332091884), diakses pada 30 September 2021.

**a) *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif ialah terletak pada

<sup>66</sup> Sugiyono, p. 246.

<sup>67</sup> Sugiyono, pp. 247-253.

temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak kenal, dan belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian oleh peneliti dalam melakukan reduksi data.

**b) *Data Display* (Penyajian Data)**

Setelah data kita reduksi, maka langkah selanjutnya ialah penyajian data. Melalui penyajian data ini, maka data akan terorganisasikan tersusun pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

**c) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)**

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kasual, hipotesis atau teori.

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Tiongkok di Era Pemerintahan Donald Trump (Studi Kasus: Kenaikan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok). Sesuai dengan metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti; buku, jurnal, artikel website, video, dan lain sebagainya. Setelah nantinya data terkumpul, maka data tersebut akan direduksi atau dipilah. Dalam hal ini data yang kurang relevan akan diabaikan atau disingkirkan. Adapun jika data dirasa kurang mencukupi, maka akan dilakukan proses pencarian data kembali.

Setelah nantinya data dipilah, maka data akan disajikan dengan menggunakan teori sebagai perspektif atau pisau analisis. Hasil penyajian data ini akan disampaikan pada Bab IV (Hasil dan Pembahasan) dalam penulisan skripsi. Data yang sudah dikaji dan disaji, terakhir akan dilakukan proses penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Inilah gambaran metode analisis data dari Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, akan dipaparkan hasil dan pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang telah disusun oleh penulis sebelumnya, yakni terkait dengan “*Mengapa Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump Mengeluarkan Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Atas Produk yang Berasal dari Tiongkok*”. Bagian keempat dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam empat sub-bab yang tersistematika, diantaranya sebagai berikut: Pertama, akan dibahas mengenai hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua, kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok sebagai kebijakan proteksionisme ekonomi Amerika Serikat di era Donald Trump. Ketiga, analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat menaikkan tarif pajak produk asal Tiongkok. Keempat, dampak kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat di era Donald Trump.

Selanjutnya, dalam menganalisis penelitian ini penulis akan menggunakan dua kerangka teori sebagai perspektif untuk melihat fenomena yang terjadi. Bagaimana proses terbentuknya kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok khususnya dalam kasus kenaikan tarif pajak produk asal Tiongkok. Pertama, penulis menggunakan Teori Neo-Merkantilisme. Kedua, penulis juga menggunakan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*). Melalui dua kerangka teori ini nantinya akan dikombinasikan oleh penulis dalam rangka untuk membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.



#### 4.1 Hubungan Perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok

Hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sudah berlangsung sejak lama dimulai pada tahun 1970-an, ketika pada saat itu Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengunjungi Tiongkok dan menyatakan akan melakukan dialog terbuka dengan negara tersebut serta bermaksud untuk membawanya ke dalam komunitas dunia internasional.<sup>68</sup> Presiden Nixon pada saat itu mengatakan bahwa ia akan melakukan tindakan untuk menghapus berbagai hambatan yang nantinya terjadi dalam hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini didasarkan atas kenyakinannya bahwa adanya potensi dalam perekonomian Tiongkok yang menunjukkan perkembangan yang pesat dan akan membawa keuntungan bagi Amerika Serikat di masa yang akan datang. Pendekatan ini juga dilakukan atas dasar pengaruh geopolitik Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur serta statusnya yang merupakan negara hegemon.<sup>69</sup>

Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan dua negara yang memiliki catatan sejarah yang panjang dalam hubungan internasional serta memiliki dinamika ketegangan yang fluktuatif. Interaksi perdagangan kedua negara saat ini sudah memasuki usia lebih dari empat dekade serta semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1978 ketika reformasi ekonomi Tiongkok baru dimulai, total nilai perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok hanya mencapai US\$ 1 miliar dan berada

---

<sup>68</sup> Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, Little Brown Company, Boston, 1977, pp. 24-25.

<sup>69</sup> Bangkit A. Wiryawan, *Zona Ekonomi Khusus: Strategi China Memanfaatkan Modal Global*, CCS, 2008, p. 38.

pada urutan ke-32 *Export Market* terbesar Amerika Serikat dan urutan ke-57 terbesar dari sumber impor. Hal ini sungguh merupakan posisi yang tidak memberikan pengaruh yang besar dalam neraca perdagangan kedua negara karena hanya ada sedikit interaksi. Semakin sedikit interaksi antar kedua negara, maka semakin sedikit pula konflik yang terjadi.<sup>70</sup>

Sepanjang sejarah, hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok ditandai dengan naik turunnya hubungan kedua negara yang terkadang dalam kondisi baik, namun tak jarang pula dalam kondisi yang buruk. Dalam realitanya kerjasama sering terjadi dalam hubungan kedua negara, namun tak jarang pula terjadi ketegangan diantara keduanya, seperti yang pernah terjadi sebelumnya dimasa Presiden George Bush dimana di awal masa jabatannya sebelum tragedi *World Trade Center* (WTC) tahun 2001, ia mengubah pola pendekatan hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok dari *Strategic Partnership Approach* menjadi *Strategic Competition Approach* yang bersifat konfrontatif. Ketegangan ini sedikit mereda sejak terjadinya tragedi *World Trade Center* (WTC), dimana Amerika Serikat merubah prioritas politik internasionalnya untuk lebih memerangi terorisme global. Kesibukan Amerika Serikat dalam menangani masalah terorisme menjadikannya tidak lagi punya cukup waktu untuk berurusan dengan Tiongkok. Kesempatan ini pun dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Tiongkok untuk semakin memperluas pengaruhnya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ernawati Batubara, 'Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Republik Rakyat Cina,' *JOM FISIP*, vol. 6, no. 2, Juli – Desember 2019, p. 4.

<sup>71</sup> Ani Soetjipto, 'Memaknai Hubungan Cina - Amerika Kontemporer: Implikasinya Untuk Kajian Politik Internasional,' *Global & Strategis*, vol. 8, no. 1, Januari – Juni 2014, p. 86.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengalami beberapa transformasi dalam skala yang berbeda, keduanya dipertemukan melalui kerjasama strategis yang lebih berkonsentrasi pada isu-isu bilateral. Kerjasama antara Amerika Serikat dan Tiongkok mulai kembali seiring dengan “Kebangkitan Tiongkok” pada tahun 1990-2010 ketika pertumbuhan ekonomi Tiongkok per tahun mencapai 8-9%. Pada Oktober tahun 2000, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menandatangani *US-China Relations Act* yang bertujuan untuk membantu Tiongkok agar dapat melakukan perdagangan secara permanen dengan Amerika Serikat serta untuk meningkatkan kerjasama diantara kedua negara.<sup>72</sup> Alasan lain Amerika Serikat melakukan kerjasama ini ialah untuk menyeimbangkan keadaan ekonomi global dan juga menghilangkan hambatan dagang serta investasi diantara kedua negara. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga berusaha untuk mendorong Tiongkok agar supaya dapat membuka pasar dan peluang investasi yang baru bagi bisnis internasional.

Meningkatnya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada akhirnya membuat Tiongkok bersedia untuk bergabung dengan WTO (*World Trade Organization*) pada Desember 2001.<sup>73</sup> Sejak bergabungnya Tiongkok dengan WTO, hal ini semakin mempererat hubungan dagang diantara kedua negara. Tercatat persentase ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok meningkat yakni berjumlah 81% dalam tiga

---

<sup>72</sup> Walter S. Jones, p. 228.

<sup>73</sup> Josephus Primus, ‘Masuk WTO, China Perkasa,’ *Kompas.com* (daring), 11 November 2011, <<https://ekonomi.kompas.com/read/2011/11/11/16114165/~Internasional~News>>, diakses pada 29 Januari 2022.

tahun pertama keanggotaan Tiongkok di WTO dibandingkan dengan tiga tahun terakhir sebelum Tiongkok bergabung yang hanya berjumlah 34%. Namun, disisi lain impor Amerika Serikat dari Tiongkok justru semakin meningkat yakni berjumlah 92% dimana sebelumnya hanya berjumlah 46%. Hingga pada tahun 2004, total nilai perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok mencapai US\$ 600 triliun.<sup>74</sup>

Perekonomian Tiongkok dapat tumbuh dan berkembang seperti saat ini salah satunya ialah dikarenakan keuntungan yang didapatkannya melalui kerjasama dengan Amerika Serikat serta bergabungnya Tiongkok ke dalam institusi-institusi internasional seperti; *World Trade Organization* (WTO), *World Bank*, dan *International Monetary Fund* (IMF). IMF juga mengumumkan bahwa Tiongkok telah menjadi negara terbesar dalam *Purchasing Power Parity* mengalahkan Amerika Serikat.<sup>75</sup> Meningkatnya perekonomian Tiongkok memberikan tantangan tersendiri terhadap kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama sekali dalam kegiatan ekspor impornya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan permintaan akan barang-barang impor dari Tiongkok oleh masyarakat di Amerika Serikat.

Dibayarnya tenaga kerja masyarakat Tiongkok dengan upah buruh yang rendah, tidak memungkinkan mereka untuk membeli barang produksi

---

<sup>74</sup> Frank Sampson Jannuzi, 'Carla A. Hills, & Dennis C. Blair, 'U.S.-China Relations: An Affirmative Agenda, A Responsible Course,' *Council on Foreign Relations* (daring), 14 Mei 2007, <<https://www.cfr.org/event/us-china-relations-affirmative-agenda-responsible-course>>, diakses pada 29 Januari 2022.

<sup>75</sup> Mike Bird, 'China Just Took Over the US as The World's Largest Economy,' *Insider* (daring), <<https://www.insider.com/asia>>, diakses pada 30 Januari 2022.

dari Amerika Serikat yang memiliki harga tinggi. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi turunnya jumlah permintaan akan barang produksi dari Amerika Serikat yang berdampak pada jumlah ekspor dan impornya. Di waktu yang bersamaan perekonomian Tiongkok justru meningkat drastis dari yang sebelumnya berada pada posisi ke-4 dunia pada tahun 2001, kemudian naik menjadi posisi ke-2 terbesar dunia saat ini dibawah Amerika Serikat.<sup>76</sup> Tidak hanya itu, Tiongkok juga memiliki pasar *E-Commerce* terbesar di dunia saat ini.

Dalam hubungan perdagangan, baik Tiongkok maupun Amerika Serikat sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Terlihat dari *Top List Merchandise Trade* tahun 2018 Amerika Serikat menjadi salah satu dari *China's Top Three Export Markets* selain Uni Eropa dan ASEAN. Dari hubungan perdagangannya dengan Amerika Serikat, Tiongkok mendapatkan surplus perdagangan sebesar US\$ 282 miliar dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara penyumbang terbesar dari surplus perdagangan yang didapatkan oleh Tiongkok.<sup>77</sup>

Sedangkan bagi Amerika Serikat, Tiongkok merupakan partner perdagangan terbesarnya hal ini terlihat dari kegiatan impor dan ekspornya, dimana pada tahun 2017 Tiongkok berhasil menguasai sebesar 16,27% total perdagangan Amerika Serikat yang mana pada tahun 2016 hanya sebesar 15,80%. Jika dijumlahkan total nilai perdagangan antara Amerika Serikat

---

<sup>76</sup> Logan Wright & Daniel Rosen, *Credit and Credibility: Risks to China's Economic Resilience*, Center for Strategic & International Studies, Washington DC, 2018, p. 127.

<sup>77</sup> 'China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States,' *Congressional Research Service* (daring), 2019, <<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33534>>, diakses pada 1 Februari 2022.

dan Tiongkok berkisar US\$ 636,7 miliar pada tahun 2017. Jumlah tersebut meningkat dimana sebelumnya sebesar US\$ 579,2 miliar pada tahun 2016. Tiongkok menjadi negara ketiga dari destinasi ekspor Amerika Serikat setelah Kanada dan Meksiko. Pada tahun 2017 ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok mencapai US\$ 130,4 miliar, jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya berjumlah US\$ 14,4 miliar. Komoditas yang menjadi unggulannya ialah diantaranya seperti; pesawat, mesin beserta bagian-bagiannya, kedelai, kendaraan bermotor, minyak mentah, dan juga barang-barang elektronik.<sup>78</sup>

Bisa dikatakan bahwa Tiongkok merupakan pasar terbesar bagi Amerika Serikat, hal ini dapat dilihat dari jumlah investasi yang masuk lebih besar dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengesampingkan Tiongkok dari globalisasi ekonomi Amerika Serikat. Begitupun sebaliknya bagi Tiongkok, Amerika Serikat merepresentasikan pasar ekspor yang sangat penting dan berpengaruh besar bagi negaranya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok merupakan pasar yang menjanjikan bagi Amerika Serikat, begitupun juga sebaliknya dengan Tiongkok tanpa pasar Amerika Serikat, Tiongkok tidak akan mendapatkan surplus perdagangan yang begitu besar hingga mampu membuatnya berjaya saat ini dibidang ekonomi khususnya perdagangan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> 'U.S. Trade with Major Trading Partners,' *Congressional Research Service* (daring), 2018, <<https://fas.org/sgp/crs/row/R45434.pdf>>, diakses pada 1 Februari 2022.

<sup>79</sup> Wang Dong, 'China's Trade Relations with the United States in Perspective,' *Journal of Current Chinese Affairs*, vol. 39, no. 3, July 2010, p. 172.

Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan sepertiga dari total nilai ekonomi dunia. Bukan hanya menjadi negara dengan perdagangan terbesar, dua negara ini juga menjadi tujuan utama bagi investor asing. Hal ini dikarenakan Tiongkok merupakan negara eksportir terbesar di dunia yang juga memiliki surplus perdagangan terbesar. Sementara itu, Amerika Serikat merupakan negara importir terbesar di dunia dikarenakan memiliki defisit perdagangan terbesar. Tiongkok saat ini adalah mitra dagang terbesar Amerika Serikat, pasar ekspor terbesar ketiga dan sumber impor terbesar. Banyak para konsumen Amerika Serikat yang merasa diuntungkan akan barang murah yang diimpor dari Tiongkok ke Amerika Serikat.

Hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah berkembang mejadi salah satu hubungan perdagangan bilateral tercepat dan terbesar di dunia. Tiongkok saat ini merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat diantara negara-negara berkembang lainnya di dunia dan Amerika Serikat yang juga merupakan negara adidaya. Kedua negara ini memainkan peran sentral yang sangat penting dalam membangun zona ekonomi perdagangan bebas, baik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral.<sup>80</sup>

Perekonomian Amerika Serikat dan Tiongkok mempunyai peran yang sangat besar bagi perekonomian dunia. Pada tahun 2017 kontribusi PDB

---

<sup>80</sup> Dwi Ardiantini, Skripsi: *“Hubungan Kerjasama Dagang Antara Amerika Serikat dengan Tiongkok Setelah Implementasi Kebijakan Internet Plus”* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), pp. 62-63.

(Produk Domestik Bruto) Amerika Serikat terhadap perekonomian dunia mencapai 24,3%, sementara Tiongkok tercatat sebesar 15,2%. Kontribusi nilai perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok juga sangat besar mencapai 8,8% dan 12,8%. Di sisi lain, Amerika Serikat mengambil 13,5% dari impor dunia, sementara Tiongkok menyumbang 10,3%. Dengan besarnya kekuatan perekonomian Amerika Serikat dan Tiongkok, bisa dipastikan bahwa kedua negara ini akan sangat mempengaruhi dunia.<sup>81</sup> Memiliki peran penting dalam tata kelola ekonomi global menjadikan setiap kebijakan terkait perekonomian yang di ambil oleh kedua negara tentu akan sangat memiliki dampak yang signifikan bagi perkonomian dunia.<sup>82</sup>

Selama ini, Amerika Serikat telah mendukung integrasi global Tiongkok dengan harapan bahwa ketika Tiongkok mendapatkan keuntungan dari sistem ekonomi internasional termasuk dengan bergabungnya kedalam WTO, hal ini nantinya akan menjadikan Tiongkok sebagai pemegang kepentingan yang bertanggung jawab, dimana Tiongkok akan bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk mempertahankan *Legacy* atau sistem internasional yang telah memungkinkan keberhasilannya. Namun, pandangan Amerika Serikat tentang Tiongkok seiring berjalannya waktu mulai berubah yang dulunya melihat Tiongkok sebagai mitra kerjasama, tetapi sekarang melihat Tiongkok sebagai pesaingnya. Hal ini semakin memuncak usai terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika

---

<sup>81</sup> Humphrey Wangke, 'Ketegangan Hubungan AS-China dan Dampaknya Terhadap Indonesia,' *Jurnal Info Singkat*, vol. 12, no. 15, Agustus 2020, p. 10.

<sup>82</sup> Dwi Ardiantini, pp. 63-64.



Serikat, dimana yang paling berubah dari kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok ialah di bidang perdagangan.

Meskipun terjadi pasang surut hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, akan tetapi dalam rentang waktu tahun 2003 hingga 2017 tidak menimbulkan sebuah permasalahan yang begitu besar. Namun, di era kepemimpinan baru Amerika Serikat yakni di era Presiden Donald Trump mulai timbul sebuah kontroversi. Dimana, Trump sering kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat adanya pertentangan. Kebijakan Trump tersebut salah satunya ialah kebijakannya yang menaikkan tarif pajak terhadap produk impor yang berasal dari Tiongkok.

#### **4.2 Kenaikan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok Sebagai Kebijakan Proteksionisme Ekonomi Amerika Serikat di Era Donald Trump**

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada tahun 2016, membawa perubahan kebijakan bagi perekonomian Amerika Serikat. Di era pemerintahannya, Trump menerapkan kebijakan proteksionisme melalui kenaikan tarif masuk pada produk-produk tertentu dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negerinya.<sup>83</sup> Sejak masa kampanye kepresidenannya, Trump memang telah mengindikasikan akan mengarahkan perekonomian Amerika Serikat kearah proteksionisme.<sup>84</sup> Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump kemudian menerapkan kebijakan ini guna memperbaiki perekonomian Amerika Serikat dan hal-hal yang

---

<sup>83</sup> 'Perkembangan Perekonomian Amerika Serikat, Negara dengan Kekuatan Ekonomi Terbesar di Dunia,' *Ajarekonomi.com* (daring), 16 Oktober 2018, <<https://www.ajarekonomi.com/2018/10/perkembangan-perekonomian-amerika.html>>, diakses pada 14 Mei 2022.

<sup>84</sup> Adirini Pujayanti, p. 7.

berkaitan dengan kemakmuran warga negaranya. Trump sendiri menyatakan ketidakpuasannya terhadap kondisi perekonomian Amerika Serikat di era pemerintahan Barack Obama sebelumnya dan menurutnya kebijakan proteksionisme ekonomi saat ini merupakan salah satu jalan solusinya.

#### **4.2.1 Proteksionisme Ekonomi**

Ditengah gencarnya dunia internasional untuk melakukan berbagai kerjasama baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral serta tren perdagangan bebas untuk memajukan perekonomian global, hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump yang menerapkan kebijakan proteksionisme.<sup>85</sup> Proteksionisme sendiri merupakan suatu kebijakan ekonomi yang digunakan sebagai upaya untuk mengendalikan perdagangan antar negara melalui metode kebijakan seperti; kenaikan tarif pajak impor, batasan kuota, dan berbagai peraturan pemerintah lainnya yang bersifat membatasi untuk mencegah terjadinya impor secara berlebihan serta agar tidak terjadinya pengambilalihan oleh pihak asing dari pasar dan perusahaan lokal.

Proteksionisme banyak digunakan dalam konteks ekonomi mengacu pada kebijakan yang bersifat “melindungi bisnis” dan “upah layak” dalam sebuah negara dengan cara membatasi atau mengatur perdagangan antar negara. Proteksionisme ini muncul sebagai upaya suatu negara untuk melindungi kepentingan dalam negeri yang berfokus pada ekonomi secara internasional. Dalam kamus ekonomi, proteksionisme dapat diartikan dalam

---

<sup>85</sup> Ayu Kurniawati, Skripsi: “*Proteksionisme Ekonomi Amerika Serikat Pada Era Donald Trump*” (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), p. 2.

dua hal. Pertama, proteksionisme diartikan sebagai paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, proteksionisme diartikan sebagai suatu kebijakan yang disengaja oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan impor dengan cara memberikan hambatan perdagangan, seperti salah satunya ialah dengan menerapkan kebijakan kenaikan tarif pajak impor yang mempunyai tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan industri negara lain.<sup>86</sup>

Proteksionisme merupakan suatu kebijakan ekonomi yang diawali dari sistem merkantilisme dan berkembang sejak abad pertengahan. Bagi kaum merkantilis, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks politik karena ia menganggap bahwa ekonomi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan *Power* atau kekuatan sebuah negara. Saat ini, kebijakan merkantilisme masih dijalankan oleh banyak negara akan tetapi dalam bentuk “Neo-Merkantilisme” yaitu suatu kebijakan proteksi dengan tujuan untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional.

Tokoh paling berpengaruh dalam mencanangkan ide proteksionisme ialah Alexander Hamilton (1755-1804), seorang ekonom dan anggota kongres Amerika Serikat. Kepada kongres Amerika Serikat, Hamilton memberikan rekomendasinya yang meliputi beberapa hal, diantaranya: Pertama, negara harus menerapkan *Protecting Duties* (tarif impor) bagi produk-produk asing yang dikhawatirkan dapat “membunuh” industri dalam

---

<sup>86</sup> Laode Muhamad Fathun, ‘Proteksionisme Sengketa Dagang Dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi Studi Kasus: Proteksionisme AS Terhadap Impor Daging Kanada,’ *Jurnal Asia Pacific Studies*, vol. 1, no. 1, Januari – Juni 2017, p. 19.

negeri, khususnya barang-barang manufaktur yang diproduksi oleh negara-negara pesaing. Kedua, negara harus berani melakukan *Prohibitions of Rival Articles* (pelarangan impor bagi produk negara-negara pesaing). Hal ini perlu dilakukan untuk menghidupkan industri dalam negeri. Ketiga, negara harus mampu melakukan *Prohibition of the Exportation of Materials of Manufactures* (pelarangan ekspor bahan baku manufaktur), terutama di sektor dimana Amerika Serikat dapat memproduksinya secara lebih murah dari negara lain. Keempat, negara hendaknya menerapkan *Judicious Regulation for the Inspection of Manufactured Commodities* (peraturan hukum yang mengatur pengecekan komoditas manufaktur). Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kualitas produk kepada konsumen dan menghindari kemungkinan terjadinya penyeludupan.<sup>87</sup>

Pada mulanya proteksionisme ini dikemukakan oleh Alexander Hamilton dalam *Report of Manufactures* tahun 1791, dimana menurutnya negara sudah seharusnya melakukan tindakan proteksionisme guna untuk membantu industri-industri muda (*Infant Industry*) yang belum memiliki keterampilan untuk bersaing akibat masuknya produk-produk asing dari luar negeri, yang nantinya menciptakan kecenderungan menutup akses bagi industri muda untuk turut andil dalam kompetisi pasar bebas karena “tergilas” oleh produk-produk asing tersebut. Artinya *Infant Industry* ini belum memiliki kapabilitas dan stabilitas.

---

<sup>87</sup> Ade Priangani, Makbul Mansyur, & Eden Komarudin Soerdi, ‘Pandemi Covid 19 dan Menguatnya Proteksionisme,’ *Journal Prosiding Senaspolhi*, vol. 1, no. 1, Agustus 2021. pp. 4-5.

Kemudian selanjutnya, pemikiran ini dikembangkan oleh Friedrich List, ia menekankan bahwa kemampuan sebuah industri menghasilkan produk sendiri atau barang produksi lebih utama ketimbang hasil produk itu sendiri. Maksudnya ialah setiap industri muda harus diberikan kesempatan untuk belajar memproduksi, mengelola pasar, mengelola usaha, dan mengelaborasi barang produksi agar bisa menghasilkan produk yang lebih kompetitif, sehingga peran negara yang memiliki *Power* ialah melakukan proteksionisme. Kebijakan ini pernah dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman pada abad ke-19 dimana pada saat itu intervensi negara sangat besar terhadap pasar sehingga industri muda tidak bisa *Head to Head* dengan industri yang sudah matang.<sup>88</sup>

Proteksionisme pernah merajalela pada era 1930-an. Pada saat itu, antara tahun 1929 dan 1933, perdagangan di seluruh dunia berkurang hingga 54% akibat berbagai hambatan perdagangan yang diterapkan salah satunya oleh Amerika Serikat. Kebijakan proteksionisme memang cenderung digunakan, seperti misalnya pembatasan kuota yang pernah dilakukan Amerika Serikat di era 1970-an. Ketika pada saat itu terjadi kenaikan harga bahan bakar dan masyarakat Amerika Serikat lebih memilih untuk membeli mobil berukuran kecil yang merupakan produk dari Jepang dengan tujuan untuk melakukan penghematan terhadap bahan bakar. Demi kepentingan melindungi industri otomotif dalam negerinya, Amerika Serikat kemudian

---

<sup>88</sup> Laode Muhamad Fathun, pp. 19-20.

mengeluarkan kebijakan proteksionisme dengan menetapkan kuota terhadap jumlah mobil Jepang yang diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat.<sup>89</sup>

Kemudian kasus lainnya ialah *Country of Origin Labelling* (COOL) yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap impor daging sapi Kanada. Amerika Serikat menggunakan slogan *Soft Market (Non-Tariff)* sebagai ancaman terhadap gangguan kesehatan, yang sebenarnya tujuannya ialah untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat dari impor daging tersebut. Terlihat pragmatisme kebijakan Amerika Serikat sebagai negara yang menggaungkan pasar bebas justru melakukan tindakan proteksionisme terhadap impor hewan ternak serta produk-produk daging (sapi dan babi) dari Kanada. Dimana, Amerika Serikat menganggap bahwa produk tersebut terkontaminasi penyakit BSE (*Bovine Spongiform Encephalopathy*) atau sering dikenal dengan penyakit sapi gila. Selain itu, produk tersebut juga dianggap terjangkit virus H1N1 (*Swine Flu*).<sup>90</sup> Pada saat situasi inilah proteksionisme kemudian digunakan sebagai upaya untuk melindungi produksi dalam negerinya.

Secara umum, ada dua cara yang dilakukan oleh negara yang menerapkan kebijakan proteksionisme diantaranya: Pertama, kenaikan tarif pajak impor yang lazim dikenal dengan istilah *Tariff Barrier* (TB). Kedua, pembatasan barang melalui peraturan-peraturan khusus yang dikenal dengan istilah *Non-Tariff Barrier* (NTB). Kebijakan tarif (*Tariff Barrier*) merupakan suatu kebijakan proteksi terhadap barang-barang produksi dalam

---

<sup>89</sup> Laode Muhamad Fathun, p. 20.

<sup>90</sup> Laode Muhamad Fathun, p. 17.

negeri dari ancaman barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang akan dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan, kebijakan non-tarif (*Non-Tariff Barrier*) merupakan kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat dari sistem perdagangan internasional. Hal ini meliputi berbagai macam kebijakan seperti; pelarangan, penerapan sistem kuota, penetapan standar produksi, hingga upaya untuk mengaitkan produk dengan masalah kesehatan dan isu lingkungan hidup.<sup>91</sup>

Namun, dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan pada kebijakan proteksionisme dalam bentuk kenaikan tarif (*Tariff Barrier*). Adapun kebijakan *Tariff Barrier* dalam bentuk bea masuk diantaranya sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a) Pembebanan bea masuk tarif rendah (0% - 5%) diberlakukan untuk bahan-bahan kebutuhan pokok dan vital seperti; beras dan alat-alat militer atau pertahanan.
- b) Tarif sedang (5% - 20%) dikenakan untuk barang-barang setengah jadi dan barang-barang lainnya yang belum cukup diproduksi di dalam negeri.

---

<sup>91</sup> Ardiprawiro, Kebijakan Ekonomi & Perdagangan Internasional, *Ekonomi Internasional*, Universitas Gunadarma Publishing, Depok, 2013, p. 38.

<sup>92</sup> Hamdy Hady, *Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

- c) Tarif tinggi (diatas 20%) dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lainnya yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan merupakan kebutuhan pokok.

Selain itu, terdapat juga sistem atau cara dalam pungutan bea masuk diantaranya sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a) *Advalorem Tariff*, merupakan pajak yang di perhitungkan berdasarkan pada persentase nilai barang yang diimpor. Misalnya harga barang (A) 100 dolar, telah dikenakan tarif sebesar 10%, maka barang tersebut akan dikenakan tarif 10% dari 100 dolar yaitu 10 dolar.
- b) *Spesifict Tariff*, merupakan pajak yang diperhitungkan berdasarkan per unit atau per jumlah barang. Misalkan tarif akan dikenakan sebesar 10 dolar per ton atau 5% untuk setiap ton.
- c) *Mixed Tariff*, merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan sistem kombinasi dari kedua bentuk tarif sebelumnya. Misalkan tarif dikenakan 5% per kilogram plus 10% dari jumlah nilai barang.

Kebijakan proteksionisme cenderung akan mencederai semangat sistem perdagangan bebas. Kebijakan ini sangat sulit untuk dihapuskan karena sebagai upaya suatu negara untuk mengaburkan tujuan dalam melindungi pasar domestiknya dari masuknya barang-barang impor. Kebijakan ini sangat berdampak pada konsumen karena mereka dirugikan akibat terbatasnya ketersediaan pilihan terhadap produk-produk di pasaran. Selain itu, kebijakan proteksionisme ini juga cenderung melumpuhkan

---

<sup>93</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2018, pp. 40-41.



keaktivitas dan inovasi produk dari negara lain yang sebenarnya hal tersebut tidak boleh terjadi.<sup>94</sup>

Langkah Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan proteksionisme tentu menjadi sebuah pertanyaan sekaligus memunculkan sebuah kekhawatiran bagi stabilitas perdagangan dunia yang saling terhubung satu sama lain, mengingat perekonomian Amerika Serikat selalu menjadi sorotan dan juga tolak ukur bagi negara-negara lain di dunia yang nantinya akan mempengaruhi perekonomian global. Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump telah menerapkan kebijakan proteksionisme guna untuk melindungi industri produk dalam negerinya dari serbuan berbagai produk asing yang membanjiri pasar domestik, terutama sekali yang berasal dari Tiongkok.<sup>95</sup>

Amerika Serikat berusaha untuk menghambat pertumbuhan ekonomi Tiongkok dengan menerapkan kebijakan proteksionisme berupa kenaikan tarif pajak terhadap produk-produk impor dari Tiongkok yang masuk ke Amerika Serikat.<sup>96</sup> Proteksionisme dalam bentuk kenaikan tarif secara unilateral merupakan hal yang kontras dengan identitas Amerika Serikat sebagai negara pelopor sistem perdagangan bebas yang bersifat multilateral.<sup>97</sup> Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat ini merupakan salah satu strategi guna untuk melindungi kelangsungan

---

<sup>94</sup> Laode Muhamad Fathun, p. 21.

<sup>95</sup> Ayu Kurniawati, pp. 2-3.

<sup>96</sup> Ayu Kurniawati, p. 20.

<sup>97</sup> Fatma Rahmalia Hanifah, Skripsi: “*Perubahan Arah Politik Perdagangan Amerika Serikat di bawah Kepemimpinan Presiden Donald Trump Studi Kasus: Penerapan Kebijakan Tarif Impor Baja dan Aluminium*” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020), p. v (Abstrak).

ekonomi dalam negerinya, karena pemerintah juga memiliki kewenangan sepenuhnya dalam memutuskan sebuah kebijakan yang tujuannya semata-mata untuk memajukan perekonomian di negara tersebut.

Keinginan Donald Trump dalam membuat sebuah kebijakan perdagangan lebih memfokuskan pada upayanya untuk meningkatkan jumlah ekspor dibandingkan dengan impor, dimana ekspor akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi pendapatan negaranya. Sebagai Presiden dari negara yang memiliki kekuatan dalam perekonomian global, Trump tentunya harus mampu untuk melindungi kepentingan ekonomi Amerika Serikat dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan keuntungan bagi negaranya. Seperti salah satunya dengan kebijakannya menaikkan tarif pajak terhadap produk-produk impor yang berasal dari Tiongkok.

#### **4.2.2 Kenaikan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok**

Kebijakan ekonomi Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah banyak menuai kontroversi, sehingga menimbulkan keresahan baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>98</sup> Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah resmi menerapkan kebijakan proteksionisme melalui kenaikan tarif masuk pada produk-produk tertentu yang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Kebijakan Presiden Trump ini tentu saja merefleksikan sikap anti-globalisasi.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Maulvi Nazir Ahmad, 'Analisis Gaya Kepemimpinan Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump,' Juni 2021, pp. 1-3.

<sup>99</sup> Maulvi Nazir Ahmad, p. 13.

Dalam berbagai literatur ekonomi telah banyak diungkapkan bahwa perdagangan bebas di dunia sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, terdapat berbagai perubahan dalam kebijakan perdagangan suatu negara yang mengikuti tuntutan dari pasar atau arus perdagangan internasional. Dimana, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi produk dalam negerinya dari persaingan dengan produk negara lain, seperti halnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat di era Donald Trump yang menerapkan kebijakan kenaikan tarif pajak impor sebagai strategi pemerintah guna untuk melindungi kelangsungan ekonomi dalam negerinya.<sup>100</sup>

Kebangkitan Tiongkok dalam bidang ekonomi telah menggetarkan dunia, tak terkecuali bagi Amerika Serikat. Trump melihat hal ini sebagai sebuah ancaman yang nyata bagi stabilitas perekonomian dalam negerinya di mata dunia internasional.<sup>101</sup> Dalam menghadapi Tiongkok, Trump berusaha untuk membentuk sebuah strategi ekonomi melalui kebijakannya yang menaikkan tarif pajak terhadap produk impor yang berasal dari Tiongkok. Seruan Donald Trump untuk menaikkan tarif terutama untuk produk baja dan aluminium telah memicu terjadinya konflik dagang diantara kedua negara. Mengingat Amerika Serikat merupakan pasar bagi produk baja dan aluminium dari Tiongkok. Artinya, Tiongkok merupakan pemasok baja dan aluminium di pasar Amerika Serikat.

---

<sup>100</sup> Sonia Agusti Parbo, p. 104.

<sup>101</sup> Sonia Agusti Parbo, p. 106.

Konflik dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara teknis dipicu oleh kenaikan tarif atas produk baja dan aluminium dari Tiongkok oleh Amerika Serikat pada Maret 2018 yang lalu. Konflik dagang yang ditabuh oleh Trump ini merupakan strategi Amerika Serikat untuk menghentikan kemajuan ekonomi Tiongkok yang berkembang dengan sedemikian pesatnya. Keadaan yang demikian tentu tidak hanya mempengaruhi perekonomian kedua negara, tetapi juga turut serta dalam mempengaruhi perekonomian global.

Sejak awal mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump saat kampanye kepresidenannya mengeluarkan slogan '*America First*'. Slogan yang menunjukkan bahwa ia tidak menganut paham ekonomi pasar bebas yang membiarkan semua berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Trump menunjukkan pentingnya peran negara dalam melindungi Amerika Serikat dari gempuran produk-produk asing. Ia tidak menginginkan semua berjalan sesuai dengan mekanisme pasar, karena terbukti hal tersebut menurutnya banyak merugikan kepentingan ekonomi Amerika Serikat.<sup>102</sup> Trump berpendapat bahwa globalisasi saat ini lebih banyak mendatangkan duka daripada suka. Misalnya saja, impor barang konsumsi yang murah telah menyebabkan rendahnya gaji pekerja domestik. Selain itu, yang menjadi perhatian khususnya ialah pengalihan bisnis ke negara-negara yang memiliki buruh dengan biaya upah yang rendah.

---

<sup>102</sup> Ahmad Sahide, p. 6.

Disisi lain, kepemimpinan Donald Trump selama empat tahun telah menghidupkan kembali kebijakan proteksionisme yang sudah ditinggalkan oleh Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Proteksionisme yang dijalankan oleh Trump ini berada di luar garis politik yang umumnya diambil oleh pemimpin-pemimpin Amerika Serikat sebelumnya yang menganut sistem ekonomi liberal. Seperti diketahui Amerika Serikat bersama dengan Inggris dan juga 42 negara lainnya merupakan negara pelopor utama lahirnya *Bretton Woods System* yang mendorong terjadinya globalisasi ekonomi. Trump tampaknya melihat globalisasi ekonomi saat ini tidak lagi menguntungkan Amerika Serikat, sehingga ia mengambil kebijakan untuk memproteksi pasar domestiknya.<sup>103</sup>

Sebaliknya, Trump melihat bahwa globalisasi ekonomi saat ini justru mengancam pasar domestik Amerika Serikat seiring dengan bangkitnya daya saing negara-negara di kawasan Asia Pasifik terutama Tiongkok, sehingga ia pun harus mengambil langkah proteksionisme. Trump berpandangan bahwa liberalisme ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat dan sekutunya saat ini telah banyak merugikan Amerika Serikat karena menyebabkan produk-produk mereka seperti misalnya baja dan aluminium produksi dalam negeri tidak mampu untuk bersaing di pasar domestik dengan hadirnya baja dan aluminium yang diimpor dari Tiongkok.<sup>104</sup>

Kebangkitan ekonomi Tiongkok dalam kancah global perlahan-lahan menunjukkan dominasinya yang dilihat sebagai ancaman dan berpotensi

---

<sup>103</sup> Ahmad Sahide, pp. 2-3.

<sup>104</sup> Ahmad Sahide, p. 7.

merugikan Amerika Serikat. Trump yang menjadi Presiden Amerika Serikat berpandangan bahwa Tiongkok adalah negara yang paling banyak mendapatkan manfaat atau keuntungan saat ini dengan adanya tatanan ekonomi global yang selama ini ditopang oleh Amerika Serikat yang bercorak liberal kapitalis.<sup>105</sup> Trump menilai bahwa Amerika Serikat pada hari ini merupakan negara yang mengalami kemunduran ekonomi, hal itu disebabkan oleh negara lain yang mengambil keuntungan dari Amerika Serikat.<sup>106</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Montaigne yang menyatakan bahwa negara tidak akan memperoleh keuntungan tanpa ada negara lain yang dirugikan. Merkantilisme menganggap bahwa ketergantungan dari negara lain sebagai sesuatu yang sangat merugikan, sehingga banyak negara di dunia membuat kebijakan proteksionisme salah satunya yang dilakukan oleh Amerika Serikat di era Donald Trump yang menaikkan tarif pajak impor produk asal Tiongkok. Terlihat jelas bahwa Trump mencoba untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam sistem perekonomian negaranya.<sup>107</sup>

Pada mulanya di tahun 2017, berawal dari laporan *United States International Trade Commission* (USITC) yang menyebutkan bahwa impor panel surya dan mesin cuci telah merusak industri dalam negeri Amerika Serikat, sehingga memaksa Presiden Donald Trump untuk mengeluarkan kebijakan "*Global Safeguard Restrictions*". Dengan diterapkannya kebijakan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah melakukan

---

<sup>105</sup> Ahmad Sahide, p. 13.

<sup>106</sup> Helsa Eka Putri & Aspin Nur Arifin Rivai, p. 35.

<sup>107</sup> Sonia Agusti Parbo, p. 103.

upaya untuk menyelamatkan industri dalam negerinya dengan kebijakannya menaikkan tarif pajak impor.<sup>108</sup>

Kebijakan untuk menaikkan tarif pajak impor mulai diberlakukan oleh Presiden Trump pada tanggal 22 Januari 2018 dengan membebaskan tarif terhadap impor panel surya sebesar US\$ 8,5 miliar dan mesin cuci sebesar US\$ 1,8 miliar bagi semua negara. Tindakan ini kemudian mendapatkan respon berupa protes dari Korea Selatan dan Tiongkok terkait pemberian tarif pajak impor oleh Amerika Serikat.<sup>109</sup> Pada tanggal 8 Maret 2018, Trump kembali mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan tarif pajak impor tambahan pada baja sebesar 25% dan aluminium sebesar 10%. Tiongkok menjadi target utama, hal ini dikarenakan Tiongkok merupakan negara yang mencakup setengah dari produksi baja dan aluminium global serta merupakan salah satu negara pemasok utama baja dan aluminium di pasar Amerika Serikat.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani aturan kenaikan tarif pajak impor ini pada Kamis, 8 Maret 2018. Penandatanganan ini dilakukan di Gedung Putih dan disaksikan oleh sejumlah pekerja dari dua industri tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negerinya.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Nidia Zuraya, 'Trump Berlakukan Bea Impor Panel Surya dan Mesin Cuci,' *Republika.co.id* (daring), 24 Januari 2018, <<https://www.republika.co.id/berita/p31163383/trump-berlakukan-bea-impor-panel-surya-dan-mesin-cuci>>, diakses pada 14 Mei 2022.

<sup>109</sup> Risya Amanda Cahyani, 'Analisis Kebijakan Tarif Maupun Non Tarif Amerika Serikat Terhadap Tiongkok Dalam Perang Dagang,' *Journal of International Relations*, vol. 6, no. 1, 2020, p. 49.

<sup>110</sup> Rusmanto, 'Trump Tanda Tangani Aturan Bea Masuk Baja dan Aluminium,' *WinNetNews.com* (daring), 9 Maret 2018, <<https://www.winnetnews.com/post/trump-tanda-tangani-aturan-bea-masuk-baja-dan-aluminium>>, diakses pada 31 Maret 2022.



**Gambar 4.1 Donald Trump Menandatangani Aturan Kenaikan Tarif Impor**  
Sumber: BBC News Indonesia

Kemudian selanjutnya, pada tanggal 22 Maret 2018 Trump juga menangguhkan tarif untuk beberapa negara tetapi tidak untuk Tiongkok.<sup>111</sup> Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat USTR (*United States Trade Representative*) pada tanggal 3 April 2018 kembali merilis daftar tarif yang diusulkan untuk produk impor asal Tiongkok senilai US\$ 50 miliar, termasuk diantaranya produk teknologi tingkat tinggi asal Tiongkok. Pada Mei 2018 Trump mengatakan bahwa dirinya tidak puas dengan pembicaraan perdagangan dengan Tiongkok di minggu sebelumnya. Akibatnya, Trump dalam pernyataannya di *White House* pada tanggal 29 Mei 2018 mengatakan bahwa akan menambahkan beban biaya tarif sebesar 25% senilai US\$ 50 miliar atas produk impor asal Tiongkok.<sup>112</sup>

Kebijakan Trump yang lain terhadap Tiongkok ialah menaikkan bea impor barang-barang Tiongkok sebesar 25% senilai US\$ 34 miliar atas 1.102 produk asal Tiongkok, termasuk diantaranya seperti; mobil, hardisk,

---

<sup>111</sup> Revo Kriastiadi Aer, p. 2.

<sup>112</sup> Istanul Badiri, pp. 151-152.



dan suku cadang pesawat pada tanggal 6 Juli 2018.<sup>113</sup> Kemudian juga 284 produk lainnya senilai US\$ 16 miliar yang masih akan dilakukan uji publik. Pada tanggal 10 Juli 2018, Amerika Serikat meluncurkan rencana tarif 10% atas impor produk Tiongkok senilai US\$ 200 miliar. Amerika Serikat kembali membebaskan tarif pada tanggal 1 Agustus 2018, Trump memerintahkan Perwakilan perdagangan Amerika Serikat (USTR) untuk menaikkan tarif impor produk asal Tiongkok senilai US\$ 200 miliar menjadi 25% dari yang semula sebelumnya diusulkan 10%.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 2018 Amerika Serikat merilis daftar produk-produk Tiongkok senilai US\$ 16 miliar untuk dikenai tarif sebesar 25%. Pada tanggal 24 September 2018 Amerika Serikat kembali mengumumkan biaya tarif tambahan atas produk impor asal Tiongkok sebesar 10% yang senilai US\$ 200 miliar yang akan diberlakukan hingga penghujung tahun 2018. Tarif baru ini akan ditingkatkan menjadi 25% pada 1 Januari 2019. Awal tahun 2019 dimulai dengan serangkaian pembahasan terkait perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada tanggal 24 Februari 2019, Amerika Serikat setuju untuk menunda kenaikan tarif yang semula dijadwalkan akan dinaikkan kembali pada tanggal 1 Maret 2019.<sup>114</sup>

Kebijakan Trump menaikkan tarif pajak produk asal Tiongkok masih terus berlanjut. Pada tanggal 10 Mei 2019 Washington kembali menaikkan tarif pajak impor produk asal Tiongkok senilai US\$ 200 miliar.<sup>115</sup> Pada tanggal 1 Agustus 2019, Trump kembali mengumumkan bahwa Amerika

---

<sup>113</sup> Revo Kriastiadi Aer, p. 2.

<sup>114</sup> Istanul Badiri, pp. 152-153.

<sup>115</sup> Revo Kriastiadi Aer, p. 2.

Serikat akan mengenakan biaya tarif tambahan produk impor asal Tiongkok sebesar 10% yang senilai US\$ 300 miliar, disamping tarif 25% atau senilai US\$ 250 miliar yang telah dirilis sebelumnya. Trump menyebutkan bahwa hal ini terjadi karena disebabkan oleh Tiongkok yang tidak merealisasikan janjinya untuk pembelian produk pertanian asal Amerika Serikat.

Tidak sampai disitu, menanggapi balasan tarif dari Tiongkok pada bulan Agustus 2019 Amerika Serikat kembali menaikkan seluruh tarif impor Tiongkok yang semula 25% dengan nilai US\$ 250 miliar menjadi 30% dan dari yang semula 10% dengan nilai US\$ 300 miliar menjadi 15%. Tarif baru ini dijadwalkan akan efektif pada dua periode yaitu pada 1 Oktober 2019 dan 15 Desember 2019. Terhitung sejak tanggal 1 September 2019, Amerika Serikat juga akan mulai menerapkan tarif pajak impor tambahan senilai US\$ 125 miliar, adapun barang-barang yang akan dikenakan diantaranya seperti; alas kaki, popok, produk makanan, jam tangan pintar, mesin pencuci piring, dan juga televisi.<sup>116</sup>

Maksud dari tarif yang dikenakan terhadap produk impor yang berasal dari Tiongkok ini ialah untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan domestik dengan membuat produk mereka lebih terjangkau daripada alternatif produk asing. Jika produsen mobil di Amerika Serikat tiba-tiba harus perlu membayar pajak 25% untuk mengimpor baja. Tentu, secara teori ini akan membuat produsen mobil tersebut untuk membeli baja dalam

---

<sup>116</sup> Istanul Badiri, p. 153.

negeri dan itu akan menguntungkan perekonomian Amerika Serikat dan pasar kerja secara keseluruhan.

Kebijakan Amerika Serikat untuk menaikkan tarif pajak produk asal Tiongkok merupakan kebijakan yang dinilai oleh banyak pihak sebagai kebijakan kontroversi. Hal ini ironis karena Amerika Serikat sebagai negara yang dulunya menentang proteksionisme dalam praktik perdagangan global, justru mengeluarkan kebijakan yang kental dengan unsur proteksionisme. Kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sosok Donald Trump yang memang sejak awal pencalonan dirinya sebagai Presiden dianggap sebagai tokoh yang memiliki sejumlah kontroversi dalam ide dan pemikirannya.

Perilaku Amerika Serikat yang menaikkan tarif pajak impor menunjukkan bagaimana upaya negara ini untuk menggunakan kebijakan proteksionisme sebagai instrumen ekonomi politik guna menciptakan ketahanan domestik yang bersumber pada stabilitas pasar domestik dengan memperketat proses masuknya produk asing yang masuk ke negaranya.<sup>117</sup> Setiap negara memang memiliki kedaulatan untuk membuat kebijakannya masing-masing. Namun demikian, bukan berarti dapat memutuskan sebuah kebijakan yang sewenang-wenang. Sebab, kebijakan ekonomi suatu negara akan sangat berdampak pada negara lain terutama sekali negara yang menjadi mitra dagangnya.

Amerika Serikat telah merubah perekonomian negaranya dengan model pemerintahan yang baru. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh

---

<sup>117</sup> Laode Muhamad Fathun, p. 21.

Trump serta keinginannya untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara yang terkuat di dunia melalui slogan “*American First*”. Ia menginginkan agar Amerika Serikat mampu menciptakan kebutuhannya sendiri melalui kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya. Seiring berjalannya waktu, Trump menjalankan tugasnya sebagai Presiden dan pemerintahannya juga didorong untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Terlihat jelas bahwa kebijakan Trump yang selama ini cenderung untuk menaikkan tarif pajak terhadap produk impor yang berasal dari Tiongkok merupakan bentuk kebijakan proteksionisme ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat di era Donald Trump sebagai alat bagi Amerika Serikat untuk dapat *Survive* dari persaingan dengan produk-produk impor yang berasal dari Tiongkok. Selain itu, hal ini juga merupakan strategi dari Trump untuk dapat menghentikan kemajuan ekonomi Tiongkok yang berkembang dengan sedemikian pesatnya.<sup>118</sup>

Langkah proteksionisme yang dilakukan oleh Trump ini tentu saja bertentangan dengan paham liberalisme ekonomi yang selama ini dianut oleh Amerika Serikat. Fenomena ini juga bisa dilihat sebagai indikasi ketidakmampuan pasar domestik Amerika Serikat dalam bersaing dengan produk asing yang berasal dari luar negeri, dimana liberalisme ekonomi menuntut daya saing yang sangat tinggi. Oleh karena itu, menurut Trump sangat penting baginya mengambil langkah dalam upaya untuk melindungi

---

<sup>118</sup> Ahmad Sahide, p. 10.

pasar domestiknya.<sup>119</sup> Hal ini tentunya sejalan dengan asumsi dasar dari teori neo-merkantilisme yaitu kebijakan yang menerapkan proteksi dengan tujuan untuk melindungi dan mendorong perekonomian nasionalnya.

### **4.3 Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menaikkan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok**

Dalam sub-bab ini, penulis akan memaparkan secara lebih rinci mengenai alasan-alasan terbentuknya kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menaikkan tarif pajak produk asal Tiongkok di era Donald Trump. Dalam upaya menjawab penelitian, penulis akan membagi alasan Donald Trump ke dalam dua kategori yaitu faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*) dari Richard Snyder, dkk. Kedua faktor ini akan saling mempengaruhi satu sama lain dan akhirnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh unit politik domestik suatu negara.

#### **4.3.1 *Internal Setting of Decision Making***

Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara tentu tidak terlepas dari variabel utamanya yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang datang dari dalam atau domestik negara itu sendiri, seperti keadaan dan situasi lingkungan domestik di suatu negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.<sup>120</sup>

Dari beberapa variabel faktor internal, terdapat dua variabel yang digunakan

---

<sup>119</sup> Ahmad Sahide, pp. 6-8.

<sup>120</sup> Mirna Ardiyanti Pratama, 'Keputusan Amerika Serikat Mencabut Pembatasan Ekspor Minyak Mentah Tahun 2015,' Jurnal Skripsi Digital Repository Universitas Jember (daring), 2017, <<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/82740/Mirna%20Ardiyanti%20Pratama.pdf?sequence=1>>, diakses pada 1 September 2021.

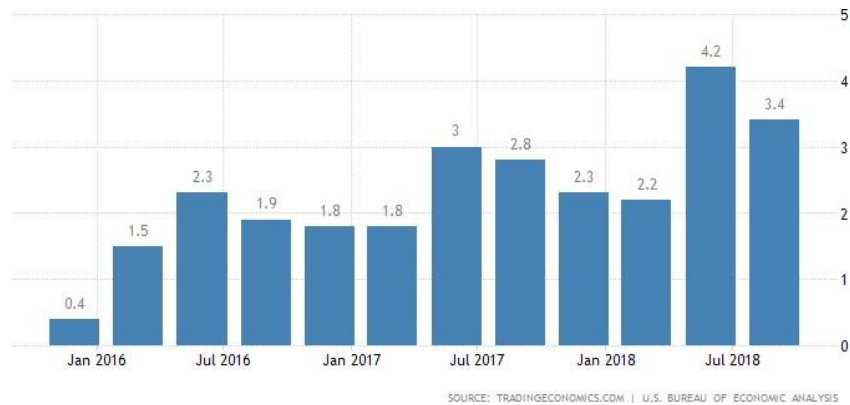
untuk membantu menjawab alasan terbentuknya kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menaikkan tarif pajak produk asal Tiongkok di era Donald Trump yaitu: *Non-Human Environment* dan *Human Environment*.

**a) Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat yang Mengalami Penurunan (*Non-Human Environment*)**

Salah satu faktor yang mendorong Presiden Donald Trump untuk mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak atas produk yang asal Tiongkok ialah karena kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang mengalami penurunan pasca pemerintahan Barack Obama yang merupakan Presiden Amerika Serikat periode sebelumnya. Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump memiliki kepentingan untuk memajukan perekonomiannya. Ketika pada saat kampanye kepresidenannya, Trump sempat menyindir lemahnya perekonomian Amerika Serikat dibawah pemerintahan Barack Obama. Pasalnya, selama pemerintahan Obama perekonomian Amerika Serikat sering mengalami penurunan signifikan. Bahkan Obama merupakan satu-satunya Presiden Amerika Serikat dalam sejarah modern yang pertumbuhan ekonominya pernah tidak sampai 3% dalam setahun, yakni tepatnya pada tahun 2016 yang merupakan akhir masa pemerintahannya. Berikut merupakan data PDB (Produk Domestik Bruto) Amerika Serikat dari tahun 2016 – 2018.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Ayu Kurniawati, pp. 72-73.



**Grafik 4.1 United States GDP Growth Rate**  
 Sumber: (Trading Economics, 2018)

Dari grafik diatas terlihat bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dari tahun 2016 – 2018. Pada bulan Desember akhir tahun 2015 hingga bulan Januari tahun 2016 PDB Amerika Serikat berada pada angka 0,4%. Kemudian, pada tahun 2016 yang merupakan tahun terakhir periode kepemimpinan Barack Obama, pada kuartal pertama angka PDB Amerika Serikat berada pada angka 1,5%. Selanjutnya, pada kuartal kedua naik menjadi 2,3%. Pada kuartal ketiga turun menjadi 1,9% hingga terakhir pada kuartal keempat sampai awal tahun 2017 turun kembali menjadi 1,8%. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun terakhir masa pemerintahan Barack Obama pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mengalami penurunan, dikarenakan dalam satu tahun tidak mampu untuk mencapai angka 3%.<sup>122</sup>

Selanjutnya diawal kepemimpinan Presiden Donald Trump, pada kuartal pertama angka PDB Amerika Serikat mulai ada kenaikan meskipun masih naik turun. Hingga pada kuartal kedua pada tahun 2018 angka PDB Amerika Serikat naik drastis menjadi 4,2%. Kemudian, pada kuartal ketiga

<sup>122</sup> Ayu Kurniawati, p. 73.

turun kembali menjadi 3,4%. Turunnya PDB Amerika Serikat pada kuartal ketiga tahun 2018 dikarenakan faktor lemahnya kinerja ekspor dan meningkatnya impor yang disebabkan oleh investasi swasta. Pada periode ini mulai digencarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak impor terutama sekali produk yang berasal Tiongkok yang mendominasi pasar Amerika Serikat sebagai upaya untuk mengurangi defisit perdagangan.

Tidak stabilnya angka pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat memberikan tanda bahwa perekonomian Amerika Serikat perlu untuk diperbaiki. Namun, setidaknya diawal masa pemerintahannya Trump telah mampu untuk merealisasikan janjinya bahwa ia akan mampu untuk mencapai angka 3% ke atas bahkan lebih dari itu. Oleh karenanya, sejak masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump telah menyuarakan keinginannya bahwa ia ingin memajukan kembali perekonomian Amerika Serikat yang sempat menurun di masa pemerintahan Barack Obama.<sup>123</sup> Langkah yang kemudian diambil Trump ialah dengan menerapkan kebijakan proteksionisme berupa kenaikan tarif pajak impor.

#### **b) Defisit Perdagangan Amerika Serikat Terhadap Tiongkok (*Non-Human Environment*)**

Berdasarkan data, pada tahun 2016 Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar bagi Tiongkok dengan menguasai sekitar 19% dari total ekspor, sementara itu Tiongkok merupakan pasar ekspor terbesar ketiga bagi Amerika Serikat dengan pangsa pasar yang mencapai 10%.

---

<sup>123</sup> Ayu Kurniawati, p. 75.

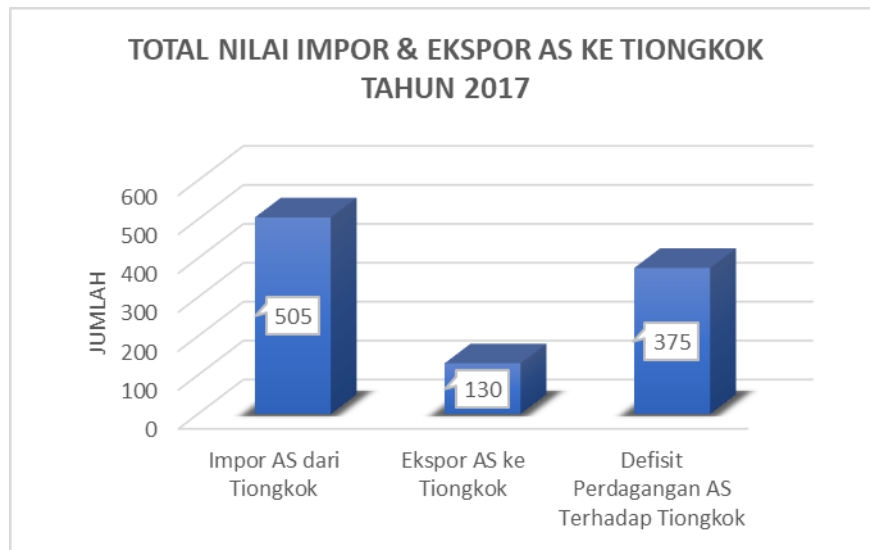


Perkembangan tren ekspor Tiongkok yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat menimbulkan kesenjangan perdagangan diantara kedua negara. Sehingga, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan yang cukup besar terhadap Tiongkok yaitu mencapai US\$ 347 miliar pada tahun 2016. Tiongkok lantas menikmati surplus perdagangan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Surplus perdagangan Tiongkok yang cukup besar kemudian dibingkai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan memposisikan Amerika Serikat mengalami kerugian yang cukup besar pula.<sup>124</sup>

Kebangkitan Tiongkok yang mengguncang perekonomian global membangkitkan semangat Amerika Serikat untuk tidak ingin kalah dari Tiongkok. Tingginya defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok, memancing semangat Trump untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Pada tahun 2017 total nilai impor Amerika Serikat dari Tiongkok ialah sebesar US\$ 505 miliar, sementara itu total nilai ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok hanya sebesar US\$ 130 miliar. Dengan demikian, total defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu mencapai US\$ 375 miliar. Berikut ini merupakan grafik total nilai impor dan ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok pada tahun 2017.

---

<sup>124</sup> Helsa Eka Putri & Aspin Nur Arifin Rivai, p. 45.



**Grafik 4.2 Total Nilai Impor & Ekspor AS ke Tiongkok Tahun 2017**

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Ayu Kurniawati, 2019, p. 76.

Menurut Trump, defisit sebanyak US\$ 375 miliar merupakan bukti bahwa perusahaan Amerika Serikat diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Tiongkok.<sup>125</sup> Kondisi yang demikian akhirnya membuat Presiden Donald Trump untuk mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak atas produk asal Tiongkok sebagai konsekuensi logis dari sikap keras yang ditujukan Trump terhadap Tiongkok. Trump tidak ingin melakukan kerjasama dengan sebuah negara apabila Amerika Serikat tidak mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukannya. Hal ini juga dipahami sebagai konteks tanggapan Amerika Serikat terhadap kebangkitan ekonomi Tiongkok.

Kondisi perdagangan negara yang kuat dapat dilihat berdasarkan neraca perdagangan negara tersebut yang menunjukkan lemah atau kuat daya saingnya. Lemahnya neraca perdagangan suatu negara ditandai dengan turunnya jumlah ekspor yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah

<sup>125</sup> Ayu Kurniawati, p. 76.

impornya. Terlihat bahwa kegiatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan kesenjangan dimana jumlah nilai ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah nilai ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok.<sup>126</sup>

Salah satu alasan mengapa jumlah ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat jauh lebih besar ialah dikarenakan masyarakat Amerika Serikat lebih konsumtif daripada masyarakat Tiongkok. Masyarakat Tiongkok yang dibayar dengan upah buruh yang lebih rendah tidak mampu untuk membeli barang produksi Amerika Serikat yang berharga tinggi, sehingga permintaan akan barang produksi Amerika Serikat dari Tiongkok menurun, hal ini kemudian berdampak pada jumlah ekspornya. Faktor lain yang kemudian menyebabkan total nilai ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat jauh lebih besar ialah pertukaran nilai mata uang. Pemerintah Tiongkok menerapkan kurs tetap yang membuat nilai mata uang Yuan Tiongkok lebih rendah terhadap Dollar Amerika Serikat. Rendahnya nilai mata uang yang ditetapkan pemerintah Tiongkok membuat harga barang produksi Tiongkok yang masuk ke Amerika Serikat menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan produk dalam negeri Amerika Serikat sendiri.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Sonia Agusti Parbo, p. 100.

<sup>127</sup> Zahra Arlinia, 'Perang Dagang Amerika-China,' *Republika.co.id* (daring), 14 Juni 2022, <<https://retizen.republika.co.id/posts/155081/perang-dagang-amerika-china>>, diakses pada 31 Oktober 2022.

**c) Pengalaman Donald Trump Sebagai Seorang Pengusaha (*Human Environment*)**

Dinamika kehidupan seorang pemimpin dari sejak kecil hingga dewasa akan sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan pengembangan kepribadian, karena dapat mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin mendapatkan pengalaman dan apa saja pembelajaran yang telah didapatkannya.<sup>128</sup> Latar belakang Trump yang berasal dari keluarga pengusaha serta pengalamannya sebagai seorang pengusaha merupakan bagian dari proses perjalanan hidup yang akan menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi seorang Donald Trump.

Donald Trump merupakan pengusaha sukses asal Amerika Serikat. Latar belakangnya sebagai seorang pengusaha memberikan pengaruh yang kuat pada setiap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Trump khususnya dalam hal perdagangan. Pada awal kampanye Trump tahun 2016 yang lalu, isu politik luar negeri dalam hal ekonomi khususnya perdagangan menjadi fokus utama Trump. Ia berkomitmen sejak awal kampanyenya untuk memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi Amerika Serikat. Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, Trump terkenal dengan sebutan pengusaha kaya dan dijuluki sebagai raja properti, karena lahir dari keluarga dengan ayah yang berprofesi sebagai pengembang properti yang ada di Kota New York. Hal inilah yang kemudian membuat Trump ikut terjun ke dalam

---

<sup>128</sup> Nabilla Rizky Amalia, p. 60.

dunia properti pasca kelulusannya dari Universitas Pennsylvania dengan jurusan Ekonomi.<sup>129</sup>

Datang dari latar belakang seorang pengusaha, bintang *Realityshow*, dan sama sekali tak punya pengalaman politik praktis, Trump sukses membalikkan keadaan. Sebuah pencapaian yang sensasional mengingat citra buruk yang Trump semai selama kampanyenya. Selain itu, jika dibandingkan dengan Hillary Clinton, Trump masih kalah jauh dari segi kapasitas dan pengalaman di bidang pemerintahan. Belum termasuk juga keberhasilannya dalam menyingkirkan elit-elit politik Partai Republik pada tahap konvensi partai.<sup>130</sup>

Terlahir dari keluarga pengusaha dan terjun langsung ke dunia usaha meninggalkan karakter yang ambisius dan dominan dalam diri Trump. Dapat dipahami bahwa sifat dasar seorang pengusaha ialah kompetitif. Dalam dunia usaha sifat yang harus dimiliki pelakunya ialah kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan, mengontrol, dan mengutamakan keuntungan seperti tujuan para pengusaha pada umumnya. Hal ini terlihat pada kepribadian seorang Trump yang dikenal sebagai sosok yang ambisius dan mendominasi. Karakter ini kemudian terbawa hingga Trump naik menjadi Presiden Amerika Serikat.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Resitaka Aulia Nurmamurti, dkk, 'Analisis Kebijakan Luar Negeri Trump: Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat – China,' *Jurnal Sospoli*, vol. 2, no. 1, Januari 2022, p. 64.

<sup>130</sup> M. Chairil Akbar Setiawan, Garcia Krisnando Nathanael Ginting, & Anwar Ilmar, 'Relasi antara Politik Identitas terhadap Proteksi Perdagangan di bawah Pemerintahan Donald Trump,' *Journal of Political Issues*, vol. 2, no. 1, Juli 2020, p. 59.

<sup>131</sup> Ainun Arta Zubaidah & Ratih Herningtyas, p. 136.

Donald Trump yang memiliki dasar bisnis sejak kecil dan juga paham akan ilmu ekonomi, tentu semua keputusan yang diambil oleh Trump mengenai kebijakan ekonomi Amerika Serikat, tidak terlepas dari latar belakangnya tersebut. Semua ini telah mempengaruhi pola pikir dan cara pandangannya dalam melihat suatu permasalahan khususnya dalam membuat kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat oleh Trump terlihat lebih rasional dan memihak pengusaha. Hal ini dikarenakan ia mengetahui betul bagaimana berada pada posisi seorang pengusaha tersebut.

Dengan latar belakangnya yang merupakan seorang pengusaha, Trump melihat bahwa pasar bebas lebih banyak merugikan kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan produk-produk dalam negeri Amerika Serikat saat ini kalah bersaing dengan produk-produk asing dari luar negeri, terutama yang berasal dari Tiongkok. Trump menyadari bahwa Amerika Serikat selama ini telah mengalami kejayaan. Namun, ketika ia terpilih sebagai Presiden, Amerika Serikat sedang berada pada kondisi ekonomi yang tidak optimal. Oleh karena itu, bagi Trump rakyat Amerika Serikat membutuhkan kehadiran negara untuk melindungi (proteksi) produk-produk yang dihasilkan dalam menghadapi serbuan produk-produk impor. Kebijakan yang kemudian ditempuh oleh Presiden Donald Trump ialah dengan menerapkan kebijakan proteksionisme berupa kenaikan tarif pajak impor.

### **4.3.2 Social Structure and Behavior**

Faktor ini dapat diartikan pada bagaimana struktur dan perilaku sosial dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan oleh suatu negara. Dalam hal ini struktur dan perilaku sosial tersebut dapat secara langsung mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, para pembuat kebijakan, ataupun bisa mempengaruhi suatu kebijakan secara tidak langsung melalui *Internal Setting* terlebih dahulu. Dari beberapa variabel struktur dan perilaku sosial, terdapat dua variabel yang digunakan untuk membantu menjawab alasan terbentuknya kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menaikkan tarif pajak produk asal Tiongkok di era Donald Trump yaitu: *Major Institutional Patterns* dan *Political*.

#### **a) Donald Trump yang Berasal dari Partai Republik (*Major Institutional Patterns*)**

Perubahan struktur penguasa dalam sebuah negara berpotensi untuk merubah arah kebijakan luar negerinya. Apalagi jika terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal ideologi, pemikiran, dan ide-ide antara penguasa sebelumnya dengan penguasa selanjutnya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menghasilkan *Output* kebijakan luar negeri yang berbeda. Salah satu negara yang mengalami perubahan struktur penguasa ialah Amerika Serikat pada tahun 2016. Perubahan struktur penguasa tersebut ditandai dengan kemenangan Partai Republik dalam kancah Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat. Hasil Pilpres Amerika Serikat tahun 2016 menempatkan Donald Trump dari Partai Republik sebagai pemenang dan secara sah

terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 untuk masa jabatan periode 2017-2020.

Di samping itu, Partai Republik sebagai partai pendukung Trump juga menuai sukses dengan menguasai mayoritas kursi di Kongres Amerika Serikat. Partai Republik berhasil menguasai Kongres yaitu Senat dengan 54 kursi dari 100 kursi dan *House of Representative* atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 246 kursi dari 435 kursi. Sebelum pemilu tahun 2016, Partai Republik hanya menguasai mayoritas kursi di DPR, sedangkan Senat didominasi oleh perwakilan Partai Demokrat. Sistem pemerintahan Amerika Serikat menganut sistem *Legislative Heavy* yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada Kongres dibandingkan lembaga eksekutifnya. Setiap kebijakan politik harus mendapatkan persetujuan dari Kongres sebelum diimplementasikan. Dengan kata lain, dukungan dari Kongres menjadi suatu hal yang wajib dimiliki oleh seorang Presiden jika tidak ingin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kemudian dihalangi.<sup>132</sup>

Dalam konteks kebijakan luar negeri, pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dijalankan oleh Eksekutif dan dibahas bersama Senat. Dengan berkuasanya Partai Republik di Senat dan terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tahun 2017, maka orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat tentunya akan dipengaruhi oleh ideologi, pemikiran, dan ide-ide dari Partai Republik. Partai Republik sendiri merupakan salah satu partai politik besar dengan sejarah yang

---

<sup>132</sup> Puguh Toko Arisanto & Adi Wibawa, p. 174.



panjang dan terkenal dengan ideologi konservatisme. Meskipun terkenal dengan ideologi konservatisme, pergeseran nilai ideologi dari kiri ke kanan terus tampak tidak terelakkan artinya partai ini tidak menolak sepenuhnya ide-ide kanan yang identik dengan liberalisme, pasar bebas dan kapitalisme, tetapi lebih kepada bagaimana agar praktik-praktik pasar bebas dan kapitalisme ini dapat memberikan manfaat atau keadilan sosial bagi rakyat Amerika Serikat.

Dalam konteks kebijakan ekonomi, Partai Republik berkomitmen untuk melakukan proteksionisme dan tarif pada awal pendiriannya yang kemudian berubah lebih mendukung perdagangan bebas di abad ke-20. Meskipun demikian status sebagai partai pendukung proteksionisme tidak sepenuhnya pudar. Partai Republik cenderung lebih menyukai proteksionisme melalui kebijakan pemberlakuan peningkatan tarif impor. Jika dibandingkan dengan Partai Demokrat yang lebih moderat dan cenderung mendukung perdagangan bebas dan kapitalisme, Partai Republik memiliki potensi besar dalam menerapkan kebijakan yang mengarah pada proteksionisme dan nasionalisme.<sup>133</sup>

Selain karena faktor Trump yang terstigmatisasi atas Tiongkok, terlihat bahwa kebijakan Trump yang cenderung lebih mengarah pada kebijakan proteksionisme tidak bisa dilepaskan dari pengaruh partai pendukungnya atau tempat dimana ia bernaung. Dalam jajak pendapat tahun 2014, sekitar 60% dari pendukung Partai Republik menginginkan agar

---

<sup>133</sup> Puguh Toko Arisanto & Adi Wibawa, pp. 174-175.

Amerika Serikat lebih mementingkan mengurus masalah domestik dalam negeri dan mengurangi pada urusan luar negeri. Hal ini dapat dipersepsikan bahwa mayoritas pendukung Partai Republik menginginkan perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari globalisme ke nasionalisme dan lebih mengutamakan kepentingan domestik Amerika Serikat dalam urusan kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional.

Partai Republik melalui Trump kemudian menjadikan isu tersebut sebagai alat kampanye Pilpres Amerika Serikat tahun 2016. Trump sebagai perpanjangan tangan Partai Republik tidak jarang mengkambinghitamkan Tiongkok sebagai aktor utama dibalik buruknya perekonomian Amerika Serikat. Trump juga menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat di era Barack Obama yang dianggap memberikan ruang yang terlalu luas bagi Tiongkok untuk menguasai perekonomian Amerika Serikat. Dalam kampanyenya, Trump juga berjanji untuk menekan defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok melalui kebijakan-kebijakan yang restruktif dan protektif.

Dengan slogan "*America First*" Partai Republik melalui Trump berusaha meyakinkan rakyat Amerika Serikat bahwa pemerintahannya akan memprioritaskan industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dari luar negeri khususnya yang berasal dari Tiongkok.<sup>134</sup> Terlihat bahwa kebijakan Trump yang selama ini cenderung lebih proteksionisme tidak terlepas dari pengaruh partai politik

---

<sup>134</sup> Puguh Toko Arisanto & Adi Wibawa, pp. 175-176.

pendukungnya. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya terhadap Tiongkok.

**b) Keinginan Amerika Serikat Merubah Kebijakan Ekonomi Tiongkok (*Political*)**

Amerika Serikat ingin Tiongkok merubah kebijakan ekonominya secara struktural, terutama perihal perlindungan kekayaan intelektual hingga sistem perdagangannya. Negeri Paman Sam ini secara gamblang mengutarakan ambisinya untuk merubah kebijakan ekonomi Tiongkok yang dianggap hanya menguntungkan perekonomian Tiongkok saja apabila melakukan perdagangan internasional. Ambisi Amerika Serikat ini bermula dari adanya kecurigaan Amerika Serikat terhadap praktek kecurangan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam perdagangan internasional. Kecurigaan ini muncul berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki *Power* berusaha untuk menyerang Tiongkok melalui kebijakan kenaikan tarif. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberi keuntungan bagi negaranya.

Dengan diubahnya kebijakan ekonomi yang berlaku di Tiongkok sesuai dengan keinginan Amerika Serikat, maka perdagangan internasional akan menguntungkan pihak Amerika Serikat. Tindakan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat ingin menghegemoni Tiongkok terutama dalam hal ekonomi. Amerika Serikat merasa terancam dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Tiongkok selama ini. Tiongkok dianggap sebagai

ancaman yang nyata bagi perekonomian Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat harus bertindak untuk menghilangkan ancaman tersebut. Tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat ialah merubah kebijakan ekonomi Tiongkok dengan cara memberikan hambatan berupa kenaikan tarif. Kondisi struktur internasional yang anarki memungkinkan terciptanya keadaan negara yang saling mecurigai satu sama lain, karena tidak ada yang menjadi penguasa dalam struktur internasional. Kondisi ini mengharuskan negara untuk bertindak sendiri demi menjaga kepentingannya. Dengan memberikan hambatan tarif kepada Tiongkok, Amerika Serikat berupaya melakukan proteksionisme ekonomi sekaligus berusaha untuk mencapai kepentingannya nasionalnya. Meskipun memang Amerika Serikat harus merusak iklim perdagangan bebas yang telah dibuatnya.

Seperti diketahui Amerika Serikat dikenal sebagai inisiator adanya sistem perdagangan bebas. Amerika Serikat menginisiasi terbentuknya GATT hingga WTO untuk menghilangkan segala bentuk hambatan dalam perdagangan internasional. Bahkan, Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang mengajak Tiongkok agar supaya terbuka dalam menjalankan perdagangan internasional. Namun, kepentingan nasional merupakan hal yang paling utama bagi sebuah negara, sehingga Amerika Serikat rela untuk melakukan kebijakan tarif terhadap Tiongkok dengan pertimbangan bahwa tujuan utama Amerika Serikat bisa tercapai dan bisa mengungguli Tiongkok dalam bidang perekonomian.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Risyana Amanda Cahyani, p. 52.

### **4.3.3 External Setting of Decision Making**

Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan atau kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor yang datang dari luar wilayah suatu negara atau kondisi di luar teritorial wilayah suatu negara seperti situasi politik internasional, aliansi internasional, dan konflik internasional.<sup>136</sup> Dari beberapa variabel faktor eksternal, terdapat dua variabel yang digunakan untuk membantu menjawab alasan terbentuknya kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menaikkan tarif pajak produk asal Tiongkok di era Donald Trump yaitu: *Non-Human Environment* dan *Societies Organized and Functioning as States and Government Action*.

#### **a) Tingginya Nilai Ekspor Tiongkok di Amerika Serikat (*Non-Human Environment*)**

Tingginya ekspor Tiongkok merupakan salah satu sinyal akan identitasnya sebagai negara rival atau partner penting bagi Amerika Serikat. Tiongkok yang unggul dalam hal ekspor barang menjadikannya sebagai negara eksportir terbesar yang memiliki GDP (*Gross Domestic Product*) yang stabil serta merupakan negara yang menjadi pusat manufaktur dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok meningkat dengan pesat beberapa tahun terakhir. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini mendorong mereka untuk melakukan ekspansi pasar secara besar-besaran.

---

<sup>136</sup> Snyder, R.C. Bruck, & H.W. Sapin, p. 202.

Berdasarkan dokumen 2011 *Report to Congress of the US-China Economic and Security Review Commission*, Tiongkok merupakan negara industri terbesar di dunia. Tingkat industri Tiongkok dapat melampaui Amerika Serikat terutama sekali di bidang manufaktur seperti; mobil, ponsel, dan komputer. Terlebih perusahaan besar Amerika Serikat mempercayakan proses pembuatan komponen produk mereka di Tiongkok, sehingga memperkuat Tiongkok sebagai negara industri terbesar di dunia. Dengan memiliki industri terbesar di dunia, perekonomian Tiongkok terus naik hingga 9% di tahun 2011 sehingga membuat Tiongkok menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.<sup>137</sup>

Sejak beberapa tahun terakhir, produk Tiongkok yang unggul dan dominan naik sekitar 10%. Tingkat ekspor Tiongkok yang sangat besar dan terus mengalami peningkatan membuat nilai PDB (Produk Domestik Bruto) Tiongkok mencapai US\$ 12 triliun pada tahun 2017. Tiongkok juga telah menjadi negara terbesar dari sisi ekspor sejak tahun 2017 dengan total produksi yang mencapai US\$ 2,15 miliar. Sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat menempati urutan kedua dan ketiga. Dalam hal *Foreign Direct Investment* (FDI), tahun 2016 Tiongkok telah menjadi negara penerima FDI terbesar ketiga di dunia dan negara penyedia FDI terbesar kedua di dunia. Dengan kemajuan ekonomi Tiongkok ini, banyak yang memprediksi bahwa beberapa tahun kedepan Tiongkok akan menjadi

---

<sup>137</sup> Vanilla Planifolia, 'Strategi Rebalancing Amerika di Kawasan Asia Pasifik,' *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 6, no. 1, April – September 2017, p. 5.

negara penerima dan penyedia FDI terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat.

Dalam hal cadangan devisa, Tiongkok memiliki cadangan devisa terbesar di dunia yang mencapai US\$ 3,1 triliun mengalahkan Jepang dan Amerika Serikat.<sup>138</sup> Selain itu, total nilai ekspor Tiongkok tercatat merupakan yang paling tinggi di dunia mencapai US\$ 2,36 triliun mengalahkan Amerika Serikat yang hanya mencapai US\$ 1,55 triliun, karena hampir di setiap negara dan juga sektor pasar internasional barang-barang produksi dari Tiongkok yang paling banyak mendominasi.<sup>139</sup> Strategi perekonomian Tiongkok ialah bagaimana menjadi negara pusat produksi sedangkan distribusi dan konsumsi diupayakan untuk diserahkan sepenuhnya ke pasar internasional. Tercatat ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat menghasilkan cadangan devisa sebesar US\$ 436 miliar. Sedangkan, ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok menghasilkan cadangan devisa sebesar US\$ 112 miliar.<sup>140</sup>

Dalam konteks produk ekspor, Tiongkok dikenal memiliki produk yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dari negara lain. Selain itu, Tiongkok juga telah menjadi salah satu negara pusat produksi berbagai produk dunia dalam konteks rantai pasok global. Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat sebagai negara produsen barang-barang manufaktur terbesar di dunia yang turut serta dalam

---

<sup>138</sup> Puguh Toko Arisanto & Adi Wibawa, p. 171.

<sup>139</sup> Revo Kristiadi Aer, p. 2.

<sup>140</sup> Humphrey Wangke, 'ASEAN, Indonesia, dan Perang Dagang Amerika Serikat-China,' *Jurnal Info Singkat*, vol. 11, no. 11, Juni 2019, p. 8.

meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Berdasarkan fakta-fakta ini, maka tidak berlebihan kiranya jika disimpulkan bahwa ketergantungan dunia terhadap perekonomian Tiongkok sudah sangat besar saat ini.<sup>141</sup> Oleh karena itu, melihat tingginya nilai ekspor Tiongkok di berbagai negara termasuk di Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menganggap hal ini sebagai sebuah ancaman bagi stabilitas perekonomian dalam negerinya di mata dunia internasional. Kondisi yang demikian akhirnya membuat Presiden Donald Trump untuk mengeluarkan sebuah kebijakan berupa kenaikan tarif pajak impor terhadap produk-produk asal Tiongkok. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membatasi impor dan melindungi industri produk dalam negerinya.

**b) Meningkatnya Pengaruh dan Dominasi Tiongkok di Tingkat Global (*Non-Human Environment*)**

Sejak awal abad ke-21, salah satu fenomena yang paling menyita perhatian para akademisi dan pengambil kebijakan dunia adalah kebangkitan Tiongkok sebagai salah satu *Global Power*. Kemajuan ini tidak lepas dari kebijakan domestik Mao Zedong yang mengubah Tiongkok dari negara pertanian menjadi negara industri. *Blueprint* ini kemudian dilanjutkan pada masa Deng Xiaoping yang mereformasi perekonomian Tiongkok dari ekonomi tertutup menjadi ekonomi terbuka yang identik dengan ide-ide liberalisme.

---

<sup>141</sup> Puguh Toko Arisanto & Adi Wibawa, p. 171.



Kebijakan liberalisme ekonomi Tiongkok mengedepankan pada strategi promosi ekspor yang dimulai pada era reformasi ekonomi tahun 1978. Selain menerapkan kebijakan untuk menarik FDI (*Foreign Direct Investment*) sebesar-besarnya sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi, Tiongkok juga memutuskan untuk bergabung dalam keanggotaan WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 2001. Selain itu, Tiongkok juga melakukan apa yang disebut sebagai *Race to the Bottom*. Salah satunya ialah dengan menyediakan tenaga buruh dengan biaya upah yang rendah. Semenjak Tiongkok menerapkan beberapa kebijakan tersebut, Tiongkok telah berangsur-angsur menjadi negara penguasa perekonomian global.

Setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menempatkan Tiongkok sebagai salah satu *Global Power*. Faktor pertama dapat dilihat dari konteks perekonomian Tiongkok. Perekonomian Tiongkok menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam tiga dekade terakhir. Tiongkok mampu menaikkan statusnya dari negara berkembang ke negara dengan kemampuan ekonomi yang hampir setara dengan Amerika Serikat. Sejak tahun 2010, Tiongkok telah menyalip Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia.<sup>142</sup>

Dengan posisi ekonomi terbesar nomor dua di dunia, Tiongkok diprediksi akan menggeser posisi Amerika Serikat dari segi PDB nominal pada tahun 2026 dan mampu mempertahankan posisinya sebagai negara dengan ekonomi terbesar dunia hingga tahun 2050. Perkembangan positif

---

<sup>142</sup> Puguh Toko Arisanto & Adi Wibawa, p. 170.

perekonomian Tiongkok dari tahun ke tahun inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan dari dikeluarkannya kebijakan *Pivot to Asia* pada masa pemerintahan Barack Obama dengan TPP (*Trans Pacific Partnership*) sebagai salah satu wujud realisasinya. Tujuannya ialah untuk mencegah dominasi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik yang kemungkinan berpotensi besar dalam menggeser posisi Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Akan tetapi, dalam perkembangannya TPP tidak membawa dampak yang signifikan terhadap upaya Amerika Serikat dalam mencegah dominasi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik.<sup>143</sup>

Fakta-fakta pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang semakin agresif dalam membangun ekonomi dan citra politiknya pada skala internasional, merupakan sebuah tantangan bagi Amerika Serikat sebagai negara yang memegang predikat *Superpower*. Jika Tiongkok dengan konsisten mencitrakan dirinya sebagai *Global Power* dan terus memperkuat kekuatan ekonominya maka seiring berjalannya waktu keberadaannya akan mampu untuk menggeser posisi Amerika Serikat sebagai *World's Greatest Power*.<sup>144</sup>

Faktor ini semakin lengkap dengan faktor kedua yaitu interpretasi Tiongkok terhadap dirinya sendiri. Setidaknya sejak tahun 1990-an, Tiongkok telah mulai memandang diri mereka sebagai *Great Responsible*

---

<sup>143</sup> Aditya Ramadhani & Sri Muryantini, 'Latar Belakang Keluarnya Amerika Serikat dari Keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* di Era Presiden Donald Trump,' *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, vol. 11, no. 1, Januari 2019, p. 56.

<sup>144</sup> Ainun Arta Zubaidah & Ratih Herningtyas, 'Conciliator vs Bloc Leader: Perbandingan Kebijakan Barack Obama & Donald Trump Dalam Merespon Pertumbuhan Ekonomi China,' *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, vol. 3, no. 2, Desember 2021, p. 128.

*Power*. Konsep citra diri yang pertama kali dikemukakan oleh Jiang Zemin ini berupaya untuk menunjukkan arah politik luar negeri yang akan ditempuh Tiongkok ke depan. Frasa *Great Responsible Power* kerap dimunculkan dalam publikasi-publikasi yang dirilis oleh pemerintah Tiongkok melalui media massanya *People's Daily*. Frekuensi kemunculannya ini semakin tinggi sejak terjadinya krisis finansial global tahun 2007-2008.

Melalui konsep *Great Responsible Power*, Tiongkok berusaha mencari legitimasi dunia atas identitas barunya sebagai salah satu kekuatan besar dalam politik internasional. Tiongkok tidak lagi ingin dipandang sebagai kekuatan yang biasa saja dengan berbagai kemajuan yang telah mereka capai saat ini. Demi mencapai tujuan tersebut, politik luar negeri Tiongkok dikelola selayaknya sebuah negara dengan status *Global Power* dengan pengaruh yang besar. Upaya serius Tiongkok dalam memperbesar pengaruhnya terhadap negara-negara lain setidaknya dapat terlihat dari program *Belt and Road Initiative* (BRI) dan pendirian *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB).<sup>145</sup>

BRI merupakan megaproyek yang berusaha menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara Asia Tengah sampai Eropa melalui jalur darat atau dikenal sebagai *Silk Road Economic Belt* dan dengan negara-negara Asia Tenggara sampai Afrika melalui jalur laut yang dikenal sebagai *21st Century Maritime Silk Road*. Proyek raksasa yang mencakup 3 benua

---

<sup>145</sup> Puguh Toko Arisanto & Adi Wibawa, p. 172.

ini melibatkan  $\frac{3}{4}$  sumber energi dunia, sekitar 4,4 miliar populasi di 67 negara atau 63% dari total populasi dunia serta 29% dari total GDP dunia. Pelaksanaan program BRI tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Tiongkok mendirikan AIIB yang mulai beroperasi sejak Januari 2016 dengan modal awal sebesar US\$ 100 miliar. AIIB didirikan oleh pemerintahan Xi Jinping untuk mempopulerkan Yuan sebagai mata uang global dan memperkuat posisi Tiongkok dalam struktur keuangan internasional.

Beberapa faktor ini menggambarkan bahwa Tiongkok sangat diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan global yang mampu menentukan arah tatanan dunia serta mampu untuk mengimbangi atau bahkan mengalahkan Amerika Serikat dalam konstelasi politik internasional. Dengan munculnya Tiongkok sebagai salah satu kekuatan global, konstelasi ekonomi dan politik internasional tentunya akan berubah. Negara-negara di dunia mulai mengurangi kiblat mereka atas negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat ke Tiongkok dalam kerjasama di berbagai bidang seperti; ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.<sup>146</sup> Hal ini tentu menjadi perhatian penting bagi Amerika Serikat untuk mempertimbangkan prioritas kebijakan luar negerinya demi mempertahankan pengaruhnya di regional Asia maupun dunia.<sup>147</sup>

Selain itu, kemunculan Tiongkok sebagai salah satu kekuatan global tentu saja dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap stabilitas hegemoni

---

<sup>146</sup> Puguh Toko Arisanto & Adi Wibawa, pp. 172-173.

<sup>147</sup> Ainun Arta Zubaidah & Ratih Herningtyas, p. 128.

Amerika Serikat yang sudah berlangsung lama sejak pasca Perang Dunia II. Dalam kondisi ini, Amerika Serikat perlu mengambil serangkaian kebijakan untuk membendung pengaruh dan dominasi Tiongkok di tingkat global. Meningkatnya pengaruh dan dominasi Tiongkok di tingkat global merupakan salah satu faktor eksternal yang menginspirasi para pengambil kebijakan atau *Decision Makers* di Amerika Serikat khususnya Presiden Donald Trump untuk mengeluarkan sebuah kebijakan salah satunya ialah kebijakan proteksionisme ekonomi berupa kenaikan tarif pajak atas produk asal Tiongkok.

**c) Pencurian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Amerika Serikat oleh Perusahaan Tiongkok (*Societies Organized and Functioning as States and Government Action*)**

Pada tahun 2018, pemerintah Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah mengeluarkan kebijakan berupa kenaikan tarif pajak atas produk asal Tiongkok. Langkah ini diambil setelah pemerintah Amerika Serikat melakukan investigasi terkait adanya dugaan pencurian kekayaan intelektual Amerika Serikat oleh perusahaan asal Tiongkok. Hasilnya, telah ditemukan indikasi bahwa Tiongkok kerap “memaksa” perusahaan asal Amerika Serikat untuk menyerahkan properti intelektual mereka lewat manuver persyaratan kerja sama dengan perusahaan Tiongkok apabila ingin masuk ke pasar Negeri Tirai Bambu.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> Oik Yusuf, ‘Ini Alasan Trump Kenakan Tarif Impor untuk Produk Teknologi China,’ *Kompas.com* (daring), 24 Maret 2018, <<https://tekno.kompas.com/read/2018/03/24/12260037/ini-alasan-trump-kenakan-tarif-impor-untuk-produk-teknologi-china?page=all>>, diakses pada 10 Desember 2022.

Selain itu, masalah besar lainnya yang dialami Amerika Serikat ialah Tiongkok telah secara agresif mendukung investasi oleh perusahaan milik negara atau perusahaan yang diarahkan negara di Amerika Serikat untuk mendapatkan akses teknologi mutakhir di sektor-sektor tertentu seperti; penerbangan, sirkuit terpadu, teknologi informasi, bioteknologi, mobil, mesin industri, dan energi terbarukan. Tidak sampai disitu, Tiongkok juga mencuri kekayaan intelektual dengan cara meretas jaringan komputer sehingga Amerika Serikat mengaku dirugikan ratusan miliar dolar.<sup>149</sup>

Selama ini Amerika Serikat memandang bahwa Tiongkok telah mencuri kekayaan intelektual Amerika Serikat sehingga menyebabkan kerugian yang besar bagi negaranya.<sup>150</sup> Tiongkok memaksa perusahaan asal Amerika Serikat untuk menyerahkan properti intelektual mereka lewat serangkaian kebijakan struktural oleh negara. Amerika Serikat memiliki bukti kuat bahwa Tiongkok telah menekan perusahaan asal Amerika Serikat agar mau melakukan transfer teknologi dengan cara mewajibkan mereka menciptakan kemitraan lokal agar bisa memasuki pasar Tiongkok.<sup>151</sup>

Perwakilan dagang Amerika Serikat Robert E. Lighthizer juga sudah melakukan investigasi terhadap hukum, kebijakan, atau tindakan Tiongkok yang bisa merusak kekayaan intelektual, inovasi, atau pengembangan teknologi Amerika Serikat. Hasilnya ditemukan bahwa Tiongkok telah melakukan praktek perdagangan yang tidak adil terkait dengan transfer

---

<sup>149</sup> Adirini Pujayanti, p. 8.

<sup>150</sup> Febrina Damayanti, dkk, 'ASEAN di Tengah Rivalitas AS dan Cina: Kerja Sama ASEAN dengan RCEP dalam Mengurangi Dampak Perang Dagang,' *Jurnal Indonesian Perspective*, vol. 3, no. 2, Juli - Desember 2018, p. 150.

<sup>151</sup> Adirini Pujayanti, p. 8.

teknologi, kekayaan intelektual, dan inovasi. Amerika Serikat menemukan bahwa Tiongkok telah menggunakan kekuasaannya untuk memaksa perusahaan asal Amerika Serikat agar mengalihkan teknologinya ke perusahaan lokal Tiongkok serta melakukan serangan siber terhadap perusahaan Amerika Serikat untuk mengakses rahasia dagang.<sup>152</sup>

Dibawah payung artikel 301 dari Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974, pemerintah memberikan kewenangan pada diri mereka sendiri untuk secara sepihak memberlakukan sanksi terhadap negara-negara yang dinyatakan melakukan aktivitas perdagangan secara tidak adil.<sup>153</sup> Amerika Serikat sangat percaya bahwa Tiongkok selama ini telah melakukan pencurian kekayaan intelektual guna untuk memajukan perusahaan domestiknya. Hal inilah yang kemudian membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump geram dan selanjutnya mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak atas produk asal Tiongkok.<sup>154</sup> Selain itu, Presiden Trump juga akan memperketat investasi Tiongkok di proyek-proyek berteknologi tinggi di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan Tiongkok akan dilarang menanamkan modalnya di sektor-sektor tertentu yang memungkinkannya untuk memperoleh teknologi.<sup>155</sup>

---

<sup>152</sup> Risya Amanda Cahyani, p. 50.

<sup>153</sup> 'Trump Jatuhkan Sanksi Pada Cina Hari Ini, Perang Dagang Mengancam,' *BBC News Indonesia* (daring), 22 Maret 2018, <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43496057>>, diakses pada 20 Januari 2023.

<sup>154</sup> Risya Amanda Cahyani, p. 54.

<sup>155</sup> Oik Yusuf, 'Ini Alasan Trump Kenakan Tarif Impor untuk Produk Teknologi China,' *Kompas.com* (daring), 24 Maret 2018, <<https://tekno.kompas.com/read/2018/03/24/12260037/ini-alasan-trump-kenakan-tarif-impor-untuk-produk-teknologi-china?page=all>>, diakses pada 10 Desember 2022.

#### **4.4 Dampak Kenaikan Tarif Pajak Produk Asal Tiongkok oleh Amerika Serikat di Era Donald Trump**

Kebijakan Presiden Donald Trump menaikkan tarif pajak produk asal Tiongkok telah menimbulkan polemik dalam negeri bagi Amerika Serikat. Sejumlah politisi dan kalangan industri menyatakan kecemasannya tentang kemungkinan terjadinya tindakan balasan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap produk asal Amerika Serikat. Hal ini tentu saja bisa terjadi, mengingat produk pertanian Amerika Serikat selama ini juga banyak bergantung pada eksportnya ke Tiongkok. Dampak lebih buruk lagi dikhawatirkan akan terjadi apabila Tiongkok juga memboikot produk-produk Amerika Serikat lainnya.<sup>156</sup>

##### **4.4.1 Kenaikan Tarif Balasan Produk Asal Amerika Serikat oleh Pemerintah Tiongkok**

Kenaikan tarif yang sangat tinggi atas produk baja dan aluminium membuat Tiongkok kemudian merespon hal ini. Pada tanggal 2 April 2018 Presiden Tiongkok Xi Jinping meningkatkan tarif sebesar 15% - 25% terhadap 128 produk asal Amerika Serikat dengan total nilai sebesar US\$ 3 miliar dan secara garis besar menargetkan produk-produk agrikultur asal Amerika Serikat.<sup>157</sup> Selanjutnya, produk terbesar kedua yang dikenakan tarif oleh Tiongkok ialah kendaraan bermotor. Produk agrikultur seperti kedelai

---

<sup>156</sup> Adirini Pujayanti, p. 8.

<sup>157</sup> Ernawati Batubara, p. 2.



dan kendaraan bermotor merupakan sebagian dari produk Amerika Serikat yang terkena tindakan balasan tarif oleh pemerintah Tiongkok.<sup>158</sup>

Konflik dagang pun semakin memanas akibat Tiongkok yang juga ikut membalas, karena melihat dari semua kebijakan Presiden Trump terhadap Tiongkok. Berselang sehari setelahnya, pada tanggal 4 April 2018 Kementerian Perdagangan Tiongkok kembali merilis daftar barang yang akan dikenai tarif sebesar US\$ 50 miliar yang mencakup 106 produk asal Amerika Serikat termasuk diantaranya seperti; kacang kedelai, daging sapi, jagung, beberapa pesawat terbang, dan berbagai kendaraan. Tidak hanya itu, Tiongkok juga mengajukan keluhan kepada WTO terkait pembebanan tarif baja dan aluminium oleh Amerika Serikat.<sup>159</sup>

Selanjutnya, pada tanggal 17 April 2018 Tiongkok juga mulai memberlakukan kebijakan anti-dumping produk tepung Amerika Serikat yang mencapai US\$ 1 miliar. Kemudian, merespon kenaikan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tanggal 7 Agustus 2018. Tiongkok pun juga membalas dengan mengenakan tarif masuk sebesar 25% atas barang impor dari Amerika Serikat senilai US\$ 16 miliar. Pada tanggal 24 September 2018 Tiongkok juga kembali mengenakan tarif tambahan atas barang impor dari Amerika Serikat sebesar US\$ 60 miliar.<sup>160</sup>

Pada tanggal 8 Mei 2019, Amerika Serikat mengumumkan bahwa biaya tarif yang semula 10% ditingkatkan menjadi 25% dan akan efektif

---

<sup>158</sup> Ernawati Batubara, p. 8.

<sup>159</sup> Risyah Amanda Cahyani, p. 50.

<sup>160</sup> Istanul Badiri, pp. 151-152.

pada 10 Mei 2019. Merespon hal tersebut, Tiongkok juga menaikkan tarif atas produk Amerika Serikat sebesar US\$ 60 miliar. Hal ini menandai dimulainya babak baru dalam konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019. Pada tanggal 23 Agustus 2019, Tiongkok mengumumkan rencana penambahan biaya tarif sebesar 10% atas produk Amerika Serikat senilai US\$ 75 miliar sebagai tanggapan atas biaya tarif yang telah dirilis oleh Amerika Serikat pada bulan Agustus sebelumnya.<sup>161</sup> Tindakan balasan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok merupakan langkah yang rasional demi menjaga kestabilan ekonominya. Jika Tiongkok tidak memberikan tindakan balasan, maka Tiongkok akan rugi besar dengan membiarkan Amerika Serikat mengambil semua potensi ekonomi yang bisa dikembangkannya. Tindakan balasan ini pada akhirnya harus dilakukan oleh Tiongkok demi melindungi kepentingan nasionalnya.<sup>162</sup>

Konflik dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi peristiwa yang penting bagi dunia internasional, karena memiliki dampak yang cukup signifikan pada perekonomian global. Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia, sehingga pasti akan ada pengaruh yang ditimbulkan dari perselisihan keduanya, terutama sekali bagi negara-negara mitra dagang kedua negara. Namun, dampak paling terlihat dari konflik dagang ini ialah datang dari negara yang terlibat. Bahkan sebelum konflik dagang memuncak, ada prediksi yang menyebutkan bahwa jika ekspor dari Tiongkok ke Amerika

---

<sup>161</sup> Istanul Badiri, p. 153.

<sup>162</sup> Febrina Damayanti, dkk, p. 151.

Serikat dikurangi karena tarif impor yang tinggi, maka kerugian langsung dari PDB Tiongkok setidaknya akan mencapai 0,43%. Kemudian dari sisi Amerika Serikat, perusahaan Amerika Serikat di Tiongkok memiliki kemungkinan juga akan kehilangan konsumen mereka karena seruan nasionalistis Tiongkok untuk memboikot produk-produk Amerika Serikat lainnya seperti; Apple, McDonald's, dan KFC.<sup>163</sup>

Konflik dagang yang terjadi antar kedua negara telah menimbulkan berbagai respon dari negara lain. Banyak negara-negara di dunia mengecam kebijakan yang diterapkan oleh Trump, karena hal tersebut tidak hanya merugikan Tiongkok, melainkan juga negara-negara lainnya khususnya negara berkembang yang bergantung pada produk dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Oleh karena itu, perlu dilakukan perundingan atau negosiasi untuk menemukan jalan keluar dari konflik dagang yang terjadi, mengingat banyak negara yang dirugikan.<sup>164</sup> Kalkulasi untung dan rugi menjadi isu klasik, oleh karenanya tidak akan pernah ada yang diuntungkan dari konflik dagang yang terjadi karena lawannya pun pasti juga akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, konflik dagang yang terjadi antar negara selalu berakhir dengan perundingan atau negosiasi yang sekiranya bisa memberikan *Win-Win Solution* bagi negara-negara yang terlibat.

---

<sup>163</sup> Larisa Kapustina, dkk, 'US-China Trade War: Causes and Outcomes,' *Jurnal SHS Web of Conferences*, vol. 73, no. 1, 2020, p. 7.

<sup>164</sup> Sonia Agusti Parbo, p. 103.

#### **4.4.2 Negosiasi Perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok**

Melihat aksi saling balas tarif yang semakin memanas, kedua negara berusaha untuk menemukan jalan keluar. Pada 21 April 2018 menjadi momentum yang baik bagi konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dimana *U.S. Treasury Secretary* Steven Mnuchin menyatakan bahwa akan melakukan kesepakatan dagang dengan Tiongkok. Dengan demikian, Tiongkok merespon niat baik Amerika Serikat tersebut dan melakukan perundingan perdagangan bilateral di Beijing. Perundingan ini berlangsung pada 3-7 Mei 2018, dimana Amerika Serikat dan Tiongkok melakukan perundingan perdagangan pertama kalinya untuk membahas mengenai resolusi konflik dagang yang sedang dihadapi oleh kedua negara. Pertemuan di Beijing ini menjadi momentum pertama bagi kedua negara untuk menentukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

Pada pertemuan ini, Amerika Serikat meminta Tiongkok untuk mengurangi kesenjangan perdagangan sebesar US\$ 200 miliar dalam jangka waktu dua tahun. Akan tetapi, pertemuan perundingan pertama ini belum menemukan kesepakatan. Lebih lanjut, pada 15 Mei 2018 Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Washington untuk melakukan pembicaraan lanjutan terkait kesepakatan dagang kedua negara, dimana Tiongkok berencana melakukan penghentian tarif impor tepung asal Amerika Serikat. Akan tetapi, pernyataan tersebut menurut laporan tidak benar. Hingga pada 20 Mei 2018, kedua negara sepakat untuk menunda sementara konflik dagang dengan menanggukkan

kenaikan tarif setelah Tiongkok dilaporkan setuju untuk membeli lebih banyak produk dari Amerika Serikat.<sup>165</sup>

Pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa negaranya tidak akan terburu-buru untuk menyaingi angka tarif yang diberikan oleh Amerika Serikat. Pembalasan yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan langkah yang rasional dalam menjaga kestabilan ekonominya. Selain itu, langkah pembalasan yang diambil oleh Tiongkok ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kepentingan nasional negaranya. Melihat aksi saling balas tarif yang tidak ada ujungnya, membuat kedua negara memutuskan untuk mengadakan perundingan kembali dalam menemukan jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Bersamaan dengan pertemuan forum ekonomi multilateral G20 pada 30 November 2018 di Argentina, Amerika Serikat dan Tiongkok melaksanakan perundingan bilateral lanjutan di sela-sela pertemuan dengan memberikan penekanan besar terhadap kebijakan perdagangan mereka.

Perundingan kedua ini menghasilkan persetujuan dimana Tiongkok menetapkan akan meningkatkan pembelian terhadap produk pertanian dan energi dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, pada 24 Februari 2019 Trump kembali menunda rencananya untuk menaikkan tarif pajak produk asal Tiongkok yang semula sebesar US\$ 200 miliar atau dari 10% menjadi 25% dikarenakan ditemukannya kemajuan yang substansial dalam putaran kedua perundingan perdagangan dengan Tiongkok. Selanjutnya, pada 8 Mei 2019

---

<sup>165</sup> Sonia Agusti Parbo, pp. 107-108.

Amerika Serikat dan Tiongkok kembali melakukan negosiasi di Washington untuk membahas keberlanjutan perundingan sebelumnya. Namun, negosiasi tersebut berakhir gagal dikarenakan pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa Tiongkok telah mengingkari komitmennya untuk membeli produk pertanian dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat kembali menetapkan tarif yang semula 10% menjadi 25%. Hal ini tentu mengindikasikan terjadinya babak baru dalam konflik dagang kedua negara.<sup>166</sup>

Perundingan selanjutnya diadakan pada 29 Juni 2019 di sela-sela pertemuan KTT G20 di Jepang, dimana kedua negara secara resmi menyetujui untuk memulai kembali pembicaraan perdagangan. Trump menyetujui untuk tidak menaikkan tarif baru dan melakukan pelonggaran pembatasan suplai bagi perusahaan telekomunikasi asal Tiongkok yaitu *Huawei Technologies*. Begitu pula sebaliknya, Tiongkok menyetujui untuk membeli lebih banyak produk pertanian Amerika Serikat. Akan tetapi, praktik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan permintaan Amerika Serikat dimana Trump mengeluhkan bahwa Tiongkok belum menindaklanjuti perjanjian mereka sebelumnya untuk membeli lebih banyak produk pertanian dari Amerika Serikat.

Oleh karena itu, pada 1 Agustus 2019 negosiasi kedua negara terhenti dan Trump kembali menerapkan dan menaikkan tarif kepada Tiongkok sebesar 10% senilai US\$ 300 miliar yang akan diberlakukan 1 September

---

<sup>166</sup> Sonia Agusti Parbo, pp. 108-109.

2019. Disamping itu, Trump juga menegaskan bahwa pemberlakuan tarif akan terus meningkat hingga 25%. Trump menegaskan bahwa perundingan akan tetap dilaksanakan meskipun ditetapkan tarif yang diberlakukan secara bertahap. Ketegangan konflik dagang ini mencapai titik puncak, dimana ancaman Trump tersebut menyebabkan penghentian total pembelian produk pertanian asal Amerika Serikat yang berdampak pada melemahnya Dolar Amerika Serikat.

Rangkaian penyelesaian sengketa dagang dilanjutkan pada 4 September 2019 yang mana kedua negara mengumumkan akan melaksanakan perundingan perdagangan baru pada pertengahan September 2019. Tiongkok akan membebaskan 16 jenis produk asal Amerika Serikat dari tarif selama satu tahun. Sebaliknya, Trump mengumumkan akan menunda kenaikan tarif dari tanggal 1-15 Oktober 2019. Akan tetapi, pada putaran negosiasi berikutnya Trump, Lighthizer, dan Mnuchin berbicara kepada Wakil Perdana Menteri Tiongkok yaitu Liu He yang setuju untuk menetapkan langkah-langkah dalam meredakan ketegangan meskipun konflik dagang kedua negara belum menemukan titik terang, tetapi para pemimpin negara berkomitmen untuk melindungi produk mereka dari kenaikan tarif.<sup>167</sup>

Pada akhirnya, kedua negara setuju untuk melakukan perundingan kembali dan mengumumkan kesepakatan *Fase I* yang berlangsung selama dua hari yakni pada 10-11 Oktober 2019 di Washington DC yang

---

<sup>167</sup> Sonia Agusti Parbo, p. 109.

menghasilkan perjanjian bahwa Tiongkok akan membeli produk pertanian asal Amerika Serikat senilai US\$ 40-50 miliar setiap tahunnya dan memperkuat ketetapan tentang kekayaan intelektual. Sebaliknya, Amerika Serikat akan menunda kenaikan tarif pajak impor produk asal Tiongkok yang dijadwalkan pada 15 Oktober 2019.

Setelah berlangsung hampir dua tahun konflik dagang kedua negara, pada 15 Januari 2020 telah dicapai kesepakatan Tahap I untuk menetapkan “Masa Jeda” dari konflik dagang tersebut. Penandatanganan ini dilakukan di Washington DC yang ditanda tangani langsung oleh Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga dihadiri oleh para donor terutama dari Partai Republik dan para pemimpin bisnis. Trump menegaskan bahwa kesepakatan ini akan menyediakan panggung yang lebih kuat dalam menjalin hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.<sup>168</sup> Dalam perkembangannya, Amerika Serikat dan Tiongkok telah melakukan perundingan untuk menghindari terjadinya konflik dagang yang lebih parah dan membahayakan bagi tatanan ekonomi dunia. Hanya saja harus diakui bahwa tidak mudah untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah perundingan perdagangan, sehingga potensi konflik dagang tentunya masih bisa terjadi.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Sonia Agusti Parbo, pp. 109-110.

<sup>169</sup> Maulvi Nazir Ahmad, p. 14.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sudah berlangsung sejak lama dimulai pada tahun 1970-an, ketika pada saat itu Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengunjungi Tiongkok dan menyatakan akan melakukan dialog terbuka dengan negara tersebut serta bermaksud untuk membawanya ke dalam komunitas dunia internasional. Dari hubungan perdagangannya dengan Amerika Serikat, Tiongkok mendapatkan surplus perdagangan yang begitu besar dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara penyumbang terbesar dari surplus perdagangan yang didapatkan oleh Tiongkok.

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada tahun 2016, membawa perubahan kebijakan bagi perekonomian Amerika Serikat. Trump berpandangan bahwa liberalisme ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat dan sekutunya telah banyak merugikan Amerika Serikat karena menyebabkan produk mereka seperti baja dan aluminium produksi dalam negeri, tidak mampu untuk bersaing di pasar domestik dengan hadirnya baja dan aluminium yang diimpor dari Tiongkok. Trump yang menjadi Presiden Amerika Serikat berpandangan bahwa Tiongkok adalah negara yang paling banyak mendapatkan keuntungan dengan adanya tatanan ekonomi global yang selama ini ditopang oleh Amerika Serikat yang bercorak liberal kapitalis.

Merkantilisme menganggap bahwa ketergantungan dari negara lain sebagai sesuatu yang sangat merugikan, sehingga banyak negara di dunia membuat kebijakan proteksionisme salah satunya yang dilakukan oleh Amerika Serikat di era Donald Trump yang menaikkan tarif pajak produk asal Tiongkok. Perilaku Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan kenaikan tarif menunjukkan bahwa bagaimana upaya negara ini untuk menggunakan kebijakan proteksionisme sebagai instrumen ekonomi politik guna menciptakan ketahanan domestik yang bersumber pada stabilitas pasar domestik dengan memperketat proses masuknya produk asing yang masuk ke negaranya.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan Teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*) dari Richard Snyder, dkk. Ada beberapa faktor yang mendorong Donald Trump untuk mengeluarkan kebijakan ini, diantaranya faktor internal mengacu pada kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang mengalami penurunan, defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok, dan pengalaman Donald Trump sebagai seorang pengusaha. Selain itu, terdapat juga struktur dan perilaku sosial yang mempengaruhinya yakni Donald Trump yang berasal dari Partai Republik dan keinginan Amerika Serikat untuk merubah kebijakan ekonomi Tiongkok. Kemudian faktor eksternal, mengacu pada tingginya nilai ekspor Tiongkok di Amerika Serikat, meningkatnya pengaruh dan dominasi Tiongkok di tingkat global, dan pencurian hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Amerika Serikat oleh perusahaan Tiongkok.

## 5.2 Saran

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini masih jauh dari kata sempurna. Banyak sisi lain yang dapat dilihat lebih jauh untuk kemudian diteliti guna menunjang perkembangan studi hubungan internasional khususnya terkait dengan kajian analisis kebijakan luar negeri. Penulis berharap kekurangan yang ada dalam penelitian ini nantinya dapat disempurnakan kembali oleh peneliti-peneliti selanjutnya, baik dengan kesamaan studi kasus maupun dengan kesamaan teori dalam analisisnya. Selain itu, penulis juga memiliki saran untuk peneliti selanjutnya yang mungkin tertarik untuk meneruskan penelitian ini.

Penulis sangat merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk mengkaji terkait dinamika hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok di era Presiden Joe Biden. Dengan pemimpin yang berbeda, maka orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok kemungkinan besar akan berubah. Namun, menarik untuk dinanti apakah Presiden Joe Biden akan meneruskan kebijakan yang sudah ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump atau malah sebaliknya akan membuat sebuah terobosan dengan kebijakan yang baru. Selain itu, peneliti selanjutnya juga bisa memanfaatkan celah-celah yang belum diulas dalam penelitian ini sehingga bisa menghasilkan sebuah penelitian yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. D. Moroe, *Essentials of Political Research*, Westview Press, United States of America, 2000.
- Abdul Wahab, *Ekonomi Internasional*, Alauddin University Press, Makassar, 2013.
- Abubakar Eby Hara, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2011.
- Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Ardiprawiro, *Kebijakan Ekonomi & Perdagangan Internasional*, *Ekonomi Internasional*, Universitas Gunadarma Publishing, Depok, 2013.
- Asrudin, Mirza Jaka Suryana, & Musa Maliki (eds.), *Metode Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*, Intrans Publishing, Malang, 2014.
- Bangkit A. Wiryawan, *Zona Ekonomi Khusus: Strategi China Memanfaatkan Modal Global*, CCS, 2008.
- Hamdy Hady, *Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Jack C. Plano & Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, edisi Bahasa Indonesia *Kamus Hubungan Internasional*, diterjemahkan oleh Wawan Juanda, Abardin, Bandung, 1999.
- James N. Rosenau, *The Scientific Study of Foreign Policy*, Nichols Publishing Company, New York, 1980.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Logan Wright & Daniel Rosen, *Credit and Credibility: Risks to China's Economic Resilience*, Center for Strategic & International Studies, Washington DC, 2018.
- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Economic Development*, edisi Bahasa Indonesia *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*, diterjemahkan oleh Andri Yelvi, Erlangga, Jakarta, 2006.

- Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- R. Falkner, *International Political Economy*, The London School of Economics and Political Science, London, 2011.
- Richard W. Mansbach & Kristen L. Taylor, *Introduction to Global Politics*, London and New York: Routledge, 2008.
- Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, Little Brown Company, Boston, 1977.
- Sandu Siyoto & Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Scott Burchill & Andrew Linklater, *Theories of International Relations*, edisi Bahasa Indonesia *Teori-Teori Hubungan Internasional*, diterjemahkan oleh M. Sobirin, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Snyder, R.C. Bruck, & H.W. Sapin, *The Decision Making Approach to the Study of International Politics*, The Free Press, New York, 1969.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Walter S. Jones, *The Logic of International Relations*, edisi Bahasa Indonesia *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, diterjemahkan oleh Budiono Kusumohamidjojo, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

## **Jurnal**

- Ade Priangani, Makbul Mansyur, & Eden Komarudin Soerdi, 'Pandemi Covid 19 dan Menguatnya Proteksionisme,' *Journal Prosiding Senaspolhi*, vol. 1, no. 1, Agustus 2021.
- Adhi Prasetyo, 'Antisipasi Indonesia Terhadap Kebijakan GSP Amerika Serikat dan Perang Dagang Amerika Serikat vs China,' *Jurnal Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, vol. 3, no. 13, Juli 2018.
- Adirini Pujayanti, 'Perang Dagang Amerika Serikat – China dan Implikasinya Bagi Indonesia,' *Jurnal Info Singkat*, vol. 10, no. 7, April 2018.
- Aditya Ramadhani & Sri Muryantini, 'Latar Belakang Keluarnya Amerika Serikat dari Keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* di Era Presiden Donald

- Trump,' *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, vol. 11, no. 1, Januari 2019.
- Agastya Wardhana & Vinsensio Marselino Arifin Dugis, 'Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump,' *Global Strategis*, vol. 13, no. 2, 2019.
- Agastya Wardhana, 'Grand Strategy Obama: Pivot to Asia,' *Global Strategis*, vol. 12, no. 1, 2018.
- Ahmad Sahide, 'Proteksionisme Trump dan Supremasi Politik Global Amerika', *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, vol. 17, no. 1, 2021.
- Ainun Arta Zubaidah & Ratih Herningtyas, 'Conciliator vs Bloc Leader: Perbandingan Kebijakan Barack Obama & Donald Trump Dalam Merespon Pertumbuhan Ekonomi China,' *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, vol. 3, no. 2, Desember 2021.
- Aldila Arin Aini, Islamiah Bastiar, & Sumarlan, 'Kemenangan Donald Trump Sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 Melalui Analisis Konstruksi Klausa Relatif Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Secara Semantis,' *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 18, no. 1, Februari 2017.
- Ani Soetjipto, 'Memaknai Hubungan Cina - Amerika Kontemporer: Implikasinya Untuk Kajian Politik Internasional,' *Global & Strategis*, vol. 8, no. 1, Januari – Juni 2014.
- Arisanto, 'Perang Dagang Era Donald Trump Sebagai Kebijakan Luar Negeri Adaptif *Convulsive* Amerika Serikat,' *Indonesian Journal of International Relations*, vol. 5, no. 2, Juli 2021.
- Elsa Seirafina Ardhani, 'Perang Dagang Amerika Serikat dengan China: Trump VS Xi Jinping,' *Jurnal Skripsi Digital Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (daring), 2019, <<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/26044/K.Jurnal.pdf?sequence=12&isAllowed=y>>, diakses pada 16 Agustus 2021.
- Ernawati Batubara, 'Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Republik Rakyat Cina,' *JOM FISIP*, vol. 6, no. 2, Juli – Desember 2019.
- Febrina Damayanti, dkk, 'ASEAN di Tengah Rivalitas AS dan Cina: Kerja Sama ASEAN dengan RCEP dalam Mengurangi Dampak Perang Dagang,' *Jurnal Indonesian Perspective*, vol. 3, no. 2, Juli – Desember 2018.
- Helsa Eka Putri & Aspin Nur Arifin Rivai, 'Donald Trump, *America First*, dan Deglobalisasi: Bagaimana Kelanjutannya,' *Insignia Journal of International Relations*, vol. 6, no.1, April 2019.
- Humphrey Wangke, 'ASEAN, Indonesia, dan Perang Dagang Amerika Serikat-China,' *Jurnal Info Singkat*, vol. 11, no. 11, Juni 2019.

- Humphrey Wangke, 'Ketegangan Hubungan AS-China dan Dampaknya Terhadap Indonesia,' *Jurnal Info Singkat*, vol. 12, no. 15, Agustus 2020.
- Inayatul Bariah, dkk, 'Strategi Kebijakan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perang Dagang AS-China,' *Jurnal Humaniora*, vol. 4, no. 2, Oktober 2020.
- Istanul Badiri, 'Analisis Ekonomi Politik Internasional dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok Periode 2018-2019,' *Padjadjaran Journal of International Relations*, vol. 2, no. 2, September 2020.
- Lalu Puttrawandi Karjaya, 'Upaya Uni Eropa (UE) Dalam Menangani Krisis Pengungsi di Kawasan Uni Eropa,' *Journal of Innovation Research and Knowledge*, vol. 2, no. 5, Oktober 2022.
- Lalu Puttrawandi Karjaya, Rezki Satri, & Suspiati, 'Greenpeace, Corporations and Deforestation Crimes: A Case Study of Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) in Indonesia,' *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 8, no. 2, Oktober – Maret 2020.
- Laode Muhamad Fathun, 'Proteksionisme Sengketa Dagang Dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi Studi Kasus: Proteksionisme AS Terhadap Impor Daging Kanada,' *Jurnal Asia Pacific Studies*, vol. 1, no. 1, Januari – Juni 2017.
- Larisa Kapustina, dkk, 'US-China Trade War: Causes and Outcomes,' *Jurnal SHS Web of Conferences*, vol. 73, no. 1, 2020.
- M. Chairil Akbar Setiawan, Garcia Krisnando Nathanael Ginting, & Anwar Ilmar, 'Relasi antara Politik Identitas terhadap Proteksi Perdagangan di bawah Pemerintahan Donald Trump,' *Journal of Political Issues*, vol. 2, no. 1, Juli 2020.
- Maulvi Nazir Ahmad, 'Analisis Gaya Kepemimpinan Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump,' Juni 2021.
- Mirna Ardiyanti Pratama, 'Keputusan Amerika Serikat Mencabut Pembatasan Ekspor Minyak Mentah Tahun 2015,' *Jurnal Skripsi Digital Repository Universitas Jember* (daring), 2017, <<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/82740/Mirna%20Ardiyanti%20Pratama.pdf?sequence=1>>, diakses pada 1 September 2021.
- Puguh Toko Arisanto & Adi Wibawa, 'Perang Dagang Era Donald Trump Sebagai Kebijakan Luar Negeri Adaptif *Convulsive* Amerika Serikat,' *Indonesian Journal of International Relations*, vol. 5, no. 2, Juli 2021.
- Resitaka Aulia Nurmamurti, dkk, 'Analisis Kebijakan Luar Negeri Trump: Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat – China,' *Jurnal Sospoli*, vol. 2, no. 1, Januari 2022.

- Revo Kristiadi Aer, 'Pengaruh Perang Dagang China – Amerika Serikat Terhadap Hubungan Dagang Indonesia dengan Amerika Serikat,' *Jurnal Politico*, vol. 10, no. 4, 2021.
- Risya Amanda Cahyani, 'Analisis Kebijakan Tarif Maupun Non Tarif Amerika Serikat Terhadap Tiongkok Dalam Perang Dagang,' *Journal of International Relations*, vol. 6, no. 1, 2020.
- Sonia Agusti Parbo, 'Negosiasi Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok,' *Media Ekonomi*, vol. 28, no. 2, Oktober 2020.
- Vanilla Planifolia, 'Strategi Rebalancing Amerika di Kawasan Asia Pasifik,' *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 6, no. 1, April – September 2017.
- Vina Benita Laksono, Triesanto Romulo Simanjutak, & Christian H.J. de Fretes, 'Dampak Perang Dagang Amerika Serikat-Cina Terhadap Pertumbuhan Investasi Asing di Vietnam Tahun 2018-2019,' *Jurnal Cakrawala*, vol. 9, no. 2, Desember 2020.
- Wang Dong, 'China's Trade Relations with the United States in Perspective,' *Journal of Current Chinese Affairs*, vol. 39, no. 3, July 2010.
- Yulius Purwadi Hermawan, 'Kevin Rudd dan Inovasi Baru Menghadapi Kekuatan Global dan Multilateralisme,' *Jurnal Luar Negeri: Menjalin Keakraban Baru Indonesia-Australia*, vol. 25 (1-4), 1-17, 2008.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Ayu Kurniawati, Skripsi: "*Proteksionisme Ekonomi Amerika Serikat Pada Era Donald Trump*" (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).
- Dwi Ardiantini, Skripsi: "*Hubungan Kerjasama Dagang Antara Amerika Serikat dengan Tiongkok Setelah Implementasi Kebijakan Internet Plus*" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).
- Fatma Rahmalia Hanifah, Skripsi: "*Perubahan Arah Politik Perdagangan Amerika Serikat di bawah Kepemimpinan Presiden Donald Trump Studi Kasus: Penerapan Kebijakan Tarif Impor Baja dan Aluminium*" (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020).

### **Artikel Website (daring)**

- 'China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States,' *Congressional Research Service* (daring), 2019, <<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33534>>, diakses pada 1 Februari 2022.



- ‘Perkembangan Perekonomian Amerika Serikat, Negara dengan Kekuatan Ekonomi Terbesar di Dunia,’ *Ajarekonomi.com* (daring), 16 Oktober 2018, <<https://www.ajarekonomi.com/2018/10/perkembangan-perekonomian-amerika.html>>, diakses pada 14 Mei 2022.
- ‘Trump Jatuhkan Sanksi Pada Cina Hari Ini, Perang Dagang Mengancam,’ *BBC News Indonesia* (daring), 22 Maret 2018, <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43496057>>, diakses pada 20 Januari 2023.
- ‘U.S. Trade with Major Trading Partners,’ *Congressional Research Service* (daring), 2018, <<https://fas.org/sgp/crs/row/R45434.pdf>>, diakses pada 1 Februari 2022.
- Frank Sampson Jannuzi, ‘Carla A. Hills, & Dennis C. Blair, ‘U.S.-China Relations: An Affirmative Agenda, A Responsible Course,’ *Council on Foreign Relations* (daring), 14 Mei 2007, <<https://www.cfr.org/event/us-china-relations-affirmative-agenda-responsible-course>>, diakses pada 29 Januari 2022.
- Josephus Primus, ‘Masuk WTO, China Perkasa,’ *Kompas.com* (daring), 11 November 2011, <<https://ekonomi.kompas.com/read/2011/11/11/16114165/~Internasional~News>>, diakses pada 29 Januari 2022.
- Mike Bird, ‘China Just Took Over the US as The World’s Largest Economy,’ *Insider* (daring), <<https://www.insider.com/asia>>, diakses pada 30 Januari 2022.
- Nidia Zuraya, ‘Trump Berlakukan Bea Impor Panel Surya dan Mesin Cuci,’ *Republika.co.id* (daring), 24 Januari 2018, <<https://www.republika.co.id/berita/p31163383/trump-berlakukan-bea-impor-panel-surya-dan-mesin-cuci>>, diakses pada 14 Mei 2022.
- Oik Yusuf, ‘Ini Alasan Trump Kenakan Tarif Impor untuk Produk Teknologi China,’ *Kompas.com* (daring), 24 Maret 2018, <<https://tekno.kompas.com/read/2018/03/24/12260037/ini-alasan-trump-kenakan-tarif-impor-untuk-produk-teknologi-china?page=all>>, diakses pada 10 Desember 2022.
- Rusmanto, ‘Trump Tanda Tangan Aturan Bea Masuk Baja dan Aluminium,’ *WinNetNews.com* (daring), 9 Maret 2018, <<https://www.winnetnews.com/post/trump-tanda-tangani-aturan-bea-masuk-baja-dan-aluminium>>, diakses pada 31 Maret 2022.
- Samhis Setiawan, ‘Studi Kepustakaan: Tujuan, Sumber, Metode, Jenis,’ *Gurupendidikan.com* (daring), 22 September 2011, <<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>>, diakses pada 29 September 2021.

Yanyan Ahmad Yani & Mair, 'Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praktis,' *Pustaka UNPAD* (daring), Juni 2010, <[http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/06/perspektif\\_perspektif\\_politik\\_luar\\_negeri.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf)>, diakses pada 1 September 2021.

Zahra Arlinia, 'Perang Dagang Amerika-China,' *Republika.co.id* (daring), 14 Juni 2022, <<https://retizen.republika.co.id/posts/155081/perang-dagang-amerika-china>>, diakses pada 31 Oktober 2022.

### **Video (daring)**

Alfian Adi Saputra, *Selamat Datang Perang Dagang Amerika Serikat vs Tiongkok* [video], <<https://www.youtube.com/watch?v=8J9CzRRnz3w>>, diakses pada 15 September 2021.

Alfian Adi Saputra, *Tujuan Penelitian: Eksploratif, Deskriptif, Eksplanatif, dan Evaluatif* [video], <<https://www.youtube.com/watch?v=TYXnkyjfsJo>>, diakses pada 28 September 2021.